SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 - 2029

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

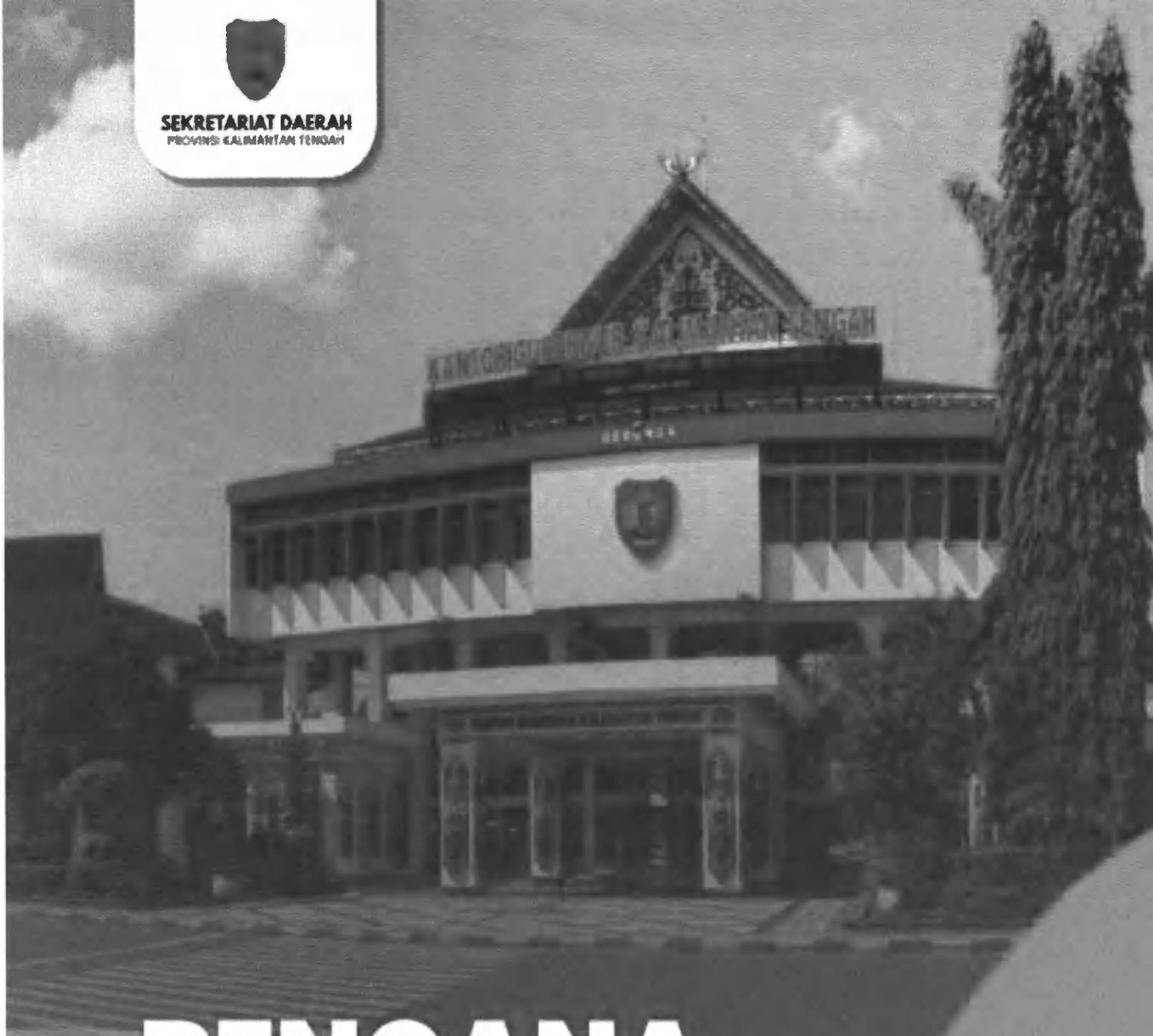

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 - 2029

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/86/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA STKATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimhang :

a. hahwa Reneana Strategis Perangkat Daerah sehagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan stratcgi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Dacrah;
b. hahwa berdasarkan ketentuan Pasai 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pcmbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Reneana Pemhangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemhangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Stratcgis Pcrangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tabun 2025-2029;
c. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mcnetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pcnyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemhangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinrah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinrah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemhangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembahgunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pcrubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerinlah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kaiimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (bembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 yang terdiri dari :

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Badan Perencanaan Pemhangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tcngah;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prorinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kaiimantan Tengah;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kaiimantan Tengah;
11. Dinas Perhubungan Provinsi Kaiimantan Tengah;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Pcrkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peteruahan Provinsi Kalimantan Tcngah;
16. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengab;
18. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Perdagangan dan Pcrindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tcngah;
22. Dinas Penanaman Modai Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Pendidikan Provinsi Kahmantan Tengah;
24. Dinas Kesehatan Provinsi Kaiimantan Tengah;
25. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;

28. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Sektetariat Dewan Perwaktlan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Badan Pengkuhung Provinsi Kalimantan Tengah;
36. Rumab Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
37. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
38. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
39. Sekretariat Daerah :
    a. Biro Perekonomian Sektetariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
    h. Biro Pemerintanan dan Otonomi Daerah Sektetariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
    c. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerak Provinsi Kalimantan Tengah;
    d. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
    e. Biro Organisasi Sektetariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
    f. Biro Umum Sektetariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
    g. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
    h. Biro Adminisrtasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
    i. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah;

KEDUA : Pcrangkat Daerah sesuai diktum KESATU diminta membentuk Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Struktur dari Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi sekurang-kurangnya :

Ketua Tim	:	Kcpala Perangkat Daerah
Sekretaris	:	Eselon III / Administrator
Kelompok Kerja	:	Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kehutuhan,

yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota jabatan fungsional tertentu / staf Perangkat Daerah dan unsur pemerintah / non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan analisis gambaran pelayanan;
b. melakukan analisis permasalahan;
c. melakukan penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
d. melakukan analisis isu strategis;
e. melakukan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD yang sesuai dengan Visi dan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;
f. melakukan perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
g. melakukan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah terhadap penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716, Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NGMOR : 600/276/AOPIM.I/VI/2025

TENTANO

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PRGVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa agar penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tortib, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Ponyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemorintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tantang Penataan Ruang (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambehan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lemberan Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambehan Lomberan Negara Nomor 6870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tantang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lemberan Negara Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
9. Peraturan Pamerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tantang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peroncanaan, Pengendalian, den Evaluesi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubaban Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Peiaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daiam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonasia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Instruksi Menteri Daiam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimanten Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah Provinsi Kalimanten Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 11 Nomor 2024);
18. Peraturan Gubemur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tenteng Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
19. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEOIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029**

KESATU : Membantuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimakaud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bahan data, antara lain:
   1. melakukan analisis gambaran pelayanan;
   2. melakukan analisi parmasalahan;
   3. melakukan panelaahan dokumen perencanaan lainnya;
   4. melakukan analisis isu strategis;

5. melakukan perumusan tujuan dan sasaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Provinsi Kalimantan Tengah yang sesuai dengan Visi dan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubarnur Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;
6. melakukan perumusan strategi dan arah kebijakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. melakukan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran bardasarkan strategi dan kebijakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Provinsi Kalimantan Tengah;

b. melakukan kegiatan koordinasi dengan anggota Tim Ponyusun, maupun Dinas/Instansi terkait;

c. mengolah, menganalisa dan menyusun bahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disusun menjadi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029; dan

d. melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan koreksi penyempumaan dan/atau pengesahan/penandatanganan.

KETIOA : Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah terhadap penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya,
pada tanggal Juni 2025,

PIt. SEKRETARIS DAERAH,

LEONARD S. AMPUNG

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:
1. Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENOAH
NOMOR : 800/276/ADPIM.I/VI/2025
TENTANO PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEOIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTANTENOAH
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUOUKAN DALAM TIM
1.	Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T. NIP. 19660315 199203 1 010	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
2.	Ir. SUNARTI, M.M. NIP. 19696907 199403 2 905	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
3.	JOHNI SONDER, S.STP.,M.Si. NIP. 19789622 199612 1 002	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
4.	HARIS SAPUTRA NOORDI, S.T., M.A. NIP. 19621231 201001 1 034	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Sekretariat
5.	SRI YULIANTI, S.Kom. NIP. 19801231 290963 2 001	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Administrasi Pimpinan	Koordinator Administrasi Pimpinan
6.	OKTARIA NOVATRINA PURBA, S.Sos. NIP. 19861996 201903 2 009	Penelaah Teknis Kebijakan / Staf Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Administrasi Pimpinan	Anggota
6.	OKTAVIANUS KALIWUS, S.T. NI PPPK. 197510132025211009	Perencana Ahli Pertama / Staf Sub Bagian Tata Usaha Birc pada Biro Administrasi Pimpinan	Anggota
7.	ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P. NIP. 198220415 201001 2 905	Kepala Sub Bagian Teta Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Biro Umum	Koordinator Bagian Umum
8.	RAMOT M. MANURUNG, S.T. NI PPPK. 198911112025211020	Staf Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Biro Umum	Anggota
9.	TASYA HAPSARI, S.Ak. NIP. 29010211 202504 2 903	Perencana Ahli Periama pada Biro Umum	Anggota
10.	ASTRI ROSELIN S.P, S.Si., M.Si. NIP. 19860415 201101 2 001	Kepala Sub Bagian Teta Usaha pada Biro Organisasi	Koordinator Bagian Organisasi
11.	YUPIA FATMAWATY, S.H. NI PPPK. 196312152025212022	Penata Layanan Oparasional pada Biro Organisasi	Anggota
12.	ELMAYANNA ATRIANY, S.E. NIP. 19040005 201101 2 903	Kepala Sub Bagian Teta Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat	Koordinator Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	SUGIANTO, S.P., M.A.P. NIP. 19800411 201503 1 001	Perencana Ahli Muda pada Birc Kesejahteraan Rakyat	Anggcta
14.	DAMIS, S. Pt. NIP. 19730010 200701 1 022	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian	Koordinator Bagian Perekonomian
15.	GUSTI IRWANDINATA, S.Kom. NI PPPK. 199200122025211008	Penata Layanan Operasional pada Biro Perekonomian	Anggota
16.	SAIFUL RAHMAN, S.H. NIP. 19741019 200701 1 000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Birc Hukum	Koordinator Bagian Hukum
17.	SRI ROSNITA, S.E. NIP. 19821002 200901 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum	Anggota
18.	ELITA, S. Sos. NIP. 19690809 199403 2 007	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan	Koordinator Bagian Administrasi Pembangunan
19.	FERICHA FEBRIANE, S.E. NIP. 19930204 202594 2 001	Analis Kebijakan Anli Pertama Pada Biro Administrasi Pembangunan	Anggota
20.	NOR FiTRIANA, S.Pd. NI PPPK. 199002272025212006	Penata Layanan Operasicnal pada Biro Administrasi Pembangunan	Anggota
21.	DEBBIE NAINDASARI KOETIN, S.E. NIP. 19769617 200901 2 002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Koordinator
22.	AMARETA KRISTINA KESUMADEWI, S.IP. NIP. 20000902 202106 2 001	Penata Keiola Pemerintahan pada Birc Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
23.	EVAN DANNY VANZANO, S.Hut. NIPPPK. 198502152025211010	Penata Layanan Operasional pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
24.	NI NENGAH F. SARI, S.ST.Pi, M.M. NIP. 190002272025212096	Kepela Sub Bagian Pembinaan SDM pada Birc Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinator
25.	BERNADIANTHO, S.E. NI PPPK. 198212012025211029	Penata Layanan Oparasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggcta

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

PIt. SEKRETARIS DAERAH,

LEONARO S. AMPUNC

KATA PENGANTAR

Assalamuaiaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan TengahTahun 2025-2029.

Dasar pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menongah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sokretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ini morupakan dokumen perencanaan yang sangat penting mengingat telah terpilihnya Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2025, kemudian terbitnya Surat Koputusan Gubernur No. 188.44/86/2025 Tentang Rencana Stratogis Porangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2025-2029.

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sokretaris Daerah, Asisten, dan seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tolah mendukung dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ini, semoga dengan adanya RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekrotariat Daerah yang mengarah kepada tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah jangka menengah dalam menjalankan visi-misi serta program kerja Gubernur Kalimantan Tengah.

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

A.n. Gubernur Kalimantan Tengah,
Plt. Sekretaris Daerah

Leonard S. Ampung

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 8

1.4 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 11

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... 11

2.2 Sumber Daya Sekretaraiat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 65

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah..... 71

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah..... 93

2.5 Mitra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemberian Layanan..... 96

2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja 98

2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah..... 99

2.8 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 104

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 107

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanTengah Tahun 2025-2029..... 107

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029..... 110
3.3 Strategi Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 119
3.4 Penahapan Pembangunan Renstra Sekretariat Daerah..... 120
3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 124

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …….. 127
4.1 Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ……..…….. 178
4.2 Program Penata Organisasi ……..... 180
4.3 Program Kesejahteraan Rakyat …….. 181
4.4 Program Perekonomian dan Pembangunan……..... 181
4.5 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah ……..... 225
4.6 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah……..…. .. 226
4.7 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah……..…. 227

BAB V PENUTUP ……... 231

DAFTAR LAMPIRAN 232

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah……..	64
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jumlah Pegawai dan Jenis Kelamin ……...	65
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Pendidikan …….....	66
Tabel 2.4	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan	67
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2024……...	74
Tabel 2.6	Pencapaian Pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan Realisasi Anggaran 2021-2024……...	80
Tabel 2.7	Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah	94
Tabel 2.8	Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi Dan Konsultasi Instansi Vertikal/ Dinas /Badan /Kantor/ Biro/BUMN/BUMD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah…….....	97
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	99
Tabel 2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah……...	101
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah…….....	117
Tabel 3.2	Penahapan Pembangunan Renstra Sekretariat Daerah ……...	123
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah……...	128
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra……	180
Tabel 4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Sekretariat Daerah……..	183
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah…….	226
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah ……..	228

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin …….....	66
Grafik 2.2	Perbandingan Jumlah Pegawai PNS dan PPPK ….....	66
Grafik 2.3	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan …….....	67
Grafik 2.4	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	68
Grafik 2.5	Total Nilai Aset Jalan Irigasi Jaringan ……...	69
Grafik 2.6	Total Nilai Aset Tetap Peralatan Mesin …….....	70
Grafik 2.7	Total Nilai Aset Gedung Bangunan	70
Grafik 2.8	Total Nilai Aset Tetap Lainnya ……..……..	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Capaian Kinerja Sekretariat Daerah T.A. 2024 73

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN HALAMAN DEPAN

Lampiran	SK Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	
Lampiran	SK Tim Penyusun Renstra Setda 2025-2029	

LAMPIRAN HALAMAN BELAKANG

Lampiran	Pohon Kinerja Sekretariat Daerah dan Cascading Sekretariat Daerah ……...	233
Lampiran	Reviu Renstra Setda 2025-2029 Oleh Inspektorat ….	234
Lampiran	Reviu Bapperida Atas Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 ….....	235

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai koordinasi, fasilitasi, serta administrasi pemerintahan, yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Secara khusus, Misi ke-5 RPJMD, yaitu “Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045”, menjadi acuan utama dalam perumusan tujuan Sekretariat Daerah. Misi ini diterjemahkan dalam tujuan strategis “Mewujudkan Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas”, yang menekankan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi, transparansi pelayanan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Penentuan tujuan dan sasaran pada Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 memperhatikan tujuan, sasaran Tenokratik RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Penentuan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dalam RENSTRA PD Provinsi yang tuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045;
3. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;
4. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2024;
5. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan / subkegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (Outcome);
6. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
7. Kebijakan Nasional;
8. Regulasi yang berlaku Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, koordinasi antar perangkat daerah, serta fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, perencanaan yang terarah dan terukur sangat penting guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RENSTRA PD disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. RENSTRA PD adalah acuan sebagai penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. RENSTRA PD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
4. RENSTRA PD adalah acuan sebagai penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah;
5. RENSTRA PD adalah acuan sebagai penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
6. RENSTRA PD adalah acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029, diharapkan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan birokrasi yang profesional, bersih, serta melayani dan seluruh jajaran Sekretariat Daerah memiliki arah dan pijakan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga mampu berkontribusi secara nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900;1,15;5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
29. Peraturan Daerah RPJMD 2025-2029 Provinsi Kalimantan Tengah nomor 3 Tahun 2025 (LD 2025/3, TLD 123) tgl 27 Agustus 2025;
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
31. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/86/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi dokumen perencanaan yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah serta menjamin keterkaitan dan sinergisitas dalam pencapaian RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 antara lain adalah:

a. Memberikan penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang terukur ke dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2025 – 2029 dengan berpedoman RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 -2029;
b. Menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Khusunya yang tertuang dalam **Misi 1** (Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)) dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal, **Misi 2** (Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing) dan **Misi 5** (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan terpercaya) RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2029 Serta **Program Unggulan Huma Betang Sejahtera** dalam program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
c. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta proses penganggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapian tujuan strategis dan kontribusi pada perwujudan visi nasional dan daerah
d. Mempermudah pengendalian dan pengukuran keberhasilan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan

dengan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara internal maupun eksternal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1) Subbab Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
   b. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
   c. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
   d. Kelompok Sasaran Layanan
   e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
   f. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
   g. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2) Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah
   a. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029
   b. Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;
e. Pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi;
f. Fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
g. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yang masing-masing membawahi 3 (tiga) biro yang dijabarkan sebagai berikut:

2.1.2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Membantu Sekretaris Daerah dalam Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
d. Pantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya**.**

2.1.2.1 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan, membawahi:

a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
b. Subbagian Pemerintahan Umum; dan
c. Subbagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana di maksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan biro, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, tata laksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang- undangan, penyediaan bahan rencana dan program kerja serta pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
b. pelaksanaan dan penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha;
c. pelaksanaan dan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha;
d. pelaksanaan dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha;
e. pelaksanaan dan penyiapan bahan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. pelaksanaan dan penyiapan bahan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
g. pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaanbarang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistema informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
h. pelaksanaan dan penyiapan bahan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. pelaksanaan dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;

j. pelaksanaan penyiapan bahan, pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro;
k. pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
l. pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
m. pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai ASN;
n. pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
o. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Tata Usaha secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
p. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Tata Usaha;
q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan.

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Otonomi Daerah, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama daerah, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerja sama daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, asistensi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah kabupaten/kota serta pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;

a. penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antarpemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antarpemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
c. penyiapan bahan dan pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antarpemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
d. asistensi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah kabupaten/kota;

e. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
f. pengoordinasian pelaksanaan dekonsentrasi tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah;
g. penyiapan bahan dan pengoordinasian pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2.2 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan,pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Biro Kesejahteraan Rakyat mempuyai fungsi:.

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

a. Bagian Bina Mental Spiritual;

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual.asarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi:

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual;
c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan f aktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual;
d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan haji;
e. Pengumpulan dan pengolahan data lembaga keagamaan;
f. Penyusunan pedoman pembinaan kehidupan beragama;
g. Pengumpulan dan pengolahan data jumlahpenduduk umat beragama; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan Subbagian Tata Usaha, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang tata usaha, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan

penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha lingkup biro.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Tata Usaha Menyelenggarakan Fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pelayanan administrasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
d. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
e. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
f. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan lingkup biro;
g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
h. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
i. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
j. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
k. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai ASN;
l. Pelaporan dan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Mental Spiritual secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Bina Mental Spiritual.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar III;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar III;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar III; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan, sosialdan Pendidikan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi lain terkait yang menangani bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
g. fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2.3 BIRO HUKUM

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum, membawahi :

a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota;
c. Bagian Bantuan Hukum; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah kabupaten/kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dalam melakukan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan, evaluasi rancangan peraturan daerah, verifikasi rancangan peraturan daerah, pemberian nomor register ancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, dan pembatalan peraturan bupati/walikota;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dalam melakukan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan, evaluasi rancangan peraturan daerah, verifikasi rancangan peraturan daerah pemberian nomor r egister rancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, dan pembatalan peraturan bupati/walikota;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam melakukan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan, evaluasi rancangan peraturan daerah, verifikasi rancangan peraturan daerah, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, dan pembatalan peraturan bupati/walikota;
d. Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan dalam melakukan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan, evaluasi rancangan peraturan daerah, verifikasi rancangan peraturan daerah, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, dan pembatalan peraturan bupati/walikota;

e. Pelaksanaan konsultasi kepada instansi vertikal dalam rangka persiapan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan, evaluasi rancangan peraturan daerah, verifikasi rancangan peraturan daerah, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, dan pembatalan peraturan bupati/walikota;
f. Pelaksanaan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan, evaluasi rancangan peraturan daerah, verifikasi rancangan peraturan daerah, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, dan pembatalan peraturan bupati/walikota;
g. Pelaksanaan inventarisasi dan harmonisasi dalam melakukan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan, evaluasi rancangan peraturan daerah, verifikasi rancangan peraturan daerah, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, dan pembatalan peraturan bupati/walikota dengan produk hukum provinsi;
h. Penyusunan bahan laporan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri berkenaan pengawasan yang dilakukan melalui fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan, evaluasi rancangan peraturan daerah, verifikasi rancangan peraturan daerah, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, dan pembatalan peraturan bupati/walikota;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada semua unsur pemerintah provinsi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, nonlitigasi dan pemajuan hak asasi manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, nonlitigasi dan hak asasi manusia;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, nonlitigasi dan hak asasi manusia;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, nonlitigasi dan hak asasi manusia;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, nonlitigasi dan hak asasi manusia;
e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk penyelesaian sengketa hukum di pengadilan dan di luar pengadilan;
f. pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hubungan kedinasan sebagai akibat adanya gugatan Tata Usaha Negara, gugatan perdata yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pengadilan;
g. pelaksanaan penanganan sengketa pemerintah provinsi dalam perkara pengujian materi perundang-undangan;
h. pelaksanaan penanganan sengketa hukum unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di luar pengadilan;
i. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
j. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat dan daerah dalam rangka memfasilitasi peningkatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Provinsi Kalimantan Tengah;
k. pengoordinasian pelaksanaan harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah dalam rangka penyelarasan produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia;
l. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pemasyarakatan hak asasi manusia;

m. pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya;
n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan semua instansi dalam rangka pemberian telahaan, pertimbangan dan bantuan hukum;
o. pelaksanaan pemberian telahaan, pertimbangan dan pendapat hukum;
p. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan tata usaha dan rumah tangga biro;
q. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:

a. Biro Perekonomian;
b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c. Biro Administrasi Pembangunan.

2.1.3.1 BIRO PEREKONOMIAN

Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Perekonomian mempunyai fungsi:

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Perekonomian, terdiri atas:

a. Bagian Kebijakan Perekonomian;
b. Bagian Sumber Daya Alam;
c. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian.

Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kebijakan Perekonomian membawahi Subbagian Tata Usaha. Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yeng berada di bawah dan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan biro, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, tata laksana, analisis jabatan, dokumentasi perundang-undangan, penyediaan bahan rencana dan program.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
b. bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, mempunyai tugas:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3.2 BIRO PENGADAAN JASA

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa. Subbagian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup biro, pembinaan para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa.

2.1.3.3 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan

pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:

a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan

pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi Subbagian Tata Usaha. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan biro, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, tata laksana, analisis jabatan, dokumentasi perundang-undangan, penyediaan bahan rencana dan program kerja serta pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan

kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan, mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan, dan penyajian data.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah/wilayah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.4 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi
e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan administrasi pimpinan;
f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

a. Biro Organisasi;
b. Biro Umum; dan
c. Biro Administrasi Pimpinan.

2.1.4.1 BIRO ORGANISASI

Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Organisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;

b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Organisasi, terdiri atas:

a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
c. Bagian Tata Laksana.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
d. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas penyusunan standar kompetensi jabatan,

evaluasi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan provinsi dan kabupaten/kota;

e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan provinsi dan kabupaten/kota; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik. Bagian Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana membawahi Subbagian Tata Usaha. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup biro. Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.
b. pengelolaan surat menyurat dan arsip biro;
c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP,LKPJ dan LPPD lingkup biro;
d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, sera pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan biro;
f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan,

pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

g. pelaksanaan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
k. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN;
m. pelaporan pelaksanaan kegiatan SubbagianTata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Laksana secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Tata Laksana.

2.1.4.2 BIRO UMUM

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Biro Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

Biro Umum, terdiri atas:

a. Bagian Rumah Tangga;
b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan
c. Bagian Tata Usaha.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, urusan dalam;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, urusan dalam; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

a. Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
b. Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
c. Subbagian Urusan Dalam.

Subbagian masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga Gubernur, dan rumah jabatan Gubernur serta mengurus perjalanan, transportasi, akomodasi dan barang-barang keperluan Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan kegiatan program kerja Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
b. pelaksanaan dan penyiapan bahan rencana kerja harian dan operasional Gubernur;
c. pelaksanaan dan penyiapan bahan sarana dan prasarana keperluan rumah tangga di ruang kerja dan rumah jabatan Gubernur;

d. pelaksanaan dan penyiapan bahan sarana dan prasarana serta keperluan rumah tangga di ruang kerja dan rumah jabatan Gubernur;
e. pelaksanaan dalam proses pengurusan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban ruang kerja dan rumah jabatan Gubernur;
f. proses pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan semua investaris yang ada di rumah jabatan Gubernur;
g. penyiapan administrasi kegiatan pada rumah jabatan Gubernur;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengumpulan bahan kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi dalam rangka penyelenggaraan rapat, pertemuan dan kegiatan Gubernur;
i. pelaksanaan pemeliharaan rumah jabatan Gubernur;
j. pengelola tata persuratan dan naskah dinas;
k. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subsubstansi Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan rumah jabatan Wakil Gubernur serta mengurus perjalanan, transportasi, akomodasi dan barang- barang keperluan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
b. penyiapan rencana kerja harian dan operasional Wakil Gubernur;
c. penyiapan keperluan rumah tangga sarana dan prasarana di ruang kerja dan rumah jabatan Wakil Gubernur;

d. penyiapan sarana dan prasarana serta keperluan rumah tangga di ruang kerja dan rumah jabatan Wakil Gubernur;
e. pelaksanaan pengurusan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban ruang kerja dan rumah jabatan Wakil Gubernur;
f. pelaksanaan proses pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan semua investaris yang ada di rumah jabatan Wakil Gubernur;
g. pelaksanaan dan penyiapan bahan administrasi kegiatan pada rumah jabatan Wakil Gubernur;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengumpulan bahan kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi dalam rangka penyelenggaraan rapat, pertemuan dan kegiatan Wakil Gubernur;
i. pelaksanaan pemeliharaan rumah jabatan Wakil Gubernur;
j. pelaksanaan pengelolaan tata persuratan dan naskah dinas;
k. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
m. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernurbaik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rumah Tangga secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Rumah Tangga.

Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas menyusun rencana kerja harian, operasional, keperluan rumah tangga, sarana dan prasarana pimpinan lingkup Sekretariat Daerah rencana kebutuhan barang, melaksanakan pengadaan barang, melakukan pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Urusan Dalam menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Urusan Dalam;

b. pelaksanaan dan penyiapan bahan rencana kerja harian dan operasional Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Gubernur;
c. pelaksanaan dan penyiapan bahan keperluan rumah tangga di ruang kerja dan rumah jabatan Sekretaris Daerah;
d. pelaksanaan dan penyiapan bahan keperluan sarana dan prasarana kerja Asisten dan Staf Ahli Gubernur dan Unit Kerja Nonperangkat Daerah;
e. pelaksanaan dan penyiapan bahan penerimaan tamu Sekretaris Daerah dan Istri/Suami Sekretaris Daerah;
f. pelaksanaan proses pengurusan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban ruang kerja dan rumah jabatan Sekretaris Daerah dan kantor Unit Kerja Nonperangkat Daerah;
g. pelaksanaan proses pencatatan, pemeliharaan dan mengelola semua investaris yang ada di rumah jabatan Sekretaris Daerah;
h. pelaksanaan dan penyiapan bahan ruang rapat, tempat kegiatan, konsumsi rapat, konsumsi kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
i. pelaksanaan dan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengumpulan bahan kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi dalam rangka penyelenggaraan rapat, pertemuan dan kegiatan pada Sekretariat Daerah;
j. pelaksanaan dan penyiapan bahan pemeliharaan rumah jabatan Sekretaris Daerah;
k. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Urusan Dalam secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Urusan Dalam;
m. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Urusan Dalam baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rumah Tangga secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Rumah Tangga.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
b. bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah; dan
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
b. Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
c. Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembayaran gaji, upah dan tunjangan para pegawai, melaksanakan keperbendaharaan, pengujian kebenaran penagihan dan pembayaran, serta penyiapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah;
c. penyiapan bahan surat perintah membayar (SPM) UP, GU, TU, LS, sebelum diproses untuk penertiban surat perintah pencairan dana (SP2D) di BKAD Provinsi;
d. pelaksanaan penelitian/pemeriksaan realisasi APBD lingkup Sekretariat Daerah;
e. pelaksanaan bahan perhitungan APBD lingkup Sekretariat Daerah;
f. pelasanaan proses verifikasi pertanggungjawaban (SPJ) lingkup Sekretariat Daerah;
g. pelaksanaan penghimpunan dan mengonsolidasikan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah;
h. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. pelaksanaan dan penyiapan bahan menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) lingkup Sekretariat Daerah provinsi;
k. penyiapan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan, Staf Ahli dan pegawai lingkup Sekretariat Daerah setiap bulannya;
l. penyiapan dokumen penunjang untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) lingkup Sekretariat Daerah setiap bulannya;
m. pelaksanaan penyusunan bahan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya;
n. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;

q. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Keuangan dan Aset.

Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas mengidentifikasi dan menganalisis berkenaan dengan verifikasi laporan pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan keuangan (uang persediaan/ganti uang/tambahan uang) dan pelaksanaan penatausahaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan verifikasi laporan pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
c. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban uang persediaan/ganti uang/tambahan uang di lingkungan Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
e. pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan penatausahaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah;
f. pelaksanaan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;

g. pelaksanaan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
h. penghimpunan dan pengonsolidasian laporan keuangan dan aset Biro lingkup Sekretariat Daerah menjadi Laporan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah;
i. pengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan penatausahaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah;
j. pengumpulan/rekapitulasi data realisasi anggaran Sekretariat Daerah;
k. penyusunan laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Sekretariat Daerah;
l. penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah;
m. pelaksanaan dan penyiapan bahan Laporan Operasional (LO) Sekretariat Daerah;
n. pelaksanaan dan penyiapan bahan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Sekretariat Daerah;
o. pelaksanaan dan penyiapan bahan neraca keuangan Sekretariat Daerah;
p. pelaksanaan dan penyiapan bahan pembuatan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan APBD lingkup sekretariat;
q. pelaksanaan dan penyiapan bahan dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BKAD;
r. pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan lingkup Sekretariat Daerah;
s. pelaksanaan dan penyiapan bahan penghimpunan dan mengonsolidasi laporan keuangan Sekretariat Daerah menjadi laporan keuangan Sekretariat Daerah;
t. pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE), neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) lingkup Sekretariat Daerah;

u. pelaksanaan dan penyiapan bahan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat Daerah;
v. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
x. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah.

(Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, koordinasi dengan instansi terkait, memfasilitasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta perencanaan pengadaan aset lingkup Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan aset Sekretariat Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan aset Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
f. pelaksanaan dan penyiapan bahan fasilitasi dan pembinaan di bidang penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
g. pelaksanaan dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
h. pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan dan pengadaan aset lingkup Sekretariat Daerah;
i. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerahsecara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan, persuratan dan arsip.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
b. Subbagian Pengelolaan Kendaraan.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas pelayananadministrasi kepegawaian keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan, pelayanan administrasi umum persuratan dan kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga,administrasi perjalanan dinas pimpinan dan staf ahli.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian Biro Umum;
c. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
d. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset Biro Umum, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
e. pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
g. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Pegawai ASN Biro;
h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP,LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;

i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
k. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
l. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN Biro;
m. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
o. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.

Subbagian Pengelolaan Kendaraan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pelayanan dan pengaturan penggunaan kendaraan dinas, koordinasi dan penjadwalan pelaksanaan tugas personal/pengemudi, pengawasan penggunaan, penyelesaian kelengkapan, pengaturan bahan bakar minyak, pemeliharaan dan perawatankendaraan dinas serta penetapan surat pemegang kendaraan dinas di lingkup Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas,Subbagian Pengelolaan Kendaraan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Pengelolaan Kendaraan;
b. penyiapan bahan pelayanan dan mengatur penggunaan kendaraan dinas;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penjadwalan pelaksanaan tugas personal/pengemudi;

d. penyiapan bahan pengawasan penggunaan kendaraan dinas operasional maupun pelayanan pegawai;
e. penyiapan bahan penyelesaian surat-surat kelengkapan kendaraan dinas yang meliputi STNK, BPKB, dan KIR kendaraan dinas Sekretariat Daerah;
f. penyiapan bahan pengaturan penggunaan bahan bakar minyak;
g. penyiapan bahan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas yang dikelola oleh Sekretariat Daerah;
h. penyiapan bahan penetapan Surat Penetapan Pemegang Kendaraan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah;
i. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Pengelolaan Kendaraan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Pengelolaan Kendaraan;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Pengelolaan Kendaraan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.

2.1.4.3 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;

b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan, terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
b. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; dan
c. Bagian Protokol.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, dan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, tata usaha;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, tata usaha; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah membawahi Subbagian Tata Usaha. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan bagian tata usaha. Uraian tugas sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
b. pengelolaan surat menyurat dan arsip Biro;

c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP,LKPJ dan LPPD lingkup Biro;
d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, sera pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Biro;
f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
g. pelaksanaan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
k. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
l. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN;
m. pelaporan pelaksanaan kegiatan SubbagianTata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan. Dalam

melaksanakan tugas Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:

a. Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
b. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
c. Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat, kebijakan dan monitoring, evaluasi serta penyusunan dokumentasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. penyiapan dan menggandakan bahan materi rapat;
c. penyiapan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
d. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.

Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah, memfasilitasi komunikasi antara pimpinan dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau arahan pimpinan, menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur serta menyusun naskah sambutan dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam menyelenggarakan tugas Subbagian Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Komunikasi Pimpinan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
c. pelaksanaan proses dalam memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
d. pelaksanaan proses dalam memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan;
e. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur;
f. pelaksanaan dan penyusunan naskah sambutan dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur;
g. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Komunikasi Pimpinan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Komunikasi Pimpinan;

i. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Komunikasi Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.

Subbagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas mendokumentasikan kegiatan, menyusun notulensi rapat, memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam menyelenggarakan tugas Subbagian Dokumentasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
b. pendokumentasian kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
c. penyusunan notulensi rapat Gubernur dan Wakil Gubernur;
d. pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
e. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Dokumentasi Pimpinan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
g. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Dokumentasi Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu dan hubungan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Protokol, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol terdiri atas:

a. Subbagian Acara;
b. Subbagian Tamu; dan
c. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

Subbagian Acara mempunyai tugas penatalaksanaan dan pengolahan materi acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau pihak penyelenggara lainnya yang dihadiri oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Acara, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Acara;
b. penyiapan bahan keperluan yang berkaitan dengan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara, mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat dinas serta resepsi pimpinan;
c. penyiapan bahan koordinasi persiapan dan gladi lapangan dalam acara kenegaraan/acara resmi;
d. penyiapan bahan laporan pimpinan serta buku panduan acara upacara baik secara kenegaraan maupun resmi;
e. penyiapan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi dan acara kenegaraan;
f. penyiapan koordinasi para ajudan pimpinan pemerintah provinsi;
g. pelaksanaan dokumentasi acara kegiatan pimpinan pemerintah provinsi;
h. penyiapan tanda kenang-kenangan (souvenir);
i. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pengaturan acara;
j. penyusunan bahan kebijakan umum Pengaturan Acara, Tata Upacara/Tata Tempat;

k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Pengaturan Acara, Tata Upacara/Tata Tempat;
l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengaturan Acara, Tata Upacara/Tata Tempat;
m. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Acara secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Acara;
o. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Acara baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Protokol.

Subbagian Tamu mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan kebijakan umum, koordinasi dan fasilitasi, penataan dan evaluasi, serta koordinasi persiapan akomodasi dan transportasi, rencana agenda kunjungan dan pelaporan kegiatan tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Tamu, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Tamu;
b. pelaksanaan pengelolaan kebijakan umum pelayanan tamu;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan tamu;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan tamu;
e. penyiapan bahan koordinasi persiapan penerimaan, akomodasi dan transportasi kunjungan bagi tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya;
f. penyiapan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan perjalanan dinas pimpinan;
g. penyiapan bahan pelaporan kegiatan tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya;
h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Tamu secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Tamu;

j. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Tamu baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokolsecara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Protokol.

Subbagian Hubungan Keprotokolan mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang memerlukan kegiatan keprotokolan, menyusun bahan kebijakan umum hubungan keprotokolan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Hubungan Keprotokolan, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Hubungan Keprotokolan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang memerlukan kegiatan keprotokolan;
c. penyusunan bahan kebijakan umum hubungan keprotokolan;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan keprotokolan;
e. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Subbagian Hubungan Keprotokolan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Subbagian Hubungan Keprotokolan;
g. pelaporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Subbagian Hubungan Keprotokolan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Protokol.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah berikut:

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

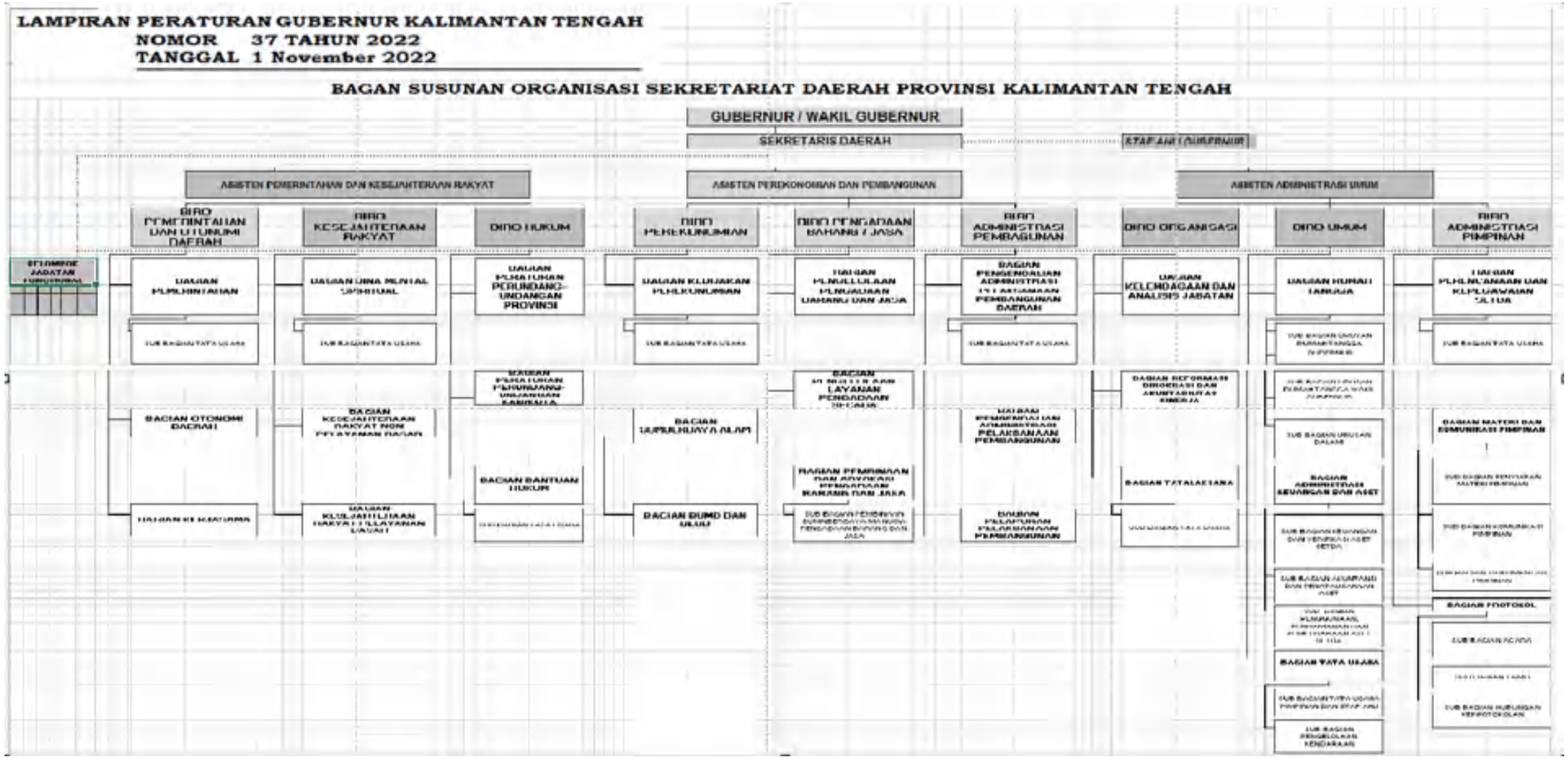

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen terpenting dalam organisasi pemerintahan, termasuk di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Peran SDM sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam era reformasi birokrasi dan digitalisasi, tuntutan terhadap profesionalisme, integritas, dan kompetensi SDM semakin tinggi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menurut data kepegawaian Setda Biro Administrasi Pimpinan Bulan Juli 2025 didukung oleh **478** personil terdiri dari **340** orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan **138** orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) komposisi ini tersebar di berbagai biro dan unit kerja. Adapun sumber daya manusia tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tingkat golongan, eselon, pendidikan, dan lain-lain. Komposisi pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jumlah Pegawai dan Jenis Kelamin

No	Biro	PNS		PPPK	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1		0	0	1	1
2	Asisten	2		0	1	1	2
3	Staff Ahli	3		0	0	3	3
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	25		21	24	22	46
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	26		10	19	17	36
6	Biro Hukum	32		14	20	26	46
7	Biro Perekonomian	32		6	21	17	38
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	40		5	10	35	45
9	Biro Administrasi Pembangunan	34		4	18	20	38
10	Biro Organisasi	23		9	15	17	32
11	Biro Umum	72		60	53	79	132
12	Biro Administrasi Pimpinan	50		9	23	36	59
	JUMLAH						**478**

Sumber Data : Kepegawaian Setda Biro Administrasi Pimpinan

GRAFIK 2.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

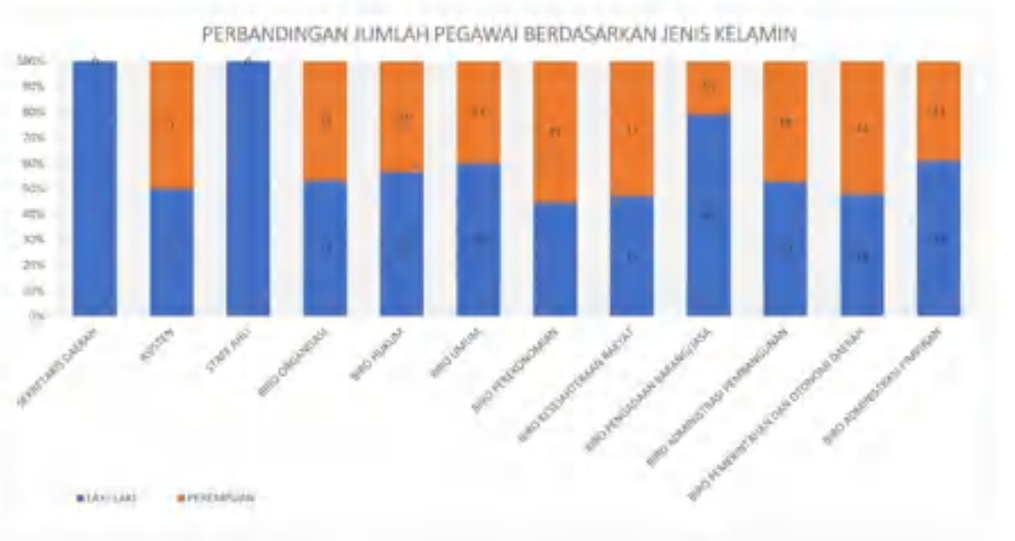

GRAFIK 2.2 Perbandingan Jumlah Pegawai PNS dan PPPK



Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Pendidikan

No	Biro	S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Asisten	-	2	-	-	-	-	-	2
3	Staff Ahli	-	2	1	-	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	8	30	-	-	-	-	38
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	4	20	-	-	-	-	42
6	Biro Hukum	1	9	34	-	1	1	-	46
7	Biro Perekonomian	-	6	21	-	-	-	-	27
8	Biro Pengadaan	-	11	32	1	1	-	-	45

	Barang dan Jasa								
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	8	25	-	-	-	-	33
10	Biro Organisasi	-	4	25	-	2	-	-	31
11	Biro Umum	-	3	82	3	40	3	1	132
12	Biro Administrasi Pimpinan	-	7	41	4	7	-	-	59
JUMLAH									**459**
Sumber Data : Kepegawaian Setda Biro Administrasi Pimpinan									

Grafik 2.3 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

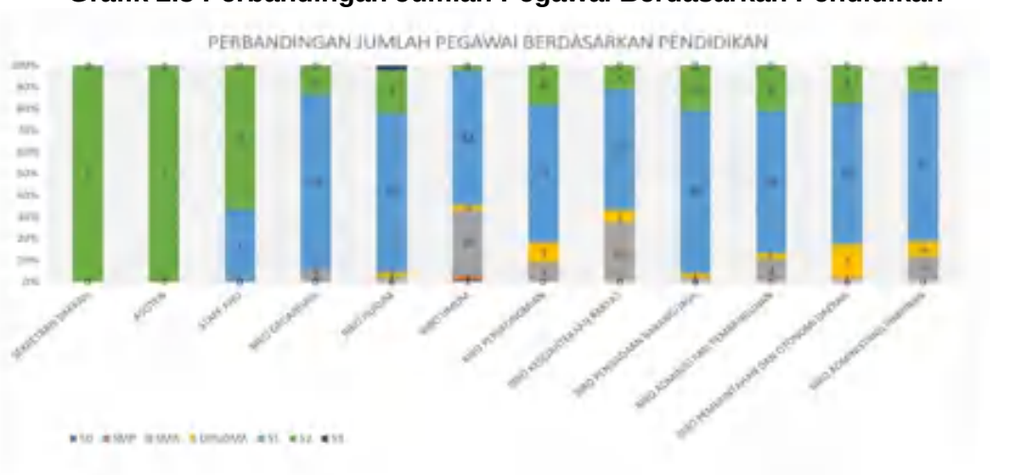

Tabel 2.4 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan

No	Biro	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Asisten	2	-	-	-	2
3	Staff Ahli	3	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4	17	4	-	46
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	21	3	-	36
6	Biro Hukum	9	25	-	-	34
7	Biro Perekonomian	7	23	2	-	32
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5	40	-	-	45
9	Biro Administrasi Pembangunan	6	26	-	-	32
10	Biro Organisasi	4	18	-	-	22
11	Biro Umum	1	39	29	3	72
12	Biro Administrasi Pimpinan	2	42	6	-	50
JUMLAH						**375**
Sumber Data : Kepegawaian Setda Biro Administrasi Pimpinan						

Grafik 2.4 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

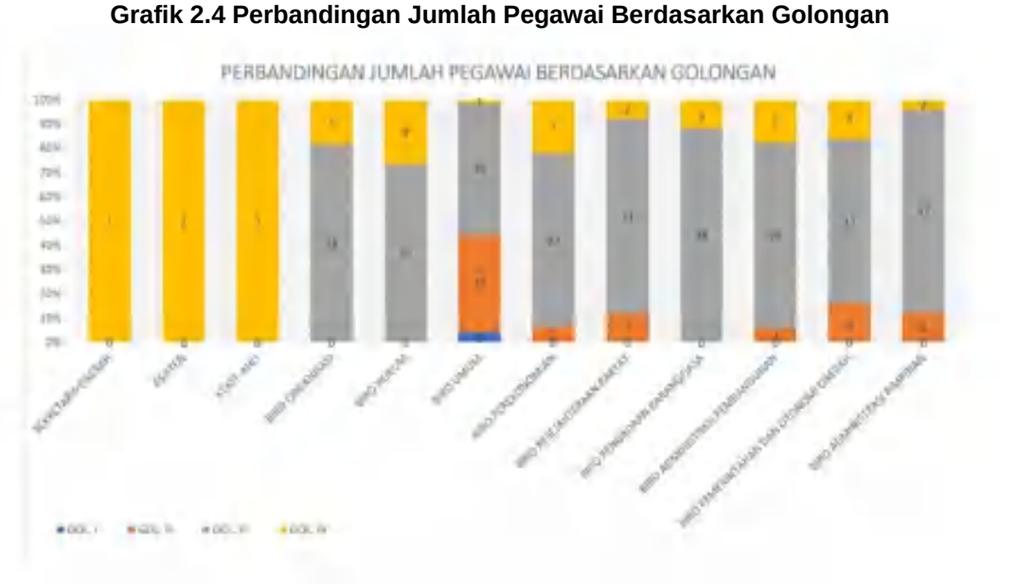

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana adalah komponen penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas, baik dalam konteks pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat umum. Sarana merujuk pada alat atau fasilitas langsung yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas, sedangkan prasarana mengacu pada infrastruktur dasar yang mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut. Berikut adalah alasan mengapa sarana dan prasarana memiliki peran penting.

Berdasarkan laporan neraca aset yang dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Umum, tercatat sejumlah asset Sekretariat Daerah dengan nilai total keseluruhan mencapai sekitar **Rp. 479.104.578.193,74** *(Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah)* Aset tersebut terbagi dalam enam kategori utama, yaitu tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan/irigasi/jaringan, aset tetap lainnya dengan jumlah total Rp. 439.229.265.686,99 *(Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)* Konstruksi dalam Pengerjaan serta Aset lainnya Rp. 38.903.754.006,75 *(Tiga Puluh Delapan Juta*

Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan Ekstracomptable Rp. 971.558.500 *(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)*

1. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Sekretariat Daerah mengelola Jalan Irigasi Jaringan dengan nilai mencapai Rp. 12.467.372.008 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujua Puluh Dua Ribu Delapan Rupiah)* Jalan, Irigasi dan Jaringan Ini diperuntukkan bagi sarana pemerintahan, termasuk kantor dan fasilitas penunjang.

GRAFIK 2.5 TOTAL NILAI ASET JALAN IRIGASI JARINGAN



Sumber data : Bidang Aset Biro Umum

2. Peralatan & Mesin

Jumlah peralatan dan mesin yang tercatat sebanyak 15.318 unit yang tersebar di 9 (Sembilan) Biro dengan nilai sekitar Rp. 185.167.779.230,27 *(Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Koma Dua Puluh Tujuh Rupiah)* Kategori ini meliputi kendaraan dinas, perangkat Komputer, Laptop, Printer, serta peralatan operasional kantor lainnya.

GRAFIK 2.6 TOTAL NILAI ASET TETAP PERALATAN MESIN



Sumber data : Bidang Aset Biro Umum

3. Gedung & Bangunan

Sekretariat Daerah memiliki beberapa unit gedung dengan nilai sebesar Rp 1.964.857.293.748 (*Satu Triliyun Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) yang difungsikan sebagai kantor dan fasilitas layanan. Keberadaan gedung ini menjadi aset vital dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

GRAFIK 2.7 TOTAL NILAI ASET GEDUNG BANGUNAN



Sumber Data : Bidang Aset Biro Umum

4. Nilai Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya yang terdiri dari bahan-bahan perpustakaan, tanaman hias dan barang kerajinan lainnya mencapai Rp. 1.748.872.*900 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).*

GRAFIK 2.8 TOTAL NILAI ASET TETAP LAINNYA

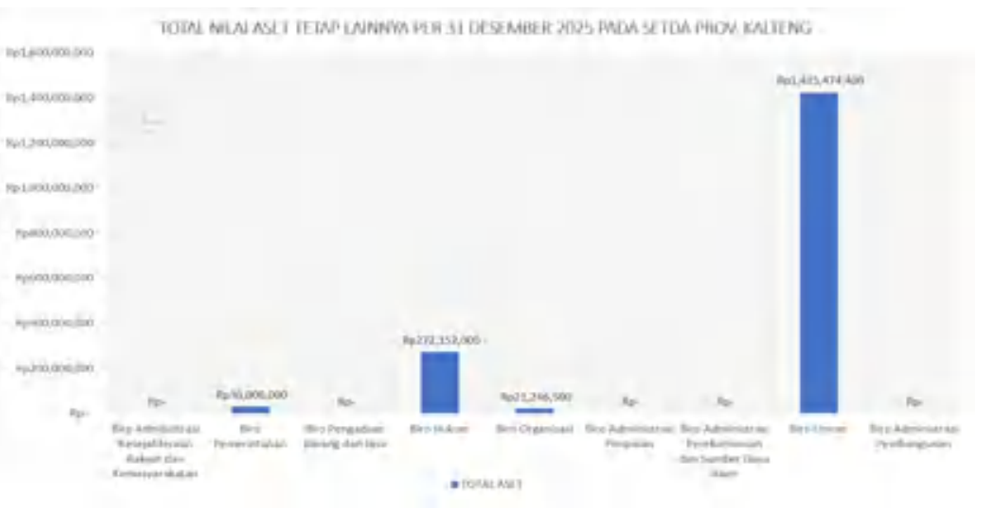

Sumber Data : Bidang Aset Biro Umum

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, yang diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, ketepatan, kualitas, dan kepuasan pengguna layanan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu terus dikembangkan agar menjadi anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Pemerintah yang berorientasi pada *output* langsung dari program-program atau kegiatan

yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah fungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah sebagai kinerja, bukan kemampuan penyerapan anggaran, namun demikian anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja. Sedangkan akuntabilitas kinerja diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dalam mewujudkan kepemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku pengemban amanah masyarakat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir yang dikeluarkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk sebagai evaluator internal, predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah “B” (63,35 kategori baik). Sebagaimana telah disampaikan bahwa proses bisnis Sekretariat Daerah adalah pada perumusan kebijakan umum daerah Provinsi. Peran ini pada Rencana Strategis Periode 2019-2024 memberikan kontribusi optimal pada peningkatan tata kelola pemerintahan. Kontribusi peran ini tergambarkan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah melalui pencapaian Nilai SAKIP terealisasi predikat B. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dicermati pada Diagram berikut:

Gambar 2.1 Diagram Capaian Kinerja Sekretariat Daerah T.A. 2024



Salah satu indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional adalah Nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan target Program Prioritas Reformasi Kelembagaan Birokrasi dalam RPJMN 2020-2024. Dimana hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,30 dengan predikat “B” telah memenuhi indikator RPJMN 2020-2024, yaitu Instansi Pemerintah dengan skor SAKIP B ke atas.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021-2025), Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tengah menunjukkan tren kinerja yang cukup baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

Pada tahun 2021, rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar 96% , meningkat signifikan menjadi 112 % pada tahun 2022, dan tetap tinggi dengan capaian kurang lebih 100% pada tahun 2024, meskipun terdapat beberapa data yang belum dirilis. Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 9 (Sembilan) biro akan dijelaskan dan disajikan pada tabel dibawah berikut:

Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH																
1	Terfasilitasi Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan biro dan kapasitas Pegawai				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Pegawai yang mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Pendukung Tusi				10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan				10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Layanan yang dilakukan / Jumlah Layanan Perkantoran				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Jenis Cetakan Barang				2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Jenis makan dan minum rapat Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan koordinasi ke dalam daerah				3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya data dan informasi biro pemerintahan dan otonomi daerah				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Layanan yang dilakukan / Jumlah Layanan Perkantoran				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah dokumen yang terkirim				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
13	Terbayarnya tagihan komunikasi internet dan aplikasi video conference Tersedianya layanan internet dan layanan aplikasi video conference				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
14	Tersedianya biaya administrasi pengelolaan keuangan				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah Layanan yang dilakukan / Jumlah Layanan Perkantoran				10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah kendaraan yang dirawat/diperbaiki dan bensin				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah peralatan kerja yang diservis				9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	100%	100%	100%
18	Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintahan, Fasilitasi Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama				9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama				9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah fasilitasi pengelolaan Kebijakan Pemerintah di bidang pemerintahan, otda dan kerjasama				1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
22	Jumlah Kab/kota yang mendapat pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan/Desa, jumlah dokumen pembentukan kawasan khusus bencana kebakaran serta pengguang ketentraman dan ketertiban				14 Kab/Kota 1 Dokumen	14 Kab/Kota 1 Dokumen	14 Kab/Kota 1 Dokumen	14 Kab/Kota 1 Dokumen	14 Kab/Kota 1 Dokumen	14 Kab/Kota 1 Dokumen	14 Kab/Kota 1 Dokumen	14 Kab/Kota 1 Dokumen	100%	100%	100%	100%

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
23	Jumlah terfasilitasinya Segmen Batas antar Kab/Kota dan antar Provinsi jumlah terfasilitasinya pemasangan pilar pada segmen batas antar Kab/Kota dan antar Provinsi, jumlah terfasilitasinya dokumen rupa bumi				1 Dokumen 4 Segmen	1 Dokumen 4 Segmen	1 Dokumen 4 Segmen	1 Dokumen 4 Segmen	1 Dokumen 4 Segmen	1 Dokumen 4 Segmen	1 Dokumen 4 Segmen	1 Dokumen 4 Segmen	100%	100%	100%	100%
24	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Otonomi Daerah				3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
25	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah, Jumlah Fasilitasi Administrasi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan PILKADA				10 Dokumen	9 Dokumen 1 Laporan	26 Dokumen 1 Laporan	467 Dokumen 1 laporan	10 Dokumen	9 Dokumen 1 Laporan	26 Dokumen 1 Laporan	467 Dokumen 1 Laporan	100%	100%	100%	100%
26	Jumlah dokumen pengembangan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, Penyelenggaraan Hari Jadi OTDA/Provinsi/Kemerdekaan RI Jumlah kegiatan Pembinaan Pengembangan Otonomi Daerah				1 Dokumen 4 Kegiatan	1 Dokumen 4 Kegiatan	1 Dokumen 4 Kegiatan	1 Dokumen 4 Kegiatan	1 Dokumen 4 Kegiatan	1 Dokumen 4 Kegiatan	1 Dokumen 4 Kegiatan	1 Dokumen 4 Kegiatan	100%	100%	100%	100%
27	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Supervisi Pendampingan Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi yang disusun dan Dokumen Penerapan SPM Kabupaten/Kota yang terfasilitasi Penyusunannya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama				3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
29	Jumlah fasilitasi kerjasama Pemerintah				2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah fasilitasi Kerja sama Badan Usaha/Swasta				2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
31	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%
2. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																
32	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tahun)				5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	100%	100%
33	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Biro Kesra				5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	100%	100%
34	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Kesra				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%
35	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro Kesra				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%
36	Terwujudnya Administrasi Umum Biro Kesra				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
37	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
38	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				300 unit	300 unit	300 unit	350 unit	300 Unit	300 Unit	300 Unit	350 Unit	100%	100%	100%	100%
39	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kinerja Pelayanan Dasar				3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%	100%
40	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kinerja Non Pelayanan Dasar				3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%
3. BIRO HUKUM																
41	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tahun)				17 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	17 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	100%	100%	100%
42	Jumlah Dokumen Perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah (Dokumen)				14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	100%	100%	100%
43	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
44	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)				0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
45	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)				0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
46	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD (Dokumen)				0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
47	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	100%	100%	100%
48	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				21 Orang	21 Orang	21 Orang	5 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	5 Orang	100%	100%	100%	100%
49	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Laporan	40 Laporan	51 Laporan	40 Laporan	100%	100%	100%	100%
50	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)				2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%
51	Terlaksananya pengiriman surat/paket yang diklirkan (Surat/Paket)				14 Surat/Paket	20 Surat/Paket	30 Surat/Paket	30 Surat/Paket	14 Surat/Paket	20 Surat/Paket	14 Surat/Paket	14 Surat/Paket	100%	100%	46,67%	46,67%
52	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)				25 Orang	25 Orang	25 Orang	18 Orang	20 Orang	5 Orang	7 Orang	18 Laporan	80%	20%	28%	100%
53	Terlaksanenya pelayanan perbaikan peralatan kerja (Unit)				8 Peralatan Kerja	10 Peralatan Kerja	22 Peralatan Kerja	18 Peralatan Kerja	8 Peralatan Kerja	10 Peralatan Kerja	11 Peralatan Kerja	15 Peralatan Kerja	100%	100%	50%	100%
54	Terwujudnya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah dan meningkatkan penataan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum (Tahun)				1709 Dokumen	1709 Dokumen	2671 Dokumen	933 Dokumen	1707 Dokumen	1618 Dokumen	1803 Dokumen	688 Dokumen	99,88%	94,68%	67,06%	73,74%
55	Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, Terwujudnya program pembentukan produk hukum bersifat pengaturan (Dokumen)				10 Dokumen Ranperda , 50 Dokumen RanperGUB	10 Dokumen Ranperda , 50 Dokumen RanperGUB	10 Dokumen Ranperda , 50 Dokumen RanperGUB	10 Dokumen Ranperda , 50 Dokumen RanperGUB	10 Dokumen Ranperda, 50 Dokumen RanperGub	20 Dokumen Ranperda, 48 Dokumen RanperGub	9 Dokumen Ranperda, 53 Dokumen RanperGub	13 Dokumen Ranperda, 50 Dokumen RanperGub	84%	78,47%	82,53%	100%
56	Terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan (Dokumen)				750 Dokumen RanperGub	750 Dokumen RanperGub	750 Dokumen RanperGub	500 Dokumen RanperGub	630 Dokumen Ranpergub	586 Dokumen Ranpergub	619 Dokumen Ranpergub	0 Dokumen Ranpergub	84%	78,47%	82,53%	0%
57	Terwujudnya penataan dan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum (Dokumen)				601 Katalog dan Buku	601 Katalog dan Buku	601 Dokumen	1 Dokumen	0 Katalog dan Buku	240 Katalog dan Buku	1 Dokumen	1 Dokumen	39,93%	39,93%	0,17%	100%
58	Terwujudnya Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota yang di Fasilitasi dan Evaluasi. (Dokumen)				14 Dokumen Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Evaluasi, 260 Dokumen Pengawasan Refreshit, 24 Dokumen Penataan dan Pengajian	14 Dokumen Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Evaluasi, 260 Dokumen Pengawasan Refreshit, 24 Dokumen Penataan dan Pengajian	98 Dokumen Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Evaluasi, 300 Dokumen Pengawasan Refreshit, 270 Dokumen Penataan dan Pengajian	38 Dokumen Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Evaluasi, 42 Dokumen Pengawasan Refreshit, 300 Dokumen Penataan dan Pengajian	27 Dokumen Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Evaluasi, 285 Dokumen Pengawasan Refreshit, 705 Dokumen Penataan dan Pengajian	59 Dokumen Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Evaluasi, 352 Dokumen Pengawasan Refreshit, 393 Dokumen Penataan dan Pengajian	51 Dokumen Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Evaluasi, 538 Dokumen Pengawasan Refreshit, 536Dokumen Penataan dan Pengajian	39 Dokumen Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Evaluasi, 40 Dokumen Pengawasan Refreshit, 545 Dokumen Penataan dan Pengajian	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
59	Tersedianya Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Prov. Kalteng (Dokumen/Perkara)				10 Perkara, 13 Dokumen	10 Perkara, 13 Dokumen	10 Perkara, 13 Dokumen	5 Perkara, 25 Dokumen	3 Perkara, 13 Dokumen	11 Perkara, 13 Dokumen	15 Perkara, 15 Dokumen	6 Perkara, 30 Dokumen	100%	100%	100%	100%
60	Tersedianya Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi Perangkat Daerah dan Aparatur (Kasus/Dokumen)				10 Kasus, 5 Dokumen Pelanggaran HAM	10 Kasus, 5 Dokumen Pelanggaran HAM	10 Kasus, 5 Dokumen Pelanggaran HAM	3 Kasus, 3 Dokumen Pelanggaran HAM	11 Kasus, 3 Dokumen Pelanggaran HAM	10 Kasus, 3 Dokumen Pelanggaran HAM	12 Kasus, 3 Dokumen Pelanggaran HAM	14 Kasus, 3 Dokumen Pelanggaran HAM	60%	60%	60%	60%
4. BIRO PEREKONOMIAN																
61	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				5 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	70,59%	70,59%	70,59%
62	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	100%	100%
63	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%
64	Jumlah ASN Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis				38 ASN	38 ASN	38 ASN	38 ASN	0 ASN	21 ASN	0 ASN	24 ASN	55,26%	55,26%	0%	63,16%
65	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	100%	100%	100%
66	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%
67	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	15 Unit	30 Unit	50 Unit	70 Unit	42,86%	42,86%	71,43%	100%
68	Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	100%	100%	100%
69	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SDA yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%
5. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA																
71	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tahun)				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
72	Tersedianya bahan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
73	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
74	pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
75	Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan administrasi barang				2 Unit (1 Tahun)	2 Unit (1 Tahun)	2 Unit (1 Tahun)	2 Unit (1 Tahun)	2 Unit (1 Tahun)	2 Unit (1 Tahun)	2 Unit (1 Tahun)	2 Unit (1 Tahun)	100%	100%	100%	100%
76	pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal				4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%
77	Persentase Pelayanan Pengadaan yang tepat waktu sesuai SOP				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan barang/jasa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	Persentase Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) di kalteng yang memenuhi level kemandirian				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
6. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																
80	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	9 Dokumen	100%	100%	100%	100%
81	Jumlah Laporan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%
82	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5 Paket	100%	100%	100%	100%
83	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Administrasi Keuangan				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2 Laporan	100%	100%	100%	100%
84	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100%	100%	100%	100%
85	Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	100%	100%	100%	100%
86	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	100%	100%
7. BIRO ORGANISASI																
87	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Tahun)				15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	100%	100%	100%
88	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi (Tahun)				10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	100%	100%	100%
89	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (Tahun)				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
90	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Tahun)				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
91	Tersedianya Materi dan Komunikasi Pimpinan (Tahun)				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
92	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
93	Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan (Tahun)				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
94	Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja (Tahun)				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%
8. BIRO UMUM																
95	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik				80%	80%	83%	86%	80%	80%	83%	86%	100%	100%	100%	100%
96	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana				2%	2%	2,10%	2,20%	2%	2%	2,10%	2,20%	100%	100%	100%	100%
97	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH				146 Kali	150 Kali	150 Kali	155 Kali	146	105	311	179	100%	70%	207%	115%
98	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda				100 Kali	100 Kali	125 Kali	135 Kali	100	200	170	189	100%	200%	136%	140%
99	Jumlah naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan				198 Surat	215 Surat	230 Surat	230 Surat	198	2168	586	625	100%	1008%	255%	272%
100	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional				80 Kali	80 Kali	85 Kali	85 Kali	80	159	175	168	100%	199%	206%	198%
101	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula				150 Kali	150 Kali	165 Kali	165 Kali	150	321	257	275	100%	214%	156%	167%

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
9. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN																
102	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tahun)				3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	100%	100%	100%
103	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Tahun)				1 Dokumen	250 Dokumen	300 Dokumen	350 Dokumen	1 Dokumen	250 Dokumen	300 Dokumen	350 Dokumen	100%	100%	100%	100%
104	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Tahun)				0 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	0 Unit	22 Unit	15 Unit	13 Unit	0%	100%	75%	65%
105	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)				30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	28 Orang	24 Orang	22 Orang	0%	93,3%	80%	73,33%
106	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)				2 unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	5 Unit	50%	100%	100%	100%
107	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Tahun)				250 Dokumen 1 Tahun	250 Dokumen 1 Tahun	250 Dokumen 1 Tahun	250 Dokumen 1 Tahun	250 Dokumen 1 Tahun	250 Dokumen 1 Tahun	250 Dokumen 1 Tahun	250 Dokumen 1 Tahun	100%	100%	100%	100%
108	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan (Tahun)				250 Kegiatan	700 Kegiatan	700 Kegiatan	700 Kegiatan	1020 Kegiatan	1346 Kegiatan	1539 Kegiatan	1454 Kegiatan	100%	100%	150%	150%

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Tabel 2.6
Pencapaian Pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan Realisasi Anggaran 2021-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	TOTAL KESELURUHAN = (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)			127.376.852.275	370.590.288.889	355.789.337.499	370.484.614.553	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	74,12	85,53	73,06	135,42
•	TOTAL PAGU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				123.487.113.625	145.570.158.129	132.383.102.169	148.826.036.265	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73,63	98,96	93,63	91,18
•	TOTAL PAGU PROGRAM TEKNIS				3.891.738.650	224.020.130.740	223.466.235.330	229.664.577.299	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	108,07	82,23	61,23	162,34
I.	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	108,33	104,92	150,49	107,04
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	108,33	104,92	150,49	107,04
1.	KEGIATAN : Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				139.930.000	125.098.000	145.220.936	145.303.158	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,25	83,50	99,60	109,94
	SUB KEGIATAN : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				139.930.000	125.098.000	145.220.936	145.303.158	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,25	83,50	99,60	109,94
2.	KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				254.936.000	237.888.200	255.437.312	264.685.589	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31,06	101,94	169,08	90,39
	SUB KEGIATAN : - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				135.104.000	119.862.200	134.150.428	139.012.879	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	34,55	106,82	121,88	107,21
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				119.832.000	108.206.000	121.286.884	125.882.810	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27,14	96,44	221,27	98,86
3.	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah				391.810.000	391.379.323	438.916.844	454.824.059	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	48,54	112,80	106,73	231,02
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Pensatan dan Perlengkapan Kantor				-	92.258.590	103.411.812	107.156.666	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	173,28	135,11	497,15
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				39.830.000	43.240.733	48.468.590	50.224.727	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99,90	100,00	89,97	86,71
	- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan				396.080.000	296.080.000	287.037.182	297.443.886	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40,41	85,18	93,34	90,78
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-
4.	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				812.000.000	880.814.475	1.099.283.876	1.138.229.839	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,18	82,77	96,76	89,36
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000	30.000.000	33.828.851	34.845.427	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				882.000.000	880.814.475	1.065.767.218	1.104.384.551	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	79,80	84,75	93,81	92,18
5.	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.980.000	38.990.000	43.703.451	45.207.440	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91,98	194,18	95,85	176,51
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				77.980.000	38.990.000	43.703.451	45.207.440	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91,98	194,18	95,85	176,51

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
	6.	KEGIATAN : Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				785.744.000	806.824.781	948.394.177	988.884.200	1.724.175.415	764.399.638	5.114.999.884	5.198.799.884	219,43	194,97	196,27	262,11
		SUB KEGIATAN : - Penyiapan Materi Pimpinan				231.820.000	143.420.000	180.157.859	188.584.372	53.000.000	180.000.000	400.384.400	434.428.128	24,00	133,14	248,87	182,79
		- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				517.521.000	514.151.381	575.163.001	588.763.428	842.688.012	477.488.888	676.673.184	500.742.184	108,60	141,59	176,83	205,97
		- Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				37.103.400	39.753.400	52.173.317	52.359.408	1.115.682.500	32.000.000	40.241.400	24.915.200	2.980,56	157,64	125,06	263,60
	7.	KEGIATAN : Fasilitasi Keprotokolan				1.025.614.000	1.060.963.221	1.189.221.791	1.232.323.847	1.144.432.648	1.321.999.648	2.409.999.233	3.460.264.184	111,15	124,59	198,45	282,42
		SUB KEGIATAN : - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				184.800.000	378.800.800	422.851.784	437.855.494	203.158.000	447.511.888	874.758.815	1.115.536.672	96,54	118,65	230,65	254,43
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				158.500.000	308.841.000	346.176.392	356.723.219	144.400.000	348.072.817	392.834.248	858.882.027	91,42	99,75	113,25	239,52
		- Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				718.814.000	375.321.421	420.693.545	435.941.174	893.273.648	566.139.907	949.798.270	1.611.187.485	118,87	150,83	239,22	348,69
JUMLAH						3.591.815.040	3.232.354.005	3.734.876.257	3.870.348.961	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	109,33	104,52	156,49	187,94
II.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				JUMLAH	-	212.230.899.000	213.475.865.108	217.942.223.212		172.470.594.649	123.833.741.248	255.137.901.542	0,00	81,23	62,32	108,16
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					-	2.217.160.000	2.262.965.136	2.301.526.212	-	2.016.376.535	3.363.965.000	4.365.000.000	0,00	91,00	148,75	189,71
	1.	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	450.000.000	458.100.000	462.363.614	-	440.585.600	415.000.000	560.000.000	0,00	97,87	103,46	121,19
	2.	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	350.000.000	357.100.000	364.282.811	-	337.514.000	80.000.000	80.000.000	0,00	107,91	21,00	16,55
	3.	KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	50.000.000	51.015.000	52.040.402	-	48.257.940	50.000.000	50.000.000	0,00	188,72	98,01	96,08
	4.	KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	150.000.000	153.045.000	156.121.205	-	80.152.600	125.000.000	170.000.000	0	40,24	81,68	108,90
	5.	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	341.160.000	348.094.319	351.042.815	-	274.027.000	1.400.000.000	2.400.000.000	0	113,68	772,06	650,62
	6.	KEGIATAN : Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	876.982.000	895.670.819	1.015.672.365	-	880.197.348	748.965.000	1.034.000.000	0,00	57,50	74,32	100,89
B.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					-	211.813.890.000	211.213.899.000	215.640.696.800	-	170.454.168.574	119.469.745.248	252.272.901.542	0,00	82,15	61,10	108,00
	1.	KEGIATAN : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				-	209.513.800.000	209.513.800.000	213.540.865.000	-	171.815.234.848	127.838.745.247	235.222.901.442	0,00	81,94	60,94	111,58
	2.	KEGIATAN : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				-	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000	-	560.748.600	1.600.000.000	122.850.000.000	0,00	98,96	125,00	12280,00
	3.	KEGIATAN : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				-	900.000.000	900.000.000	1.100.000.000	-	2.170.440.948	1.000.000.000	1.200.000.000	0,00	362,83	111,11	109,09
JUMLAH						-	213.230.899.000	213.475.865.108	217.942.223.212		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	82,23	62,32	108,16

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
01.	BIRO PEREKONOMIAN			JUMLAH	1.056.268.450	3.037.298.000	3.445.354.827	3.779.590.832	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	94,85	91,86	78,09	74,31
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				630.341.748	955.181.500	1.726.076.967	974.303.292	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92,26	85,05	97,03	92,06
	1. KEGIATAN : Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.162.500	94.474.500	20.000.000	20.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99,70	83,69	99,81	90,90
	SUB KEGIATAN : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				51.162.500	79.474.500	10.000.000	10.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99,70	97,15	99,85	100,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	13,53	99,78	97,79
	2. KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000	62.435.000	10.000.000	10.000.000	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	90,23	99,68	99,73
	SUB KEGIATAN : - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semestasan SKPD				2.000.000	62.435.000	10.000.000	10.000.000	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	90,23	99,68	99,73
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	54.500.000	35.000.000	16.500.000	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	83,37	71,53	86,18
	SUB KEGIATAN : - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	54.500.000	35.000.000	16.500.000	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	83,37	71,53	86,18
	4. KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah				106.964.000	115.439.000	1.131.466.437	345.047.688	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	95,31	75,23	93,65	92,91
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				97.549.000	72.075.000	79.800.000	70.047.688	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99,46	99,81	99,93	99,76
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.435.000	42.355.000	16.125.000	40.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	62,15	34,38	86,57	46,13
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	1.035.441.437	235.000.000	-	-	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	99,83	98,48
	5. KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				446.195.240	509.242.000	408.610.470	464.265.604	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91,75	53,56	91,56	93,06
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				446.195.240	509.242.000	408.610.470	464.265.604	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91,75	53,56	91,56	93,06
	6. KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000	148.800.000	120.000.000	118.500.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,58	66,29	98,05	94,68
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000	100.000.000	45.000.000	83.500.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,58	67,08	96,48	75,59
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	8.800.000	75.000.000	65.000.000	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	57,62	99,00	85,18
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				439.946.750	2.082.116.500	1.720.277.120	2.805.087.530	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	433,33	89,48	88,88	68,15
	1. KEGIATAN : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				90.992.000	818.330.250	718.027.120	962.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	97,74	89,80	95,92	97,83
	SUB KEGIATAN : - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				58.100.000	628.240.750	703.044.400	702.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	97,26	87,57	94,05	97,77
	- Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				31.882.000	192.089.500	14.982.720	200.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	98,52	98,56	87,58	98,01

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
	2. KEGIATAN : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				193.068.250	716.368.250	388.250.000	1.350.097.530								
	SUB KEGIATAN : - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				124.067.000	335.382.500	10.000.000	193.227.730								
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				34.093.000	245.582.500	368.250.000	1.010.369.800								
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				32.908.250	135.523.750	10.000.000	150.300.000								
	3. KEGIATAN : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				145.865.300	547.436.000	114.000.000	550.000.000								
	SUB KEGIATAN : - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				54.648.000	250.162.000	38.000.000	175.000.000								
	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sentara				47.427.300	147.164.250	38.000.000	190.000.000								
	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				43.894.000	150.121.750	38.000.000	185.000.000								
	JUMLAH				1.336.269.550	3.037.290.500	2.645.354.527	2.779.834.022					95,65	83,90	78,99	74,31
IV.	BIRO ORGANISASI			JUMLAH	2.341.929.950	2.409.397.750	2.457.831.321	2.751.958.170					69,80	91,64	88,88	89,93
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				1.144.372.000	1.163.031.810	1.191.857.312	1.333.572.770					68,61	97,25	94,17	98,51
	1. KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000					95,30	90,85	98,33	98,47
	SUB KEGIATAN : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000					89,22	90,96	98,33	98,47
	2. KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000					97,25	89,79	97,64	79,52
	SUB KEGIATAN : - Pendidikan dan Pengelolaan				10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000					97,25	89,79	97,64	79,52
	3. KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah				339.648.000	339.648.000	339.648.000	480.000.000					21,83	87,11	98,77	49,87
	SUB KEGIATAN : - Penyelesaian Pekerjaan dan Penerangkapan Kantor				180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000					0,00	94,74	83,53	3,91
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000					92,26	99,88	98,81	98,93
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				171.648.000	171.648.000	171.648.000	180.000.000					31,28	96,98	94,28	89,87
	4. KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				540.344.950	662.983.810	686.409.912	773.572.770					96,83	48,96	76,22	96,33
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000					97,94	96,79	98,90	48,69
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				630.344.000	652.983.810	676.409.912	753.572.770					94,79	48,16	77,90	98,79

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)
	5. KEGIATAN : Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				45.480.000	50.000.000	50.000.000	70.000.000								
	SUB KEGIATAN : - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				45.480.000	50.000.000	50.000.000	70.000.000								
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				1.217.457.000	1.241.806.140	1.266.764.003	1.419.337.483								
	1. KEGIATAN : Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				430.000.000	450.000.000	450.000.000	530.000.000								
	SUB KEGIATAN : - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000								
	- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								
	- Penataan Analisis Jabatan				150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000								
	2. KEGIATAN : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				787.457.000	791.806.140	816.764.003	889.337.483								
	SUB KEGIATAN : - Pendataan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				187.457.000	191.806.140	216.764.003	216.337.483								
	- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000								
	- Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								
	- Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								
	- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000								
	JUMLAH				2.301.829.044	2.405.267.258	2.457.821.921	2.775.965.575								
V.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			JUMLAH	-	3.230.173.000	3.321.634.339	3.388.353.240								
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				-	1.137.758.000	1.191.260.021	1.295.961.041								
	1. KEGIATAN : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	25.480.000	38.587.340	30.692.036								
	SUB KEGIATAN : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	6.304.000	6.472.480	6.643.711								
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				-	2.002.000	2.042.821	2.083.814								
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	2.268.000	2.334.424	2.381.341								
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-	2.860.000	2.916.030	2.974.577								
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-	2.148.000	2.209.839	2.274.345								
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	3.278.000	3.345.532	3.412.770								
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	7.610.000	7.784.409	7.920.458								
	2. KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	17.016.000	18.179.532	18.564.865								
	SUB KEGIATAN : - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	3.500.000	3.601.825	3.674.010								

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-	14.288.000	14.577.907	14.870.895	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	98,72	63,03	5,49
3.	**KEGIATAN :** **Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-	**399.864.000**	**407.772.288**	**415.968.732**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**0,00**	**116,58**	**101,07**	**174,11**
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor				-	140.921.000	144.760.024	148.870.027	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	77,91	98,61	217,98
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				-	40.000.000	40.811.611	41.631.844	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	82,30	79,02	95,35
	- Penyediaan bahan/material				-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	216.743.000	223.181.353	227.866.861	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	151,42	113,12	142,95
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**KEGIATAN :** **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-	**665.797.600**	**679.306.009**	**692.959.544**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**0,00**	**67,05**	**73,99**	**49,85**
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				-	177.660.000	181.264.769	184.887.835	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	91,87	96,91	96,08
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor				-	139.000.000	141.820.347	144.670.658	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	98,83	93,37	0,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	349.137.600	356.221.694	363.391.092	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	41,98	52,90	84,32
5.	**KEGIATAN :** **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-	**45.000.000**	**45.913.962**	**46.835.624**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**0,00**	**62,60**	**54,54**	**41,49**
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	20.000.000	20.405.805	20.815.932	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	82,22	94,88	66,63
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	25.000.000	25.507.257	26.019.692	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	82,90	75,55	59,94
B.	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**				-	**2.095.406.400**	**2.140.374.529**	**2.183.391.059**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**0,00**	**90,38**	**88,38**	**57,84**
1.	**KEGIATAN :** **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**				-	**1.034.097.400**	**1.054.779.348**	**1.076.078.345**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**0,00**	**101,03**	**96,47**	**72,83**
	SUB KEGIATAN :															
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				-	348.048.500	355.507.455	362.142.383	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	97,32	95,18	61,65
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				-	212.609.000	218.863.094	221.220.801	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	96,27	97,70	62,91
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				-	473.441.000	482.809.800	492.815.361	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	107,24	96,87	70,62
2.	**KEGIATAN :** **Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**				-	**1.064.309.000**	**1.085.595.180**	**1.107.413.315**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**0,00**	**79,82**	**80,51**	**43,28**
	SUB KEGIATAN :															
	- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				-	130.000.000	132.800.000	136.265.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	138,12	99,57	108,38
	- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				-	130.000.000	132.800.000	136.265.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	120,96	105,00	104,44
	- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				-	804.309.000	820.395.180	836.883.315	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	63,75	74,28	22,67
	JUMLAH					**3.276.175.000**	**3.321.634.059**	**3.388.392.560**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**0,00**	**88,78**	**85,55**	**74,21**

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)
VI.	BIRO UMUM			JUMLAH	115.137.627.299	132.954.494.018	116.677.214.354	526.794.999.582					71,31	82,34	91,90	82,14
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				115.137.627.299	132.954.494.018	116.677.214.354	526.794.999.582					71,31	82,34	91,90	82,14
	1. KEGIATAN : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				147.250.000	109.251.824	130.400.000	31.040.694					32,66	98,64	93,24	27,38
	SUB KEGIATAN :															
	– Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	35.000.000	4.000.000	4.042.400					0,00	99,20	88,48	41,02
	– Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				-	31.500.000	4.000.000	3.501.700					0,00	98,72	93,25	41,12
	– Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				-	25.000.000	30.150.000	4.080.000					0,00	99,02	88,68	0,00
	– Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				-	25.000.000	14.000.000	5.873.648					0,00	98,95	92,66	43,73
	– Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD				-	31.500.000	30.250.000	5.391.294					0,00	98,98	87,83	0,00
	– Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				147.250.000	25.000.000	34.000.000	4.496.618					32,66	98,64	99,87	32,80
	– Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	25.251.824	24.000.000	3.668.078					0,00	99,35	100,00	36,72
	2. KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.653.440.917	46.481.367.188	46.709.744.145	55.195.689.335					85,77	87,94	84,66	85,56
	SUB KEGIATAN :															
	– Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.781.940.917	46.364.367.188	46.487.744.145	55.281.940.644					0,00	87,95	84,52	85,54
	– Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD				-	117.000.000	132.000.000	36.868.179					0,00	87,34	89,60	99,51
	– Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				31.200.000	27.500.000	50.000.000	16.264.500					68,71	70,28	68,94	95,53
	– Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD				31.200.000	32.500.000	60.000.000	15.500.000					68,77	68,18	98,84	94,22
	3. KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				640.900.000	550.510.000	562.215.857	526.434.070					75,65	86,81	99,63	78,16
	SUB KEGIATAN :															
	– Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-	15.000.000	10.000.000	25.025.000					0,00	99,39	99,62	99,88
	– Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				428.900.000	370.000.000	487.215.857	380.000.000					68,76	76,99	99,48	71,52
	– Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	-	-	-					0,00	0,00	0,00	0,00
	– Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				216.460.000	208.510.000	215.000.000	239.511.070					68,19	99,22	99,95	78,34
	4. KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.900.000	158.836.176	100.000.000	90.450.000					0,00	15,12	100,00	75,45
	SUB KEGIATAN :															
	– Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-	-	-	-					0,00	0,00	0,00	0,00
	– Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	-	-	-					0,00	0,00	0,00	0,00
	– Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75.900.000	158.836.176	100.000.000	90.450.000					0,00	15,12	100,00	75,45

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
5.	**KEGIATAN :** **Administrasi Umum Perangkat Daerah**				9.592.861.189	11.475.460.500	10.045.467.699	9.298.588.198								
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor				898.000.000	658.407.000	780.407.000	697.000.000								
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				550.000.000	469.540.098	435.000.000	786.215.754								
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				270.000.000	321.404.500	234.000.000	468.949.152								
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.965.000.000	5.291.949.000	3.686.000.000	4.441.827.346								
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.257.461.189	4.696.900.000	4.730.000.000	2.845.068.192								
	- Pelaksanaan/sesi Arsip Dinamis pada SKPD				184.600.000	238.800.000	719.000.000	74.227.800								
6.	**KEGIATAN :** **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				9.177.182.756	28.486.909.297	19.834.348.748	18.970.689.798								
	SUB KEGIATAN : - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.829.950.000	23.200.000.000	9.813.188.448	16.272.700.000								
	- Pengadaan Mebel				1.346.950.000	1.392.960.000	1.798.000.000	561.010.000								
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	-	1.188.000.000	700.989.798								
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	-	46.068.250	-								
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	-	2.150.000.000	530.941.820								
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.300.982.756	4.093.451.297	2.150.000.000	975.689.000								
7.	**KEGIATAN :** **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				16.165.553.922	16.646.352.659	14.569.553.288	15.957.313.583								
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.000.000	82.000.000	86.250.000	33.001.940								
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.048.226.784	6.114.767.565	4.649.000.000	5.847.411.241								
	- Penyediaan Jasa Pelisalan dan Pemeliharaan Kantor				1.400.000.000	2.696.350.000	1.445.000.000	1.810.061.158								
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.646.425.138	7.751.465.134	8.409.288.288	9.276.809.372								
8.	**KEGIATAN :** **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				24.349.239.364	16.421.788.250	16.886.167.374	8.885.425.162								
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				800.000.000	847.204.000	1.000.000.000	1.122.526.000								
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.200.000.000	2.036.739.500	2.600.000.000	2.437.783.300								
	- Pemeliharaan Mebel				-	100.500.000	110.000.000	40.120.000								
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	1.534.372.000	930.000.000	380.000.000								
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-	200.000.000	-	-								

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
	- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-	80.000.000	90.000.000	89.850.840	-	-			0,00	77,83	98,43	97,15
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.011.675.800	10.354.967.700	9.466.167.374	2.466.148.822					23,37	96,85	99,01	98,62
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	-	1.010.000.000	590.000.000	-	-			0,00	0,00	99,98	91,96
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.536.361.964	1.268.493.000	1.340.000.000	665.000.000					93,80	99,85	99,99	99,92
	9. **KEGIATAN : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				**300.000.000**	**2.831.155.176**	**2.580.000.000**	**4.294.750.152**					**91,66**	**93,64**	**93,92**	**95,80**
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	302.500.000	300.000.000	294.790.152	-				0,00	78,22	78,48	99,99
	- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				300.000.000	298.195.176	200.000.000	200.000.000					91,99	97,23	99,63	99,70
	- Pelaksanaan Medikal Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	15.000.000	80.000.000	300.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	2.000.000.000	2.000.000.000	3.500.000.000	-				0,00	99,99	99,99	82,98
	10. **KEGIATAN : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**				**8.437.960.950**	**9.776.755.006**	**8.535.500.000**	**13.025.599.634**					**93,22**	**94,42**	**94,63**	**95,88**
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				5.219.200.000	6.396.500.000	4.801.500.000	6.319.118.217					92,18	92,46	94,85	94,51
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				2.660.746.950	3.010.000.000	3.271.000.000	4.058.924.407					79,46	97,95	92,17	95,96
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				325.000.000	364.755.006	260.000.000	647.554.500					96,56	99,72	99,99	99,37
JUMLAH					**115.137.627.291**	**112.554.484.016**	**114.677.214.394**	**126.734.597.592**					**71,31**	**90,24**	**91,86**	**87,14**
VII.	**SEKRETARIAT DPRD**			**JUMLAH**	**3.202.553.330**	**3.896.879.000**	**3.746.211.209**	**3.395.477.840**					**0,00**	**71,91**	**96,15**	**92,91**
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**				**1.400.636.430**	**1.722.752.450**	**1.700.544.150**	**1.264.964.466**					**97,11**	**59,52**	**72,54**	**99,64**
	1. **KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**142.383.650**	**127.447.200**	**146.865.000**	**52.407.453**					**98,05**	**96,20**	**85,93**	**90,77**
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				92.222.650	76.107.200	65.000.000	10.000.000					99,95	93,82	78,72	92,80
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD				-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-				0,00	100,00	99,11	92,17
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	5.000.000	7.000.000	6.719.284	-				0,00	100,00	94,60	91,46
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-	7.000.000	6.000.000	3.740.372	-				0,00	100,00	99,49	99,02
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				-	5.000.000	10.000.000	7.568.708	-				0,00	100,00	95,79	90,20
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.161.000	18.340.000	30.000.000	10.340.571					96,36	99,92	97,00	99,33

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
	2. KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				160.295.000	147.806.100	190.673.600	210.335.550								
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				160.295.000	147.806.100	190.673.600	210.335.550								
	3. KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah				191.765.750	384.460.450	296.808.600	279.303.367								
	SUB KEGIATAN : - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				191.765.750	384.460.450	296.808.600	279.303.367								
	4. KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				234.364.000	194.070.000	450.307.200	244.315.783								
	SUB KEGIATAN : - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				234.364.000	194.070.000	450.307.200	244.315.783								
	5. KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				685.164.000	698.268.700	465.464.500	445.062.500								
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700.000	700.005	10.000.000	8.877.778								
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				684.464.000	756.866.700	452.464.500	436.325.191								
	6. KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.840.000	48.710.000	47.000.000	52.978.280								
	SUB KEGIATAN : - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.840.000	86.710.000	47.000.000	52.978.280								
II.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				1.742.516.500	2.172.782.550	2.040.867.000	2.195.022.562								
	1. KEGIATAN : Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				890.167.400	1.231.461.305	1.124.905.700	747.532.062								
	SUB KEGIATAN : - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				276.315.150	991.212.305	232.018.850	190.000.000								
	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				16.667.500	85.256.000	150.500.000	80.000.000								
	- Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				137.084.550	186.465.500	234.009.500	180.000.000								
	- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				460.063.250	857.571.800	518.418.650	247.532.562								
	2. KEGIATAN : Fasilitasi Bantuan Hukum				802.349.500	643.361.250	916.727.300	1.393.000.000								
	SUB KEGIATAN : - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				604.387.000	599.881.250	732.627.300	1.193.000.000								
	- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				298.062.500	143.480.000	185.000.000	180.000.000								
	JUMLAH				3.202.553.300	3.996.373.005	3.742.311.200	3.395.477.048								
VIII.	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			JUMLAH	2.636.799.193	3.695.902.401	3.552.901.137	3.997.358.921								
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				1.636.921.193	1.512.142.351	2.146.384.921	1.336.913.959								
	1. KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000								
	SUB KEGIATAN : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000								

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(20)	(21)
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.500.000	-				0,00	100,00	100,00	99,42
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	5.000.000	3.000.000	3.500.000	-				0,00	100,00	100,00	93,06
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.500.000	-				0,00	100,00	100,00	99,51
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				-	5.000.000	3.000.000	3.500.000	-				0,00	100,00	100,00	79,50
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.500.000	-				0,00	100,00	97,89	98,90
2.	**KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**108.960.000**	**104.680.000**	**104.520.000**	**108.670.850**					**45,41**	**100,00**	**100,00**	**99,56**
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				99.960.000	99.680.000	101.520.000	99.120.000					90,00	100,00	100,00	100,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000	5.000.000	3.000.000	958.850	-				-	-	-	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-	**120.475.000**	**152.375.100**	**237.385.100**	-				**0,00**	**99,12**	**97,03**	**73,40**
	SUB KEGIATAN :															
	- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				-	10.675.000	45.300.000	-	-				0,00	92,00	72,69	0,00
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasarkan Tugas dan Fungsi				-	54.800.000	46.513.000	143.984.000	-				0,00	97,18	96,97	92,55
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	54.900.000	59.963.100	94.201.100	-				0,00	92,48	90,47	89,79
4.	**KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**670.063.000**	**699.967.650**	**1.499.369.000**	**626.234.000**					**91,57**	**93,62**	**97,57**	**95,99**
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				232.975.800	274.477.100	1.065.799.000	124.467.000					78,90	95,62	96,50	89,16
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.190.000	30.000.000	30.710.000	48.204.000	-				0,00	100,00	98,72	95,27
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	4.987.500	6.260.000	8.260.000	-				0,00	92,18	95,91	92,70
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				235.195.000	340.143.050	397.610.000	439.293.000					26,58	92,19	96,59	99,50
5.	**KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**676.987.764**	**637.245.606**	**414.282.726**	**367.774.766**					**94,28**	**92,23**	**95,91**	**95,49**
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000	3.000.000	4.800.000	2.915.150					95,81	98,67	100,00	99,54
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000	598.950.000	394.395.206	193.584.216					90,40	100,00	99,97	0,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000	24.738.606	1.500.000	4.750.000	-				0,00	98,04	95,90	72,50
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				283.987.764	274.556.700	103.846.520	106.521.370					4,09	72,58	100,00	97,26
6.	**KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**41.915.191**	**16.850.191**	**16.850.191**	**53.442.851**					**36,96**	**99,52**	**92,33**	**99,09**
	SUB KEGIATAN :															
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.915.000	16.850.000	16.850.000	53.441.850					36,96	98,92	92,32	99,09

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)
III.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				501.918.000	2.193.898.750	1.491.134.216	1.491.923.522								
	1. KEGIATAN : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				168.276.000	379.000.000	298.063.520	372.155.200								
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyelelasan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				37.804.000	123.000.000	72.415.520	128.280.000								
	- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				53.351.000	200.000.000	46.000.000	194.075.200								
	- Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				17.021.000	55.000.000	147.250.000	82.797.000								
	2. KEGIATAN : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				156.757.000	1.461.000.000	491.364.480	538.761.000								
	- Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				139.470.000	1.215.000.000	321.048.480	197.506.000								
	- Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				14.804.000	150.000.000	110.000.000	249.377.000								
	- Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				24.663.000	80.000.000	70.340.000	97.408.000								
	3. KEGIATAN : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				134.885.000	353.898.750	505.974.216	779.169.322	-							
	SUB KEGIATAN :															
	- Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				25.963.000	84.304.750	112.074.000	199.408.000	-							
	- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				59.162.000	150.000.000	208.084.216	279.302.672	-							
	- Penelenggaran, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				50.000.000	191.000.000	282.886.000	318.860.000	-							
	JUMLAH :				2.226.705.165	5.886.952.031	5.555.861.137	2.997.304.521								
IX.	SUB PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			JUMLAH	-	4.877.449.000	5.258.757.967	5.583.354.532	-	-	-					
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				-	1.031.038.000	1.434.338.669	1.719.354.532	-							
	1. KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-					
	SUB KEGIATAN :															
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-					
	2. KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	417.315.000	411.315.000	451.071.523	-	-	-					
	SUB KEGIATAN :															
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	221.000.000	221.000.000	221.000.000	-	-	-					
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-					
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	147.990.000	147.990.000	181.746.523	-	-	-					
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada				-	18.425.000	18.425.000	18.425.000	-	-	-					
	3. KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	1.179.420.000	1.265.926.669	1.268.926.009	-	-	-					
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-					
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-	44.025.000	44.025.000	44.025.000	-	-	-					
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	1.134.895.000	1.158.326.009	1.158.326.009	-	-	-					

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
4.	KEGIATAN : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-	33.303.000	33.303.000	33.303.000	-	-	-	51.334.400	0,00	0,00	0,00	154,14
	SUB KEGIATAN : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	24.803.000	24.803.000	24.803.000	-	-	-	37.734.400	0,00	0,00	0,00	152,10
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	8.500.000	8.500.000	8.500.000	-	-	-	13.600.000	0,00	0,00	0,00	160,12
B.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**				-	3.226.410.406	3.674.218.336	3.845.000.000	-	-	-	3.449.882.674	0,00	0,00	0,00	89,70
1.	KEGIATAN : **Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**				-	456.235.500	704.643.498	704.643.498	-	-	-	940.502.591	0,00	0,00	0,00	133,27
	SUB KEGIATAN : - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				-	10.000.000	107.807.998	57.807.998	-	-	-	76.563.750	0,00	0,00	0,00	132,50
	- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				-	155.000.000	205.000.000	205.000.000	-	-	-	161.321.407	0,00	0,00	0,00	78,69
	- Fasilitasi Penataan Wilayah				-	291.235.500	391.235.500	441.235.500	-	-	-	742.587.434	0,00	0,00	0,00	168,30
2.	KEGIATAN : **Pelaksanaan Otonomi Daerah**				-	2.013.178.906	2.163.178.906	2.333.955.602	-	-	-	1.933.882.649	0,00	0,00	0,00	82,86
	SUB KEGIATAN : - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				-	330.000.000	480.000.000	1.480.000.000	-	-	-	280.462.741	0,00	0,00	0,00	63,74
	- Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				-	1.294.000.000	1.294.000.000	484.761.632	-	-	-	598.911.033	0,00	0,00	0,00	123,11
	- Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				-	389.178.000	389.178.000	389.178.000	-	-	-	406.418.075	0,00	0,00	0,00	104,43
3.	KEGIATAN : **Fasilitasi Kerjasama Daerah**				-	756.996.906	806.996.906	806.996.906	-	-	-	534.897.244	0,00	0,00	0,00	66,26
	SUB KEGIATAN : - Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				-	319.108.900	319.108.900	319.108.900	-	-	-	195.334.276	0,00	0,00	0,00	61,52
	- Fasilitasi Kerjasama Badan/Usaha/Swasta				-	134.836.000	184.836.000	184.836.000	-	-	-	162.489.938	0,00	0,00	0,00	87,91
	- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				-	303.052.000	303.052.000	303.052.000	-	-	-	175.984.970	0,00	0,00	0,00	58,04
	JUMLAH				-	4.817.469.060	5.359.757.897	5.563.354.532	-	-	-	5.423.140.799	0,00	0,00	0,00	98,54
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					127.378.852.275	370.590.288.869	355.769.337.499	370.484.614.153	94.413.755.348	318.957.348.310	268.911.364.159	501.894.983.165	74,12	85,53	73,06	135,42
TOTAL PAGU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					123.487.113.625	146.570.158.129	132.303.102.169	140.826.036.855	90.176.858.682	112.756.813.145	121.080.869.783	138.368.691.874	73,03	90,58	93,03	91,18
TOTAL PAGU PROGRAM TEKNIS					3.891.738.650	224.020.130.740	223.466.235.330	229.664.577.298	4.237.074.710	184.226.527.165	136.830.494.812	373.296.912.311	108,87	82,23	61,23	162,54

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Berdasarkan rekapitulasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, total pagu program penunjang urusan pemerintahan daerah menunjukkan *trend* yang bervariasi selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, pagu anggaran tercatat sebesar Rp 127,38 miliar dengan capaian realisasi kinerja sebesar 74,12% dari target. Pada tahun 2022, alokasi anggaran mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 123,49 miliar, namun capaian kinerja justru meningkat hingga 85,53%.

Selanjutnya, pada tahun 2023, pagu anggaran kembali mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 38,92 miliar, dan hal ini berdampak pada capaian kinerja yang ikut menurun menjadi 73,06%. Kondisi ini berbalik pada tahun 2024, di mana pagu anggaran melonjak drastis mencapai Rp 402,25 miliar. Lonjakan ini berkontribusi pada pencapaian kinerja yang melampaui target, dengan realisasi sebesar 134,11%.

Secara rata-rata, selama periode 2021–2024, Sekretariat Daerah mampu mencapai tingkat kinerja lebih dari 90% dari target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024. Meskipun demikian, fluktuasi capaian dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya strategi konsistensi, pengendalian program, serta efisiensi penggunaan anggaran agar stabilitas kinerja dapat terjaga.

2.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kelompok Sasaran layanan merupakan stakeholder utama yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi, fasilitasi, perumusan kebijakan dan pelayanan administratif oleh sekretariat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai unsur pembantu pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta aspek kebutuhan koordinasi antar perangkat daerah, harmonisasi kebiakan, transparansi tata kelola dan kontribusi terhadap efektifitas pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan kesekretariatan, sekretariat daerah diharapkan dapat lebih berfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi koordinasi, kebijakan fasilitasi, serta pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang professional, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.	KELOMPOK SASARAN	KEBUTUHAN KELOMPOK SASARAN	RENCANA LAYANAN YANG DIBERIKAN	DAMPAK YANG DIHARAPKAN	
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah, K/L, Pemda dan Masyarakat Umum	Sebagai penggerak koordinasi, pembinaan, serta penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.	Koordinasi Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Fasilitasi Koordinasi Perangkat Daerah , Fasilitasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, otonomi dan Kerjasama serta Administrasi wilayah pertanahan	Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah antara lain adalah meningkatnya keterpaduan antar perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, meningkatnya kualitas kebijakan daerah yang berbasis data dan hasil evaluasi, serta terbangunnya kemitraan yang produktif antara pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, tertatanya administrasi pemerintahan, pertanahan, dan penataan wilayah yang lebih baik akan mendukung kepastian hukum serta ketepatan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secara keseluruhan, melalui peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, diharapkan tercipta pemerintahan daerah yang sinergis, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.	**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**
2	Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Terutama Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial , Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Organisasi Keagamaan, Masyarakat, Lembaga Pendidikan Beragama dan Pihak Swasta	Perumusan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi Rumusan Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Tersusunnya rumusan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dapat berdampak langsung bagi masyarakat	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3	Gubernur, Wakil Gubernur , Sekretaris Daerah dan Seluruh Perangkat Daerah Pemprov Kalteng, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga peradilan, Masyarakat yang	Fasilitasi produk hukum provinsi; fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota; sosialisasi/penyuluhan hukum; fasilitasi permasalahan hukum litigasi; saran/pertimbangan hukum; bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Koordinasi dan fasilitasi perumusan produk hukum daerah, Pelayanan harmonisasi dan legal drafting, Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum, Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), Fasilitasi dan pembinaan hukum	Dampak yang diharapkan dari seluruh kegiatan dan layanan tersebut adalah terciptanya pemerintahan daerah yang tertib hukum, meningkatnya kualitas produk hukum daerah, serta terbangunnya kesadaran hukum di seluruh lapisan aparatur dan masyarakat yang kemudian Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang	**BIRO HUKUM**

NO.	KELOMPOK SASARAN	KEBUTUHAN KELOMPOK SASARAN	RENCANA LAYANAN YANG DIBERIKAN	DAMPAK YANG DIHARAPKAN	
	membutuhkan bantuan hukum, Akademisi hukum, dan Organisasi Bantuan Hukum di Kalteng		perangkat daerah, Evaluasi produk hukum kabupaten/kota,Advokasi dan pencegahan permasalahan hukum pemerintahan	dihasilkan, Terdokumentasinya produk hukum dan naskah hukum, serta terlaksananya bantuan hukum	
4	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, Masyarakat, dan seluruh *stakeholder* yang mendukung penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan di lingkup bidang Perekonomian	Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kebijakan dan sarana perekonomian, sumber daya alam, BUMD, investasi daerah dan BLUD serta Fasilitasi koordinasi, Perekonomian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan dan sarana perekonomian, sumber daya alam, BUMD, investasi daerah dan BLUD	Koordinasi kebijakan perekonomian daerah, Fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, Koordinasi pemanfaatan sumber daya alam, Analisis ekonomi makro dan mikro, Fasilitasi investasi dan pengembangan usaha	Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi dan layanan Biro Perekonomian adalah meningkatnya daya saing ekonomi daerah, terbangunnya iklim usaha yang sehat, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif	**BIRO PEREKONOMIAN**
5	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Pengadaan dan PPK, Penyedia Barang/Jasa, Pokja Pemilihan dan ULP/Pejabat Pengadaan	Penguatan kelembagaaan UKPBJ Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah, fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam partisipasi pengadaan barang/jasa	Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE), Pengelolaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Katalog Elektronik Daerah, Pembinaan dan sertifikasi kompetensi aparatur pengadaan (PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan pejabat terkait), Pengawasan, evaluasi, dan advokasi proses pengadaan , Fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sanggahan pngadaan, Pengelolaan unit kerja pelayanan pengadaan secara terpusat (UKPBJ), Peningkatan kapasitas dan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal	Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi dan layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa antara lain meningkatnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah daerah; meningkatnya profesionalitas aparatur pengadaan; serta tumbuhnya ekosistem pengadaan yang sehat dan berintegritas. Pada akhirnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan mampu menjadi pusat unggulan *(center of excellence)* pengadaan di daerah, yang mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berdaya saing.	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**
6	Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi, DPRD Provinsi, Instansi Vertikal dan Masyarakat umum	Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (APBD/APBN), Evaluasi Capaian Realisasi APBD dan APBN, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Strategis, Pelaporan Capaian Kinerja Pembangunan, Analisis Kebijakan Pembangunan, Sinkronisasi Program Pembangunan	Fasilitasi perencanaan dan pengendalian pembangunan (APBD/APBN), evaluasi capaian realisasi APBD dan APBN, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan strategis, pelaporan capaian kinerja pembangunan, analisis kebijakan pembangunan, sinkronisasi program pembangunan	Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi dan layanan Biro Administrasi Pembangunan adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah, tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan komprehensif, serta meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan yang berbasis hasil *(result-based development)*	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**
7	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Struktural dan Fungsional, Tim Reformasi Birokrasi, dan BKN		Koordinasi dan fasilitasi penyusunan serta penataan kelembagaan perangkat daerah, Pelayanan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), Fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan daerah, Pengelolaan reformasi birokrasi dan zona	Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi dan layanan Biro Organisasi adalah terwujudnya birokrasi yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan, peningkatan efisiensi organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel	**BIRO ORGANISASI**

NO.	KELOMPOK SASARAN	KEBUTUHAN KELOMPOK SASARAN	RENCANA LAYANAN YANG DIBERIKAN	DAMPAK YANG DIHARAPKAN	
			integritas, Fasilitasi pengembangan sistem pelayanan publik dan inovasi pelayanan, Monitoring dan evaluasi kinerja kelembagaan dan penyelenggaraan pelayanan publik, Fasilitasi penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP), Pembinaan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan tata laksana di perangkat daerah		
8	Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah , Asisten Daerah, Staf Ahli, serta ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, Tamu VIP dan Delegasi, Vendor dan Rekanan, Pengelola Aset Daerah , serta Media dan Wartawan	Kenyamanan dan kesiapan ruang pertemuan penyelenggaraan acara kenegaraan; kelengkapan sarana dan prasarana; serta tersedianya ruang representatif yang mencerminkan citra pemerintahan daerah yang profesional, tertib, dan layak secara protokoler	Layanan rumah tangga pimpinan, Layanan pemanfaatan fasilitas gedung dan perlengkapannya untuk acara-acara kenegaraan, rapat dan menerima tamu Pengelolaan keuangan dan aset Setda, Administrasi persuratan dan kearsipan, Pengelolaan kendaraan dinas, Pelayanan logistik dan fasilitas kantor	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan; Terciptanya citra positif dan professional dari Pemerintah Provinsi; Peningkatan kenyamanan dan produktivitas kerja, Meningkatnya konsentrasi dan partisipasi peserta rapat; Penyelenggaraan kegiatan yang lebih efisien; Citra profesionalisme dalam pelayanan internal	**BIRO UMUM**
9	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah , K/L, Pemda, BUMN/BUMD, Masyarakat/Pihak Swasta	Pendampingan acara yang menghadirkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah serta Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita	Fasilitasi Layanan Keprotokolan	Kelancaran dan kesuksesan acara yang menghadirkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah serta Ketua TP. PKK dan Ketua Dharma Wanita	**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**
	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah serta Ketua TP. PKK dan Ketua Dharma Wanita	Pendampingan keprotokolan bagi pimpinan dalam melaksanakan kegiatan/acara	Fasilitasi Layanan Keprotokolan	Kepuasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dalam mengikuti acara/kegiatan	
		Pelayanan materi komunikasi bagi pimpinan dalam melaksanakan kegiatan/acara	Fasilitasi Layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kepuasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dalam publikasi dan dokumentasi kegiatan/acara	
	ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Layanan Administrasi Kepegawaian Setda	Fasilitasi Layanan Administrasi Kepegawaian Setda	Layanan Administrasi Kepegawaian yang prima	
	Biro di lingkungan Sekretariat Daerah	Layanan Perencanaan Setda	Fasilitasi Layanan Perencanaan Setda	Dokumen Perencanaan Setda yang relevan dan akuntabel	

2.5 MITRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkornisasi, dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, digambarkan keterkaitan atau mitra-mitra Biro Biro Kepada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, SKPD Teknis Terkait, termasuk instansi/lembaga/pihak swasta yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI INSTANSI VERTIKAL/ DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NO	STAFF AHLI	BIRO	DINAS/BADAN	INSTANSI VERTIKAL	KET
1	Staff Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah	
		Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	
		Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	
		Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah	
		Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Intelijen Negara Daerah	
				Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	
				Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah	
2	Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Bandara Tjilik Riwut	
		Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah	
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah	
		Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah	
		Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Pelayanan Pajak Palangaka Raya	
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah	BPK RI Perwakilan Kalimantari Tengah	
			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	
			Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Pelelangan Kekayaan Negara	
			Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Dirjen Negara	
			Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah		
3	Staff ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	
		Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah	
		Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah	
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	
			Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	BPJS	
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Balai Penelitian Tanaman Pangan	
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah		
			Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah		
			Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah		
			UPT Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus Palangka Raya		
			UPT Rumah Sakit Jiwa Kalawate		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

2.6 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 3 (tiga) BUMD terdiri dari PT. Bank Kalteng, PT. Jamkrida Kalteng dan PT. Banama Tingang Makmur. Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian kinerja Biro Perekonomian sangatlah strategis dan berlandaskan pada sinergi yang kuat antara pembinaan birokrasi dengan peran nyata BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Keterkaitan ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari kontribusi finansial hingga pelaksanaan program pembangunan. Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keuntungan atau laba yang dihasilkan BUMD menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting. Peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki anggaran yang lebih besar dalam mendanai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi indikator keberhasilan kinerja Biro Perekonomian.

BUMD berperan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi di daerah dengan menjalankan berbagai kegiatan usaha. Hal ini mendukung kinerja Biro Perekonomian dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instansi yang membina BUMD, Biro Perekonomian mengarahkan BUMD untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah. Keberhasilan BUMD dalam menjalankan arahan ini menjadi tolok ukur implementasi kebijakan perekonomian yang digariskan Biro Perekonomian.

Biro Perekonomian memiliki peran kunci dalam membina dan mengawasi BUMD agar kinerjanya maksimal. Strategi yang dijalankan meliputi:

1. Pengawasan dan evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien;
2. Pemberian arahan strategis memberikan bimbingan dan arahan strategis agar BUMD dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan;

3. Pengembangan kapasitas SDM mendorong profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di jajaran direksi dan komisaris BUMD untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
4. Sinergi BUMD memfasilitasi jejaring dan sinergi antar-BUMD untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada.

2.7 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.7.1 PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.60 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022, maka Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administraif guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi di berbagai bidang.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Permasalahan	Unit Kerja
1	Belum Optimalnya Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
	Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi rumusan Kebijakan di bidang Pemerintahan, bidang otonomi daerah dan bidang kerja sama daerah	
2	Belum Optimalnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	**Biro Kesejahteraan Rakyat**
	Belum Optimalnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual	
	Belum Optimalnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteran Rakyat Pelayanan Dasar	
3	Tingkat Optimalisasi yang belum tercapai pada kualitas program dan kegiatan di bidang perekonomian dan Pembangunan Daerah	**Biro Perekonomian**

No	Permasalahan	Unit Kerja
4	Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan, akibat kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
	Belum optimalnya tata kelola pengadaan barang/jasa	
	Masih rendahnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/jasa	
5	Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah	**Biro Administrasi Pembangunan**
	Belum optimalnya evaluasi dan percepatan pelaksanaan APBD/APBN Pemprov Kalteng	
	Belum optimalnya pelaksanaan dan pengembangan data/informasi pembangunan	
6	Belum Optimalnya capaian Reformasi Birokrasi dan Implementasi SAKIP	**Biro Organisasi**
	Belum optimalnya penerapan digitalisasi dan penyederhanaan proses bisnis	
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik	
7	Belum Optimalnya Upaya reformasi hukum, Kualitas regulasi, harmonisasi kebijakan, serta fasilitasi bantuan hukum	**Biro Hukum**
8	Belum optimalnya pelayanan operasional rumah tangga pimpinan, pengelolaan keuangan dan aset, serta layanan tata usaha dalam mendukung kelancaran operasional pimpinan dan pelayanan Administrasi Umum	**Biro Umum**
	Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta kualitas SDM	
9	Belum optimalnya Fasilitasi sarana dan Prasarana serta pemeliharaaan alat kantor	**Biro Administrasi Pimpinan**
	Belum optimalnya SDM Perencanaan, pengelolaan kepegawaian, Kehumasan dan Keprotokolan	
	Belum optimalnya sarana dan prasarana keprotokolan serta materi dan komunikasi pimpinan dalam melayani pimpinan secara cepat, transparan dan terkini	

2.7.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis dalam renstra Adalah masalah atau tantangan penting yang harus menjadi fokus perhatian dan prioritas dalam perencanaan Pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, isu strategis dimaknai sebagai permasalahan pokok yang dihadapi oleh daerah atau perangkat daerah yang memerlukan perhatian dan penanganan dalam jangka menengah agar tidak menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Data Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini:

TABEL 2.10 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	Tata Kelola Pemerintahan yang berkelanjutan dan Transparan	Smart Governance dan keterpaduan tata kelola pemerintahan	Penguatan Implementasi otonomi daerah dan pemberian penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kesejangan kapasitas pemerintahan kabupaten/kota	Penguatan Peran Koordinasi Sekretariat Daerah Sebagai Pusat Sinergi Pemerintahan Daerah
	Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi rumusan kebijakan di Bidang Pemerintahan, Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Kerjasama Daerah	Belum Optimalnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Smart Governance dan keterpaduan tata kelola pemerintahan	Penguatan Implementasi otonomi daerah dan pemberian penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kesejangan kapasitas pemerintahan kabupaten/kota	Penguatan Peran Koordinasi Sekretariat Daerah Sebagai Pusat Sinergi Pemerintahan Daerah
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Belum Optimalnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan dasar dan Biro Mental Spritual	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Inclusive Deyticonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Penguatan Perlindungan Sosial dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Masih terdapatnya beberapa faktor penghambat pemberdayaan sumber daya manusia seperti masih terbatasnya akses pendidikan, dan daerah daerah terpencil dan sulit dijangkau, belumnya penduduk yang mengalami stunting, dan pelayanan kesehatan	Peningkatan Tata Kelola Perumusan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Biro Mental Spiritual, Serta Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
BIRO PEREKONOMIAN	Tingkat Optimalisasi yang belum tercapai pada kualitas program dan kegiatan di bidang perekonomian dan Pembangunan Daerah	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Investasi berwawasan lingkungan	Tuntutan Global Pembangunan Hijau dan Transformasi Digital	Produktifitas rendah, kesulitan hidup tinggi usia produktif	Transformasi Ekonomi berbasis industrilisasi maksud infrastruktur dasar dan penunjang	Penguatan Koordinasi, Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Akibat Kurangnya Pemahaman Para Pelaku Pengadaan	Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem pemerintahan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan partisipatif	Standar global transparansi pengadaan publik	Implementasi Perpres 12/2021 tentang PBJ dan integrasi dengan SPSE dan e-Katalog LKPP serta perlu adanya Agenda Reformasi Birokrasi	perlu sistem pengadaan transparan untuk mendukung investasi daerah dan mengurangi praktik inefisiensi	Reformasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang transparan dan Profisional
	Belum Optimalnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Efisiensi Sumber daya publik dan transparansi pengelola keuangan	Standar global transparansi pengadaan publik	Tata Kelola Pengadaan Nasional	Implementasi e-procurement dan peningkatan profesionalisme pengadaan	Menciptakan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang baik dan Konsultif

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Laporan pembangunan belum sepenuhnya mengintegrasikan daya dukung & daya tampung lingkungan.	transparansi data pembangunan melalui open government dan sustainability reporting	RPJMN 2025–2029 menekankan evidence-based policy.	Laporan pembangunan daerah harus mendukung koordinasi lintas provinsi di Kalimantan	Penguatan Sistem Pengendalian Pembangunan
	Belum Optimalnya Belum optimalnya evaluasi dan percepatan pelaksanaan APBD/APBN Pemprov Kalteng	Penguatan sistem informasi pembangunan daerah berwawasan lingkungan.	Evidence-based planning dan data-driven governance.	Penguatan sistem monitoring pembangunan nasional (Satu Data Indonesia)	Lemahnya data dan pengendalian pembangunan antar sektor.	Penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah.
	Belum Optimalnya Pelaksanaan dan Pengembangan data /Informasi Pembangunan	Belum ada integrasi data ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu platform	menuntut keterpaduan data pembangunan.	Kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) mengharuskan data standar, interoperabel, dan dapat diakses.	Kesenjangan data pembangunan antar-OPD di Kalimantan tengah sulit mendukung perencanaan lintas sektor	Penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah.
BIRO ORGANISASI	Belum optimalnya reformasi birokrasi, digitalisasi proses bisnis, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.	Reformasi Birokrasi Tematik Dan Penguatan kelembagaan dan tata laksana	Kelembagaan yang tangguh	Implementasi SPBE dan penyederhanaan birokrasi.	Pemantapan tata kelola Pemerintah Daerah	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah
BIRO HUKUM	Belum Optimalnya Upaya reformasi hukum, Kualitas regulasi, harmonisasi kebijakan, serta fasilitasi bantuan hukum	Integrasi kebijakan hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	regulasi berbasis ESG, climate action, dan HAM.	Kebutuhan regulasi daerah sejalan dengan UU Cipta Kerja, Perda lingkungan, dan RPJPN.	regulasi yang kuat untuk mengawal pengelolaan SDA, mitigasi deforestasi, dan tata ruang	Penguatan kualitas peraturan dan harmonisasi kebijakan daerah.
BIRO UMUM	Belum optimalnya pelayanan operasional rumah tangga pimpinan, tata usaha, keuangan, dan aset.	Pengelolaan Sumber Daya Kantor Berkelanjutan	Meningkatkan Inovasi Teknologi	Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Pemerintah	Lemahnya manajemen aset dan pelayanan operasional pimpinan	Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Tangga, Keuangan, dan Aset serta tata usaha agar lebih efektif dan efisien dan mendukung tugas pimpinan sebagai administrasi umum
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	Belum Optimalnya SDM Perencanaan, Pengelolaa Kepegawaian , Materi Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan serta sarana dan Prasarana dalam melayani pimpinan cepat, transparan dan terkini	Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Revolusi Digital dan Tuntutan Digital Government	Meningkatkan Kualitas SDM	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kepegawaian Setda, Pelayanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan

#KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi, permasalahan, dan kondisi aktual yang dihadapi oleh masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah, serta mempertimbangkan keterkaitannya dengan isu global, nasional, dan regional, maka diperoleh beberapa isu strategis yang memerlukan penanganan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran koordinasi Sekretariat Daerah dalam penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan antar perangkat daerah guna menjamin efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik, efisien, Efektif dan Berintegritas
3. Keterbatasan kapasitas analisis ekonomi daerah, lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dibidang perekonomian.
4. Reformasi tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas melalui penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement) serta peningkatan kompetensi aparatur pengelola PBJ.
5. Penguatan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah melalui pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi, mendukung monitoring, evaluation, dan pelaporan berbasis kinerja.
6. Peningkatan efektivitas koordinasi dan fasilitasi di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan daerah untuk memperkuat daya saing daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Semua Isu strategis di atas memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan daerah:

Misi 1 : Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan → relevan dengan keterbatasan pengawasan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing → terkait isu reformasi birokrasi.

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan terpercaya → relevan dengan mayoritas permasalahan Setda, termasuk reformasi birokrasi, penguatan pelayanan publik, optimalisasi pengadaan, serta pengembangan data pembangunan.

Dengan demikian, Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian VISI RPJMD 2025-2029: “Mengangkat Harkat Martabat Khususnya Masyarakat Dayak, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045”, khususnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan reformasi birokrasi, serta dukungan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

2.8 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.8.1 TANTANGAN

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Kurangnya kepatuhan aparatur terhadap SOP serta budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja.
2. Belum optimalnya penyusunan regulasi daerah; partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan masih rendah.
3. Masih adanya praktik birokrasi yang panjang, lambat, dan berbiaya tinggi.
4. Keterbatasan program peningkatan kapasitas (pelatihan, sertifikasi, pendidikan lanjutan) bagi ASN.
5. Masih terdapat potensi konflik horizontal akibat perbedaan kepentingan pengelolaan sumber daya alam.
6. Ketimpangan pembangunan antarwilayah menimbulkan kecemburuan sosial.
7. Regenerasi tokoh adat/agama masih terbatas; dominasi tokoh senior belum diimbangi kaderisasi.
8. Pengaruh budaya luar (media sosial, gaya hidup instan) dapat mengikis nilai-nilai lokal.

9. Sistem perencanaan, pengendalian, dan pelaporan pembangunan belum terintegrasi secara penuh antar-OPD.
10. Kualitas data pembangunan belum konsisten; seringkali terdapat perbedaan angka antara satu OPD dengan OPD lain.
11. Keterlambatan pengiriman data dari kabupaten/kota menghambat penyusunan laporan provinsi.
12. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas analis ekonomi di Setda.
13. Keterlambatan data ekonomi dari instansi teknis menghambat penyusunan laporan dan rekomendasi kebijakan.
14. Minimnya kerja sama antardaerah untuk memperkuat daya saing ekonomi.
15. Rendahnya pemahaman pelaku pengadaan terhadap regulasi terbaru.
16. Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan berbasis elektronik (SPSE).
17. Risiko praktik KKN masih cukup tinggi dalam proses pengadaan.
18. Sarana prasarana kantor masih belum terpelihara optimal.
19. Dokumentasi dan peliputan kegiatan pimpinan masih terbatas kualitas dan jangkauannya.
20. Penyampaian informasi kegiatan pimpinan belum sistematis; sering terjadi tumpang tindih jadwal.
21. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarpras dan layanan administrasi.

2.8.2 PELUANG

Peluang dalam pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Kebijakan nasional melalui Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029 menekankan birokrasi berdampak langsung ke masyarakat. Hal ini menjadi peluang percepatan di daerah.
2. Komitmen anti-korupsi secara nasional dan global menekan daerah untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
3. Kesempatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga diklat nasional/internasional untuk peningkatan kapasitas ASN.
4. Modal sosial dan budaya Dayak serta kelembagaan adat yang masih kuat dapat dijadikan basis menjaga harmoni sosial.

5. Dukungan nasional terhadap program Moderasi Beragama dan Penguatan Ideologi Pancasila.
6. Komitmen RPJMD Kalimantan Tengah dalam mewujudkan masyarakat harmonis, berkarakter, dan inklusif.
7. Dukungan Bappenas melalui pengembangan aplikasi pemantauan kinerja pembangunan (SAKIP, SIPD).
8. Semakin meningkatnya tuntutan transparansi data dari masyarakat sipil mendorong OPD lebih serius menyajikan data akurat.
9. Posisi Kalimantan Tengah sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi regional.
10. Potensi sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata) yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan.
11. Peluang efisiensi anggaran dan percepatan belanja daerah melalui sistem pengadaan berbasis elektronik.
12. Adanya program sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa.
13. Potensi keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi proses pengadaan untuk meningkatkan transparansi.
14. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan dokumentasi dan peliputan dilakukan lebih modern (media digital).
15. Dukungan penuh pimpinan daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi.
16. Adanya peluang kerjasama dengan media dan lembaga informasi publik.

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan dua sisi mata uang: di satu sisi menjadi tantangan yang berpotensi menghambat kinerja birokrasi daerah, namun di sisi lain membuka peluang strategis untuk melakukan pembaruan. Dengan memanfaatkan *trend* globalisasi, transformasi digital, serta agenda pembangunan berkelanjutan, Sekretariat Daerah berpeluang memperkuat perannya sebagai motor penggerak tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Permasalahan dan Isu Strategis yang telah di bahas di Bab II merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran Rancangan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan pembangunan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran langsung dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Sebagai unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam membantu penyusunan kebijakan, mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta memfasilitasi kelancaran jalannya pemerintahan daerah.

Dalam kerangka tersebut, tujuan RENSTRA Sekretariat Daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan profesionalisme aparatur, memastikan integrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta mendukung penguatan sosial, ekonomi, dan budaya di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, tujuan ini sekaligus merupakan jawaban terhadap berbagai isu strategis global, nasional, regional, maupun internal yang telah diidentifikasi pada Bab II.

Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yaitu:

“Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045”

Untuk Mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2025-2029 tersebut, maka telah dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui Optimaliasasi Pendapatan Daerah (PAD) dan Pemanfaatan Sumber Daya alam Lokal
2. Peningkatan Pendidikan untuk Sumber Daya Manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai kaidah belom bahadat
3. Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkeadilan untuk meningkatkan konektifitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
4. Menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial
5. Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi indonesia Maju 2045

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berperan dalam mendukung tercapainya Misi 1 Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui Optimaliasasi Pendapatan Daerah (PAD) dan Pemanfaatan Sumber Daya alam Lokal; Misi 2 Peningkatan Pendidikan Untuk Sumber Daya Manusia Beretika Melalui Pendidikan Inklusif sesuai kaidah belom bahadat; dan Misi 5 Pemberdayaan Kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju.

Tujuan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dirumuskan sebagai Berikut: **“Mewujudkan Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas”**

Transformasi tata kelola pemerintahan dimaknai bukan hanya sekadar perbaikan administratif, tetapi perubahan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana pemerintahan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah memegang peran strategis sebagai motor penggerak koordinasi dan fasilitasi, yang memastikan seluruh perangkat daerah bergerak searah dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

Tujuan ini juga memiliki keterkaitan erat dengan Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah, yang merumuskan sasaran pembangunan, indikator kinerja, serta target lima tahunan. Misalnya, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Pelayanan Publik, serta Indeks Reformasi Hukum menjadi ukuran keberhasilan transformasi tata kelola. Seluruh indikator tersebut merupakan turunan langsung dari sasaran RPJMD yang menekankan pada terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan mampu melayani masyarakat secara optimal.

Tujuan ini juga memiliki keterkaitan erat dengan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah “Program Huma Betang Sejahtera”, Kartu Huma Betang Sejahtera hadir sebagai instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga akses ekonomi, dengan basis data penerima manfaat yang jelas. Transformasi tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah berfungsi untuk:

1) Memastikan integrasi kebijakan dan pelayanan – Kartu Huma Betang Sejahtera membutuhkan dukungan koordinasi lintas sektor dan lintas OPD agar pelayanan yang diberikan benar-benar sampai ke masyarakat tanpa hambatan birokrasi.
2) Meningkatkan kualitas manajemen ASN – Aparatur yang kompeten dan profesional sangat dibutuhkan untuk mengelola layanan berbasis data, sistem informasi digital, serta memastikan penyaluran manfaat program Kartu Huma Betang Sejahtera tepat sasaran.
3) Mengoptimalkan digitalisasi pemerintahan (SPBE) – Transformasi tata kelola diarahkan pada penguatan sistem informasi, baik untuk manajemen data penerima Kartu Huma Betang Sejahtera maupun integrasi layanan publik.
4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan – Mengembangkan sistem pelaporan dan pengendalian yang lebih efektif, sehingga pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera dapat dipantau secara berkala, terukur, dan dapat dievaluasi untuk peningkatan kualitas program di masa mendatang.

5) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Daerah – Mendukung penyampaian informasi publik, peliputan, dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah agar masyarakat dapat memahami, mengawasi, dan ikut mendukung pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera secara transparan.

Dengan demikian, tujuan strategis Sekretariat Daerah tidak hanya memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan secara internal, tetapi juga menjadi landasan kelembagaan bagi keberhasilan pelaksanaan program prioritas Gubernur. Tujuan ini sekaligus menunjukkan keterhubungan langsung antara Renstra Setda dengan RPJMD 2025–2029, dan program unggulan Kartu Huma Betang Sejahtera, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah.

3.2 SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2029 tidak hanya dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029, tetapi juga diarahkan untuk memastikan keterpaduan dengan program prioritas daerah, khususnya Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai instrumen perlindungan sosial-ekonomi dirancang untuk memperluas jangkauan manfaat kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kemandirian Masyarakat Kalimantan Tengah. Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah berperan sebagai pusat koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah agar kebijakan dan program yang dijalankan tetap konsisten, terintegrasi, dan tepat sasaran. Sasaran strategis tersebut meliputi:

Sasaran 1 (Pertama) : Meningkatnya pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis elektronik.

Sasaran ini sejalan dengan Misi Gubernur yang termasuk dalam Misi 5 RPJMD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif, sekaligus mendukung RPJMD yang

menekankan digitalisasi pelayanan publik. Dalam konteks Kartu Huma Betang Sejahtera, sasaran ini berperan penting untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial dapat diakses masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.

Hal ini diwujudkan melalui indikator seperti Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi, serta Indeks Pelayanan Publik. Target tahun 2029 menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu SAKIP mencapai angka 83,5, Indeks Reformasi Birokrasi naik menjadi 72,5, dan Indeks Pelayanan Publik mencapai 3,13. Peningkatan ini mencerminkan dorongan reformasi birokrasi yang lebih substantif, dengan birokrasi yang tidak hanya administratif tetapi juga mampu beradaptasi dengan transformasi digital (tabel 3.1).

Sasaran 2 (Kedua) : Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah.

Sasaran ini secara langsung mendukung pencapaian Misi 5 RPJMD Kalimantan Tengah 2025–2029: “Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Kebijakan dan Program Pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045” yaitu dengan Aspek ini terukur melalui indikator penyelesaian sengketa informasi publik, penyusunan produk hukum yang implementatif, serta perlindungan hukum bagi perangkat daerah. Target hingga tahun 2029 antara lain penyelesaian 24 kasus sengketa informasi publik secara non-litigasi, serta konsistensi produk hukum daerah yang implementatif dengan capaian 340 dokumen. Hal ini menggambarkan penguatan tata kelola hukum dan data sebagai fondasi birokrasi modern (tabel 3.1).

Fasilitasi hukum juga mencegah potensi benturan regulasi antara kebijakan daerah dengan peraturan nasional, sehingga setiap produk hukum dan kebijakan daerah tetap harmonis, konsisten, serta tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal ini berimplikasi langsung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena setiap kebijakan memiliki legitimasi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterkaitan dengan Program Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai salah satu kebijakan prioritas Gubernur sebagai berikut :

1. Dukungan hukum yang kuat. Tanpa adanya regulasi yang kokoh dan perlindungan hukum, program ini berisiko menghadapi berbagai potensi sengketa, misalnya terkait validitas penerima manfaat, mekanisme distribusi, atau pengelolaan anggaran.
2. Landasan hukum yang kuat,Sekretariat daerah melalui Biro Hukum berperan dalam memastikan bahwa Kartu Huma Betang Sejahtera memiliki dasar regulasi yang jelas, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, yang mengatur tata cara pelaksanaan, kriteria penerima, hingga mekanisme evaluasi.
3. Perlindungan dari sengketa hukum Dengan adanya mekanisme bantuan hukum, pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera dapat terhindar dari potensi sengketa, baik di bidang administrasi maupun perdata. Misalnya, jika terjadi keberatan dari masyarakat terkait hak kepesertaan, pemerintah daerah sudah memiliki mekanisme penyelesaian yang transparan. Perlindungan hukum akan memastikan bahwa Kartu Huma Betang dapat terus berjalan konsisten meskipun terjadi perubahan dinamika politik, sosial, maupun ekonomi. Program Huma Betang tidak mudah digugat atau dihentikan karena sudah memiliki legitimasi hukum yang kokoh.

Sasaran 3 (ketiga) : Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian Masyarakat

Sasaran ini menekankan pada upaya pemerintah daerah, khususnya Sekretariat Daerah, untuk memperluas akses perlindungan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan berpenghasilan rendah. Perlindungan ekonomi dipahami sebagai seperangkat kebijakan dan program yang berfungsi sebagai “bantalan sosial” (social safety net) yang mampu menjaga daya beli masyarakat, mengurangi risiko kerentanan ekonomi, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi.

Sasaran ini memiliki keterkaitan langsung dengan Misi 1 RPJMD Kalimantan Tengah 2025–2029: **“Meningkatkan Kesejahteraan**

Ekonomi Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal", Capaian ini diukur antara lain dengan Tingkat Inflasi, Inklusi Keuangan, dan kinerja BUMD melalui indikator *Return on Asset (ROA)*. Target tahun 2029 menunjukkan pengendalian inflasi di kisaran 3,45%, inklusi keuangan mencapai 91,82%, serta peningkatan ROA BUMD hingga 2,45%. Dengan demikian, setda berperan dalam mendukung iklim ekonomi yang kondusif melalui kebijakan koordinatif, pengendalian fiskal, serta fasilitasi kerja sama antar pihak (tabel 3.1).

Perlindungan ekonomi memungkinkan masyarakat kecil tetap memiliki daya beli, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif dan bersaing secara sehat. Perlindungan ekonomi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, tetapi juga dirasakan oleh kelompok miskin, rentan, dan marjinal. Dengan perlindungan yang memadai, masyarakat miskin tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi juga memperoleh peluang untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan pendapatan sehingga keluar dari lingkaran kemiskinan.

Keterkaitan dengan Program Prioritas Gubernur Program Huma Betang Sejahtera merupakan instrumen utama untuk mewujudkan perluasan jangkauan perlindungan ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Melalui kartu ini, kelompok miskin dan rentan ekonomi memperoleh akses langsung terhadap bantuan dari program huma betang Sejahtera seperti:

a. Menjaga Daya Beli Masyarakat dengan menyelenggarakan operasi pasar murah
b. Memperluas jangkuan perlindungan dengan mengadakan asuransi petani dan asuransi nelayan sehingga kemandirian ekonomi dapat tumbuh.

Sasaran 4 (Keempat) : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat

Sasaran ini menekankan pentingnya optimalisasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program perlindungan sosial, pelayanan

kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, maupun penanganan kelompok rentan. Efektivitas di sini bermakna bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah.

Sasaran ini sejalan dengan Misi 2 RPJMD Kalimantan Tengah : **"Peningkatan Pendidikan Untuk Sumber Daya Manusia yang Beretika Melalui Pendidikan Inklusif Sesuai dengan Kaidah Belom Bahadat"** karena kesejahteraan rakyat merupakan prasyarat bagi terwujudnya SDM yang berkualitas. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif akan:

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang lebih merata dan terjangkau.
b. Mendorong pencapaian pendidikan yang lebih baik, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka bisa bersaing di masa depan.
c. Menjamin perlindungan sosial bagi kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas, yang akan mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
d. Memberdayakan masyarakat agar lebih produktif secara ekonomi sehingga mampu menopang kemandirian keluarga.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan kesejahteraan rakyat secara langsung mendukung pembangunan manusia Kalimantan Tengah yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga memiliki daya saing di tengah dinamika global.

Keterkaitan dengan Program Prioritas Gubernur Program Huma Betang Sejahtera merupakan salah satu wujud nyata kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, inklusif, dan berkualitas kepada seluruh masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan rentan, melalui dukungan biaya pendidikan, fasilitas belajar, maupun peningkatan mutu tenaga pendidik seperti :

- Memastikan akses pendidikan yang merata dengan satu keluarga satu sarjana.
- Meningkatkan kualitas SDM dengan bantuan sekolah atau kuliah gratis.

Sasaran 5 (Kelima) : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dalam fungsi pemerintahan umum serta administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan

Sasaran ini berfokus pada penguatan fungsi pemerintahan umum, yang mencakup koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk urusan administrasi wilayah dan pertanahan. Penyelenggaraan pemerintahan umum yang tertib dan efektif menjadi prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas pemerintahan, ketertiban sosial, serta kelancaran pembangunan.

Administrasi wilayah dan pertanahan memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan identitas dan legitimasi masyarakat, kejelasan batas-batas wilayah, serta pengelolaan sumber daya pertanahan. Jika tertib administrasi dapat diwujudkan, maka konflik sosial akibat perbedaan batas wilayah maupun sengketa tanah dapat diminimalisir, sehingga tercipta suasana kondusif yang mendukung pembangunan daerah.

Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai program prioritas membutuhkan data administrasi yang valid dan terintegrasi untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Dalam konteks ini, sasaran “penyelenggaraan pemerintahan umum dan administrasi wilayah serta pertanahan” menjadi kunci keberhasilan implementasi program. Validasi penerima manfaat Data kependudukan dan administrasi wilayah yang akurat memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara tepat siapa saja yang berhak menerima Kartu Huma Betang, sehingga program tidak salah sasaran.

Pemetaan wilayah penerima Administrasi pertanahan yang tertib membantu memetakan distribusi penerima manfaat berdasarkan wilayah, termasuk masyarakat di pedalaman, perbatasan, dan komunitas adat, agar bantuan benar-benar menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Mengurangi potensi konflik: Tertib administrasi wilayah dan pertanahan meminimalkan potensi sengketa yang bisa menghambat pelaksanaan program Kartu Huma Betang di lapangan. Data pemerintahan umum, pertanahan, dan wilayah yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah akan memperkuat basis data Kartu Huma Betang sehingga program berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Mekanisme proses penegasan batas daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Penanganan batas daerah dilakukan per segmen batas Kabupten/Kota baik di dalam Wilayah Provinsi maupun batas Kabupaten/Kota dengan Provinsi lain. Khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir tahun 2024, pelaksanaan penegasan batas Daerah sudah secara intens dilakukan.

Pada tahun 2024 sesuai target kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tersebut melalui Tim Penegasan Batas Dearah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Keputusan Gubernur Kalimanta Tengah Nomor : 188.44/78/2024 tentang Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yaitu terfasilitasinya 9 (Sembilan) segmen batas Daerah.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik - Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan - Terciptanya perlindungan pengkajian perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat	Mewujudkan Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	66.00	65,00	66,50	68,00	69,50	71,00	72,50	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	2,67	2,69	2,63	2,75	2,86	3,00	3,13	
			Nilai SAKIP (Angka)	71,00	71,00	73,50	76,00	78,50	81,00	83,50	
		Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi dan Non Litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	Jumlah penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi (Kasus)	12	14	16	18	20	22	24	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparansi dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	70,00	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25	
			Persentase Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta terwujudnya perlindungan Hukum Kepada Semua Unsur Pemerintah (%)	100	100	100	100	100	100	100	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat	Inklusi Keuangan ((%))	87,00	87,74	88,45	89,17	89,89	90,62	91,02	
			Return on Asset (ROA) BUMD (%)	2,30	2,30	2,32	2,34	2,41	2,43	2,45	
			Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang disepakati (%)	0	60	70	75	80	85	90	
			Efektifnya pelaksanaan pengendalian inflasi (Aduan)	0	60	70	75	80	85	90	
			Meningkatnya Kinerja BUMD dan BLUD (%)	0	60	70	75	80	85	90	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	92	92	92	94	94	96	96	
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan umum, serta Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Pertanahan	Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (Dokumen)	1	2	2	2	3	3	3	
			Jumlah Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	1	2	2	3	3	4	4	

3.3 STRATEGI SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH T.A. 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis “Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas”, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan strategi yang sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, sekaligus mendukung implementasi Program Prioritas Gubernur melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera. Strategi Sekretariat Daerah seperti berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis elektronik, arah strateginya yaitu :
   - Digitalisasi pelayanan publik melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
   - Penerapan standar pelayanan publik yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.
   - Optimalisasi monitoring kinerja perangkat daerah dengan indikator SAKIP, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Reformasi Birokrasi.
   - Mendorong budaya kerja birokrasi yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
2. Memperluas jangkauan perlindungan ekonomi untuk mendukung kemandirian masyarakat, arah strateginya yaitu :
   - Koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengendalian inflasi, penyediaan pangan, dan penguatan daya beli masyarakat.
   - Fasilitasi perluasan akses layanan keuangan masyarakat untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan.
   - Optimalisasi peran BUMD dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan *Return on Asset* (ROA).
   - Integrasi program perlindungan ekonomi dengan kebijakan kesejahteraan rakyat agar lebih tepat sasaran.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
   - Memastikan kebijakan pemerintah provinsi dalam bidang kesejahteraan masyarakat berjalan sesuai rencana dan target.

- Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar kebijakan yang dihasilkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

4. Menguatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi wilayah, serta kerja sama pemerintahan dan swasta
   - Fasilitasi peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah dalam bidang perencanaan, ekonomi, sosial, dan layanan publik.
   - Mendorong kerja sama strategis dengan badan usaha/swasta untuk mendukung investasi dan pembangunan daerah.
   - Memperkuat fungsi koordinasi dan pembinaan administrasi wilayah serta pertanahan agar lebih tertib dan efisien.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta dukungan pelayanan kegiatan pimpinan daerah
   - Penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur yang memadai dan modern untuk mendukung efektivitas pelayanan.
   - Optimalisasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan pimpinan melalui sistem berbasis digital.
   - Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, adil, dan akuntabel sesuai prinsip value for money.

Dengan strategi-strategi tersebut, Sekretariat Daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan arah pembangunan daerah. Strategi ini menjamin bahwa tujuan RPJMD 2025-2029 dapat dicapai, sekaligus memastikan program prioritas Gubernur melalui Kartu Huma Betang Sejahtera berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Penahapan pembangunan tahunan yang disusun secara sistematis berdasarkan tujuan sasaran dan strategi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2026 hingga 2030. Penahapan ini diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD 2025-2029 dan

mendukung keberhasilan Program Prioritas Gubernur Kartu Huma Betang Sejahtera.

Tahap I (Tahun 2026): Fondasi Penguatan Sistem dan Data

Pada tahap awal, fokus pembangunan diarahkan pada penyusunan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan. Penyusunan roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan untuk mengawali digitalisasi layanan dasar, termasuk administrasi dan pelaporan. Di bidang hukum, Sekretariat Daerah memperkuat kelembagaan bantuan hukum sebagai dasar dalam memberikan advokasi bagi perangkat daerah. Pada bidang kesejahteraan rakyat, database terpadu mulai dibangun untuk memetakan kebutuhan dan kelompok sasaran prioritas. Sementara itu, pendataan awal penerima manfaat perlindungan ekonomi serta pemetaan administrasi wilayah dan pertanahan dilakukan sebagai pijakan awal perencanaan. Pada saat yang sama, penataan kelembagaan dan analisis jabatan ASN dilakukan agar penempatan aparatur lebih sesuai dengan kompetensi. Tahap ini membangun landasan penting untuk transformasi digital, tata kelola pemerintahan, dan validasi data Kartu Huma Betang Sejahtera.

Tahap II (Tahun 2027): Implementasi dan Integrasi Sistem

Memasuki tahap kedua, fokus diarahkan pada implementasi dan integrasi sistem. SPBE mulai diterapkan secara terintegrasi antar-OPD, sehingga koordinasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berjalan lebih efisien. Dalam bidang hukum, Sekretariat Daerah menyusun SOP bantuan hukum bagi perangkat daerah, sekaligus mulai melaksanakan penyelesaian sengketa hukum dengan pendekatan litigasi dan non-litigasi. Database kesejahteraan rakyat diintegrasikan dengan data dari berbagai OPD, sehingga perumusan kebijakan sosial lebih berbasis bukti. Program perlindungan ekonomi dasar mulai diimplementasikan, ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan. Administrasi wilayah juga mulai ditata untuk memperkuat ketertiban pemerintahan umum. Pada aspek aparatur, pelatihan teknis dan kompetensi dasar ASN mulai diperluas. Tahap ini menandai dimulainya implementasi nyata transformasi birokrasi dan mendukung

penguatan layanan dasar dalam kerangka Kartu Huma Betang Sejahtera.

Tahap III (Tahun 2028): Optimalisasi Layanan dan Kebijakan

Tahap ketiga difokuskan pada optimalisasi seluruh sistem yang telah dibangun. Layanan publik berbasis digital diperluas dan ditingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan. Produk hukum daerah mulai diarahkan pada penyelesaian masalah kebijakan pembangunan melalui regulasi yang implementatif dan responsif. Kebijakan kesejahteraan rakyat diimplementasikan secara penuh berbasis database terpadu, sehingga bantuan sosial dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran. Program perlindungan ekonomi diperluas dengan mengintegrasikannya bersama pemberdayaan UMKM dan usaha produktif masyarakat. Administrasi wilayah dan pertanahan mulai diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan, mendukung ketepatan sasaran penerima Kartu Huma Betang. Pada aspek aparatur, pelatihan manajerial dan kepemimpinan mulai diperkuat sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tahap ini memperlihatkan hasil nyata transformasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahap IV (Tahun 2029): Evaluasi dan Penyempurnaan

Pada tahap keempat, fokus diarahkan pada evaluasi dan penyempurnaan sistem yang telah berjalan. SPBE yang telah diterapkan di seluruh perangkat daerah dievaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, kemudian dilakukan perbaikan untuk mendukung integrasi layanan publik. Evaluasi regulasi dilakukan untuk menilai sejauh mana produk hukum yang ada sudah mendukung pelaksanaan program pembangunan. Kebijakan kesejahteraan rakyat dievaluasi dari segi efektivitas dan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perlindungan ekonomi diperluas jangkauannya, dengan menjangkau lebih banyak kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas. Administrasi wilayah diarahkan untuk penyelesaian potensi konflik pertanahan dan perbatasan. Reformasi birokrasi dievaluasi secara menyeluruh untuk mengukur dampak budaya kerja baru yang

telah diterapkan. Tahap ini memastikan konsistensi pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera dalam mendukung ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tahap V (Tahun 2030): Konsolidasi dan Standardisasi Nasional

Tahap terakhir difokuskan pada konsolidasi dan pencapaian standar nasional. Sistem SPBE yang telah dijalankan ditingkatkan hingga memenuhi standar nasional dan siap direplikasi di seluruh daerah. Produk hukum yang dihasilkan diarahkan agar lebih adaptif terhadap perkembangan global dan dinamika nasional, sehingga tetap relevan dan kuat dalam mendukung kebijakan daerah. Kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dan berhasil dievaluasi kemudian direplikasi sebagai best practice di bidang sosial. Perlindungan ekonomi masyarakat diperkuat menuju kemandirian ekonomi, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Administrasi wilayah dan pertanahan dikonsolidasikan sebagai basis data pembangunan jangka panjang, mendukung kepastian hukum dan stabilitas sosial. Reformasi birokrasi mencapai tahap konsolidasi merit system sehingga penempatan, promosi, dan pengembangan aparatur sepenuhnya berbasis kompetensi. Tahap ini memastikan Sekretariat Daerah mampu mengawal implementasi RPJMD 2025-2029 sekaligus menjadikan Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Secara sistematis dapat dilihat dari tabel disebelah ini:

Tabel 3.2 PENAHAPAN PEMBANGUNAN RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III(2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Meningkatnya pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis digital	Penyusunan roadmap SPBE & digitalisasi layanan dasar	Implementasi SPBE terintegrasi lintas OPD	Optimalisasi layanan publik digital	Evaluasi & penyempurnaan SPBE	Penerapan SPBE setara standar nasional
Tersedianya bantuan hukum & penyelesaian sengketa litigasi-non-litigasi bagi OPD	Penguatan kelembagaan bantuan hukum	Penyusunan SOP & mekanisme bantuan hukum	Implementasi penyelesaian sengketa non-litigasi	Evaluasi efektivitas regulasi & advokasi	Produk hukum adaptif & responsif
Meningkatnya efektivitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Penyusunan database kesejahteraan rakyat	Integrasi data kesejahteraan lintas OPD	Implementasi kebijakan berbasis data terpadu	Evaluasi capaian & dampak kebijakan sosial	Replikasi best practice kebijakan kesejahteraan
Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi masyarakat	Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi masyarakat	Implementasi perlindungan ekonomi dasar	Integrasi perlindungan dengan pemberdayaan UMKM	Perluasan cakupan kelompok miskin & rentan	Evaluasi & penguatan kemandirian ekonomi masyarakat
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum serta administrasi wilayah & pertanahan	Pemetaan & pendalaman administrasi wilayah/pertanahan	Penataan administrasi pemerintahan dasar	Integrasi data wilayah dengan perencanaan pembangunan	Penyelesaian konflik wilayah & pertanahan	Konsolidasi data wilayah sebagai basis pembangunan
Penguatan kapasitas kelembagaan & SDM aparatur	Penataan kelembagaan & analisis jabatan/formasi ASN	Pelatihan kompetensi teknis & dasar ASN	Peningkatan kapasitas manajerial & kepemimpinan	Evaluasi capaian reformasi birokrasi	Penerapan merit system berkelanjutan

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

3.5 ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH T.A. 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis “Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas”, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan arah kebijakan yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029, mendukung visi dan misi Gubernur, serta memperkuat implementasi Program Prioritas Gubernur Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Arah kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kesejahteraan rakyat, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan marjinal.

Pertama, pada sasaran meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi digital. Arah kebijakan difokuskan pada percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dengan basis data penerima manfaat KHBS. Digitalisasi tata kelola ini memastikan bahwa data penerima manfaat dapat dipadukan ke dalam satu sistem, sehingga distribusi bantuan sosial, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan lebih transparan, tepat sasaran, serta mudah diawasi publik. Selain itu, penguatan instrumen kinerja seperti SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik menjadi alat ukur keberhasilan reformasi birokrasi. Dengan demikian, transformasi digital yang ditempuh bukan sekadar memperbaiki prosedur administratif, tetapi juga mendukung keberhasilan KHBS sebagai program perlindungan sosial utama di Kalimantan Tengah.

Kedua, pada sasaran tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa litigasi maupun non-litigasi bagi perangkat daerah. Arah kebijakan menekankan pentingnya penyusunan produk hukum daerah yang harmonis, konsisten, dan selaras dengan regulasi nasional. Landasan hukum yang kokoh menjadi syarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera agar

memiliki kepastian hukum, baik melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur. Sekretariat Daerah melalui Biro Hukum juga menyediakan fasilitasi bantuan hukum ketika terjadi sengketa, baik terkait data penerima manfaat maupun mekanisme distribusi bantuan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, pelaksanaan KHBS tidak mudah terganggu oleh konflik administrasi maupun sosial, sehingga masyarakat memiliki kepastian serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan akuntabel.

Ketiga, pada sasaran perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk mendukung kemandirian masyarakat, arah kebijakan diarahkan pada penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi, menjaga ketersediaan pangan, serta memperkuat daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan instrumen Kartu Huma Betang Sejahtera melalui Biro Perekonomian melaksanakan kegiatan seperti operasi pasar sembako murah. Sekretariat Daerah juga mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat hingga 91,82% pada tahun 2029, dengan memfasilitasi akses layanan keuangan yang lebih mudah, terutama bagi kelompok miskin. Di samping itu, peran BUMD dioptimalkan untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan *Return on Asset (ROA)*, sekaligus memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat. Perlindungan ekonomi ini menjadi bantalan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga memperoleh peluang untuk bangkit secara mandiri.

Keempat, pada sasaran meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, arah kebijakan difokuskan pada pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, sehingga kebijakan yang dilaksanakan benar-benar terukur manfaatnya. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera pada bidang pendidikan seperti program sekolah/kuliah gratis dan target satu keluarga satu sarjana. Sekretariat Daerah memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan lintas sektor tidak hanya administratif, melainkan memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui integrasi

kebijakan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial ke dalam Kartu Huma Betang Sejahtera, pemerintah daerah berkomitmen agar kesejahteraan rakyat meningkat secara nyata, adil, dan merata.

Kelima, pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum serta administrasi wilayah dan pertanahan, arah kebijakan diarahkan pada penguatan data kependudukan, wilayah, dan pertanahan yang valid, akurat, dan terintegrasi dengan basis data Kartu Huma Betang Sejahtera. Hal ini penting agar penerima manfaat benar-benar teridentifikasi dengan tepat, terutama masyarakat di desa, pedalaman, perbatasan, maupun komunitas adat. Sekretariat Daerah juga memfasilitasi percepatan penegasan batas daerah sesuai regulasi nasional, sehingga tidak ada lagi konflik wilayah yang menghambat distribusi bantuan.

Dengan arah kebijakan tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai integrasi dan pengendali kebijakan lintas sektor. Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk mendukung secara langsung pencapaian RPJMD 2025–2029, sekaligus memastikan bahwa Program Kartu Huma Betang Sejahtera berjalan efektif, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi, serta memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Seluruh program dan kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, mendukung koordinasi pembangunan lintas sektor, serta menunjang pelayanan administrasi pemerintahan yang efisien dan transparan.

TABEL 4.1

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah							
- Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat - Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan - Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik	Mewujudkan Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik			Indeks Pelayanan Publik (Angka)		
					Nilai SAKIP (Angka)		
			Terlaksanianya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Organisasi		Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Penggadministrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik		indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
				Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan	
				Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	
		Tersedianya pertimbangan bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi dan Non Litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi (Kasus)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terlaksanannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Hukum		Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersusunnya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.6008 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksanannya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Keperluan untuk kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksanannya penyediaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksanannya penyediaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksanannya penyediaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Mewujudkan Produk Hukum Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang Implementatif dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Tersedianya Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi dan Non Litigasi, Layanan Hukum, dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Bagi Perangkat Daerah dan Aparatur		Persentase terwujudnya Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang implementatif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigasi, layanan hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur (%)	4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
				Terwujudnya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah dan meningkatkan pelaksanaan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(09)
				Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi, Non Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
		Terlaksananya penyusunan Produk Hukum Daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan dan Penetapan			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
					Persentase Terlaksanaya Produk Hukum Daerah Yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta terwujudnya perlindungan Hukum Kepada Semua Unsur Pemerintah (%)		
			Terlaksanaya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Hukum		Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Keperluan untuk kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksanannya penyediaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksanannya penyediaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksanannya penyediaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Mewujudkan Produk Hukum Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang Implementatif dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Tersedianya Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi dan Non Litigasi, Layanan Hukum, dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Bagi Perangkat Daerah dan Aparatur		Persentase terwujudnya Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang Implementatif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigasi, layanan hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur (%)	4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah dan meningkatkan pelayanan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	
				Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi, Non Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
		Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat			Inklusi Keuangan ((%))		
					Return on Aset (ROA) BUMD (%)		
					Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang disiapkan (%)		
					Efektifnya pelaksanaan pengendalian inflasi (Aduan)		
					Meningkatnya Kinerja BUMD dan BLUD (%)		
			Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Perekonomian		Persentase Ketierlaksanaan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perimcanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Jumlah Dokumen Perekonomian dan Pembangunan		Tingkat Inflasi (%)	4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Return on Asset (ROA) BUMD (%)	4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Inklusi Keuangan ((%))	4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	4.01.06.1.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	
				Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	4.01.06.1.02.0002 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	4.01.06.1.02.0003 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	4.01.06.1.03.0002 - Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	4.01.06.1.03.0004 - Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)		
			Terlaksanaya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Kewajiberasan Rakyat		Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 . PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksanannya / Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Kesra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksanannya / Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Biro Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Keisra	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kegiatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.08.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.08.0002 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Efektifitas Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
					Jumlah Lembaga Binaan Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
				Jumlah Dokumen Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	4.01.04.1.02.0001 - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	4.01.04.1.02.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
				Jumlah Dokumen Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	4.01.04.1.03 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	4.01.04.1.03 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.04.1.03 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	4.01.04.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	4.01.04.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan umum, serta Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Pertanahan			Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (Dokumen)		
					Jumlah Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)		
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Persentase Ketertaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.09.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tertaksanainya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama		Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
				Pengelola Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	4.01.03.1.01.0002 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
				Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1.01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah	
				Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	4.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengembangan Otonomi dan Penata Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	4.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.03.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
				Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.03.1.02.0004 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	
				Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
		Tercapainya target data pelaporan pembangunan dan capaian realisasi anggaran yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Pembangunan		Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksanannya Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksanannya Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Pelaporan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	4.01.08.1.01.0002 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	4.01.08.1.01.0003 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	
				Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	4.01.08.1.02.0001 - Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	4.01.08.1.02.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.08.1.02.0003 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	
		Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan yang Sesuai dengan Prinsip Pengadaan			Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)		
			Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Biro PBJ	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Bahan Peningkatan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.01.01.1.05.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan administrasi barang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terwujudnya Peningkatan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
					Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
				Persentase Pelayanan Pemilihan yang tepat waktu sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) di kalteng yang memenuhi level kematangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Umum		Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0005 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0006 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.1.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.1.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Umum		Persentase Ketersiapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersusunnya Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.1.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.1.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
		Terpenuhinya Perencanaan Setda, Kepegawaian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Serta Pelayanan Kegiatan Pimpinan			Terlaksananya Fasilitasi Multi dan Komunikasi Pimpinan (Kegiatan)		
					Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan (Kegiatan)		
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Pimpinan		Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Keperluan untuk kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan	

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksanannya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	
				Terlaksanannya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	4.01.01.1.14.0001 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	

4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini menjadi landasan utama penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah. Tujuannya adalah memastikan keberlangsungan layanan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, hingga pelayanan umum. Program ini juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil Pembangunan. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

   Kegiatan ini bertujuan memastikan tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan kinerja perangkat daerah secara terintegrasi. Sub kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi penyusunan RKA dan DPA beserta perubahannya, serta penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi perangkat daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud perencanaan yang konsisten, penganggaran yang efektif, dan evaluasi yang objektif terhadap kinerja SKPD.

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

   Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sub kegiatan meliputi koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, hingga laporan akhir tahun perangkat daerah, serta analisis prognosis realisasi anggaran. Melalui administrasi keuangan yang tertib, diharapkan dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**

   Kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi aset daerah. Sub kegiatan meliputi penatausahaan barang milik daerah pada setiap SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk memastikan aset daerah tercatat, terkelola, dan termanfaatkan secara optimal.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan sumber daya aparatur, baik dari sisi administrasi maupun peningkatan kompetensi. Sub kegiatan mencakup pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi kinerja pegawai. Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas SDM aparatur semakin meningkat dan mendukung kinerja birokrasi.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional kelembagaan, terutama terkait sarana prasarana dan pelayanan administrasi umum. Sub kegiatan yang dilakukan meliputi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengelolaan barang cetakan, pelaksanaan rapat koordinasi, penatausahaan arsip dinamis, serta dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini mendukung operasional perkantoran melalui penyediaan berbagai jasa penunjang. Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain jasa surat menyurat, jasa komunikasi, jasa utilitas (listrik, air, dan lain-lain), serta jasa pelayanan umum perkantoran.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan keberlangsungan fungsi sarana prasarana pemerintah. Sub kegiatan meliputi pemeliharaan, pembayaran pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional, serta pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

8. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran komunikasi dan penyusunan materi bagi pimpinan daerah. Sub kegiatan meliputi fasilitasi komunikasi pimpinan, sehingga kebutuhan koordinasi,

informasi, dan penyusunan bahan kerja pimpinan dapat terlaksana dengan baik.

9. Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung efektivitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Sub kegiatan meliputi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah terkait pengadaan, serta koordinasi penyusunan RKA/DPA beserta perubahannya.

Selain program penunjang, Sekretariat Daerah juga menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang berfungsi mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

TABEL 4.2

DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah				
1	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
			4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
2	4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
			4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
			4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
			4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
			4.01.04.1.02.0001 - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
			4.01.04.1.03 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
			4.01.04.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	
3	4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Perekonomian dan Pembangunan	4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
			4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	

4.2. Program Penataan Organisasi

Berorientasi pada penguatan kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Subkegiatan seperti **pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi**

menjadi fondasi pelaksanaan misi RPJMD ke-3, yaitu *"mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan inovatif."* Program ini mendukung nilai *Kalteng Bermartabat*, khususnya dalam aspek tata pemerintahan yang berintegritas dan profesional, serta beririsan dengan pilar *Betang Harmoni* yang menekankan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pelayanan publik.

4.3 Program Kesejahteraan Rakyat

Melalui Program Kesejahteraan Rakyat, Program ini memiliki outcome "efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat" melalui fasilitasi bidang **spiritual, sosial, pendidikan, kepemudaan, dan kebudayaan**.

Keterkaitannya sangat erat dengan *Betang Makmur* dan *Betang Harmoni*, yang menekankan penguatan kesejahteraan sosial dan harmoni kehidupan masyarakat. Sub kegiatan seperti *pengelolaan sarana dan prasarana spiritual* serta *fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dan non-pelayanan dasar* juga mendukung pelaksanaan **program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS)** dalam aspek perlindungan sosial adaptif, bantuan langsung tunai, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan Masyarakat.

4.4. Program Perekonomian dan Pembangunan

Berfokus pada pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian makro daerah. Program ini mendukung misi pertama RPJMD yaitu *"meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya lokal"* serta pilar *Betang Maju*, yang mendorong transformasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur strategis dan digitalisasi ekonomi. Peran Setda dalam koordinasi kebijakan ekonomi juga memperkuat fungsi pengendalian inflasi, investasi daerah, dan sinergi lintas sektor, yang sejalan dengan upaya menjaga **stabilitas ekonomi makro daerah** sebagaimana diatur dalam sasaran RPJMD bidang perekonomian.

Keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dirancang untuk memperkuat fungsi

koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan program yang konsisten, Sekretariat Daerah berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara umum, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah diarahkan untuk:

1. Menjamin tersedianya dokumen perencanaan, laporan kinerja, administrasi keuangan, dan pengelolaan aset secara tertib dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
3. Menyediakan layanan administrasi umum, jasa penunjang, serta pemeliharaan aset guna mendukung kelancaran operasional pemerintahan.
4. Memfasilitasi komunikasi pimpinan, penguatan layanan pengadaan barang/jasa, serta koordinasi lintas sektor dalam pembangunan daerah.
5. Melaksanakan sub kegiatan prioritas yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas RPJMD di bidang kelembagaan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi.

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0.01 - SEKRETARIAT DAERAH				216.955.984.817,59		323.650.346.076,60		321.076.883.940,32		349.827.719.237,21		388.071.053.865,42		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100.344.916.825,54		166.884.341.764,73		207.993.914.417,31		216.204.760.547,19		230.719.439.880,97		
Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Pembangunan	Persentase Ketersediaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100	1.752.874.845,01	100	1.815.975.164,35	100	1.891.028.790,91	100	1.974.222.320,21	100	2.071.773.356,69	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				620.206.357,54		648.048.214,91		1.047.356.199,55		1.185.616.583,85		1.332.765.994,73		
terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	26.466.700,00	1	41.966.100,00	1	46.080.190,00	1	55.969.100,00	1	62.966.192,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.408.600,00		6.908.600,00		8.908.600,00		10.908.600,00		11.908.600,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	6.408.600,00	2	6.908.600,00	2	8.908.600,00	2	10.908.600,00	2	11.908.600,00		
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				5.612.500,00		6.112.500,00		7.112.500,00		9.112.500,00		9.112.500,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.612.500,00	1	6.112.500,00	1	7.112.500,00	1	8.112.500,00	1	9.112.500,00		
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.215.500,00		5.715.500,00		6.715.500,00		7.715.500,00		8.715.500,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.216.500,00	1	5.715.500,00	1	6.715.500,00	1	7.715.500,00	1	8.715.500,00		
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.596.500,00		5.096.500,00		6.096.500,00		7.096.500,00		8.096.500,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.596.500,00	1	5.096.500,00	1	6.096.500,00	1	7.096.500,00	1	8.096.500,00		
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.596.250,00		5.096.500,00		7.096.000,00		8.096.000,00		9.096.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.596.250,00	1	6.096.500,00	1	7.096.000,00	1	8.096.000,00	1	9.096.000,00		
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.145.000,00		5.645.000,00		6.645.000,00		7.645.000,00		8.645.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	5.145.000,00	2	5.645.000,00	2	6.645.000,00	2	7.645.000,00	2	8.645.000,00		
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.920.000,00		4.420.000,00		5.420.000,00		6.420.000,00		7.420.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	3.920.000,00	1	4.420.000,00	1	5.420.000,00	1	6.420.000,00	1	7.420.000,00		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				60.405.673.004,33		69.208.693.749,50		80.440.984.207,73		93.352.470.408,31		99.561.339.648,52		
Terlaksananya Laporan Keuangan Dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.050.000,00	1	3.550.000,00	1	5.550.000,00	1	7.550.000,00	1	9.550.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.525.000,00		2.025.000,00		2.525.000,00		3.525.000,00		4.525.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.525.000,00	1	2.025.000,00	1	2.525.000,00	1	3.525.000,00	1	4.525.000,00		
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1.525.000,00		2.025.000,00		2.525.000,00		3.525.000,00		4.525.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1.525.000,00	1	2.025.000,00	1	2.525.000,00	1	3.525.000,00	1	4.525.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.218.940.000,00		2.229.475.184,42		3.341.759.684,56		3.461.273.691,68		3.631.835.989,50		
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3	7	120.940.000,00	7	130.440.000,00	8	140.335.500,00	9	147.929.300,00	10	153.335.500,00		
4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120.940.000,00		130.440.000,00		140.335.500,00		147.929.300,00		153.335.500,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3	7	120.940.000,00	7	130.440.000,00	8	140.335.500,00	9	147.929.300,00	10	153.335.500,00		
4.01.01.1.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.774.489.054,00		22.101.978.817,44		22.843.656.968,21		23.123.554.374,48		23.408.074.683,38		
Terlaksananya Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Pendukungan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.082.327.388,00	1	1.372.920.864,05	1	1.117.090.090,01	1	1.156.606.525,21	1	1.191.401.700,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1				1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.090.300,00		411.885.309,05		421.685.300,00		432.085.505,00		442.085.500,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	400.085.300,00	2	411.885.309,05	2	421.685.300,00	2	432.085.300,00	2	442.085.300,00		
4.01.01.1.08.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				46.426.600,00		47.426.600,00		54.426.600,00		59.426.605,00		64.426.600,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	46.426.600,00	1	47.426.600,00		54.426.600,00	1	59.426.605,00	1	64.426.600,00		
4.01.01.1.08.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				425.827.707,00		440.827.300,05		454.858.700,00		468.604.505,00		474.845.700,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	425.827.707,00	1	440.827.300,00	1	454.858.700,00	1	468.604.500,00	1	474.845.700,00		
4.01.01.1.08.0010 - Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.800.000,00		12.300.000,00		13.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	10.800.000,00	1	12.300.000,00	1	13.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00		
4.01.01.1.08.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				160.166.791,00		180.600.964,35		173.102.406,21		180.488.820,21		180.039.196,88		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]		
4.01.01.1.09 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disebiakan (Laporan)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]		
4.01.01.1.09.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disebiakan (Laporan)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rendaman Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	14	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	26		26		27		28		30			
4.01.01.1.09.0022 - Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	14	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]		
4.01.01.1.09.0026 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	26	[illegible]	26	[illegible]	27	[illegible]	28	[illegible]	30	[illegible]		
Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Kesekretariatan Rakyat	Persentase Kelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]		
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya / Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Kesra	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	12		12		12		12		12			

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4		4		4		4		4			
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.1.01.0030 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terlaksananya / Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Bln/ Kwrtl	Jumlah Laporan Kesesjalan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.1.03.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.1.22.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	6		6		6		6		6			
4.01.01.1.22.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	6	10.000.000.00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00		
4.01.01.1.02 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				874.750.000,00		1.050.000.000,00		1.170.000.000,00		1.404.000.000,00		1.324.000.000,00		
Terinventarisirnya Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Kesra	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
4.01.01.1.03.0006 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
4.01.21.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.219.040.000,00		2.208.473.184,40		3.341.756.594,88		3.481.273.985,85		3.631.595.988,50		
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kegiatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	4		4		4		4		4			
4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
4.01.21.1.88 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.374.485.054,00		22.141.978.817,44		23.943.656.485,21		25.123.559.374,45		25.436.014.683,18		
Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Paket Penataan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	1.952.280.000,00	3	1.675.000.000,00	3	2.100.000.000,00	3	2.100.000.000,00	3	2.250.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		112		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				752.280.000,00		775.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	752.280.000,00	3	775.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00		
4.01.01.1.08.0025 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01.01.1.08.0055 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	112	1.000.000.000,00	12	1.100.000.000,00		
4.01.01.1.00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.606.273.332,00		22.965.435.477,56		24.006.473.850,67		25.001.486.836,57		26.476.870.886,00		
Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.000.000.000,00	12	1.100.000.000,00	12	900.959.938,85	12	963.135.990,52	12	951.350.953,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.08.0021 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.01.01.1.08.0302 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
4.01.01.1.08.0303 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				450.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		575.000.000,00		575.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	450.000.000,00	12	475.000.000,00	12	475.000.000,00	12	575.000.000,00	12	575.000.000,00		
4.01.01.1.08.0304 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				800.000.000,00		800.000.000,00		400.959.938,85		963.135.990,52		951.350.953,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	400.959.938,85	12	963.135.990,52	12	951.350.953,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Organisasi	Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]		
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]		
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terselenggaranya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. (Orang)	0	10	[illegible]	10	[illegible]	10	[illegible]	10	[illegible]	10	[illegible]		
4.01.01.1.05.0050 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. (Orang)	0	10	[illegible]	10	[illegible]	10	[illegible]	10	[illegible]	10	[illegible]		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penataan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	[illegible]	11	[illegible]	11	[illegible]	11	[illegible]	11	[illegible]		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penataan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	[illegible]	11	[illegible]	11	[illegible]	11	[illegible]	11	[illegible]		
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]		
4.01.01.1.06.0029 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
[illegible] - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]		
[illegible] - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]		
[illegible] - Fasilitasi Materi dan Sinkronisasi Program				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terwujudnya Materi dan Sinkronisasi Program	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Program (Laporan)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]		
[illegible] - Fasilitasi Komunikasi Program				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Program	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Program (Laporan)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]		
Terlaksananya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Keterlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible] - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Jumlah Dokumen Perencanaan Bhn PBJ	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
[illegible] - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)													
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Tersedianya Bahan Pertanggung-jawaban dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)													
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Rekapan dan Analisa Progress Realisasi Anggaran (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)													
4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00	1	165.000.000,00	1	180.000.000,00	1	174.000.000,00		
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terwedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		0		0		0		
Terwedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		
4.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran				0		0		0		0		0		
Terwedianya Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran (Dokumen)			0		0		0		0		0		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.218.940.000,00		2.329.472.184,40		2.341.759.504,88		3.461.273.985,88		3.831.835.980,70		
Terwedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	7	500.000.000,00	7	500.000.000,00	6	415.000.000,00	5	492.000.000,00	5	492.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			0		0		0		0		0		
4.01.01.1.05.0200 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				400.000.000,00		400.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	7	400.000.000,00	7	400.000.000,00	6	350.000.000,00	5	350.000.000,00	5	350.000.000,00		
4.01.01.1.05.0210 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	125.000.000,00	100	132.000.000,00	100	132.000.000,00		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.174.459.054,00		22.191.905.917,44		22.643.656.045,21		23.125.559.574,46		23.406.014.683,18		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemerintah sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]		
	Jumlah Paket Penataan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Penataan dan Perlengkapan Kantor				226.259.750,00		229.259.169,00		225.000.000,00		285.000.000,00		300.259.672,00		
Tersedianya Penataan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penataan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	226.259.750,00	1	229.259.169,00	1	225.000.000,00	1	285.000.000,00	1	300.259.672,00		
4.01.01.1.09.0020 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000,00		100.000.000,00		113.880.170,00		113.880.170,00		113.880.170,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	113.880.170,00	1	113.880.170,00	1	113.880.170,00		
4.01.01.1.09.0058 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
4.01.01.1.09.0000 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.000.000,00		670.029.401,80		692.304.760,38		700.000.000,00		780.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	650.000.000,00	1	670.029.401,80	1	692.304.760,38	1	700.000.000,00	1	780.000.000,00		
4.01.01.1.27 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.600.000.000,00		11.835.000.000,00		23.580.000.000,00		11.823.309.237,97		79.414.888.028,63		
pemeliharaan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
4.01.01.1.27.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.000.000,00		105.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
4.01.01.1.09 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.896.273.532,00		22.985.436.477,58		24.006.473.580,97		26.504.986.836,57		26.478.870.888,20		
Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan surat menyurat, keamanan, kepegawaian, kearsipan dan administrasi lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penelpon dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	111.000.000,00	1	122.894.723,21	1	122.894.723,85		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.000.000,00		70.000.000,00		76.000.000,00		77.694.722,21		77.694.722,85		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	76.000.000,00	1	77.694.725,21	1	77.694.722,85		
Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Perekonomian	Persentase Kelaikfungsian (%)	90	90	740.000.000,00	92	749.948.521,57	96	765.512.544,57	98	814.550.248,36	100	854.701.200,03		
4.01.01.1.01 - Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				829.206.500,54		846.046.214,91		1.047.358.899,55		1.198.815.563,85		1.332.765.944,73		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
4.01.01.1.01.0026 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				88.425.610.984,00		89.208.650.742,89		90.440.894.207,79		92.053.470.400,31		90.591.029.848,82		
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.01.01.1.05.- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.218.640.000,00		2.329.473.184,42		3.241.750.604,58		3.461.273.684,69		3.831.555.386,50		
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berbasiskan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	24	36	20.000.000,00	28	20.000.000,00	50	30.000.000,00	36	35.000.000,00	58	40.000.000,00		
4.01.01.1.05.0020 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasiskan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasiskan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berbasiskan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	24	36	20.000.000,00	58	25.000.000,00	58	30.000.000,00	36	35.000.000,00	58	40.000.000,00		
4.01.01.1.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.174.469.054,00		22.101.978.617,44		22.642.556.985,01		23.123.558.574,48		23.409.074.883,18		
Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	370.000.000,00	1	374.948.521,57	1	285.512.544,57	1	408.550.249,36	1	415.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
4.01.01.1.08.0005 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
4.01.01.1.08.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				270.000.000,00		274.948.521,57		285.512.544,57		298.550.249,36		300.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	270.000.000,00	1	274.948.521,57	1	285.512.544,57	1	298.550.249,36	1	300.000.000,00		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah				24.595.273.332,00		22.955.425.477,56		24.095.473.865,07		25.001.466.636,57		26.479.670.866,00		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	209.701.200,00		
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		209.701.200,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	209.701.200,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.152.460.324,33		27.244.958.328,62		15.429.660.643,34		35.722.616.584,67		35.920.485.782,20		
Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	60	135.026.760,00	60	135.053.960,00	60	149.059.005,00	60	155.005.005,00	60	170.500.700,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10		10		10		10		10			
4.01.01.1.09.0011 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	100.000.000,00		
4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.000.000,00		55.000.000,00		63.059.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	60	55.000.000,00	60	55.000.000,00	60	60.000.000,00	60	65.000.000,00	60	70.000.000,00		
Terselenggaranya Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Umum	Persentase Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100	177.036.742.494,33	100	179.400.900.348,95	100	186.710.956.807,40	100	189.013.203.901,27	100	204.550.460.939,95		
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				820.206.350,59		948.948.214,91		1.047.356.386,55		1.100.816.583,89		1.312.765.946,13		
Tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	10	175.000.350,00	10	175.000.350,00	15	231.250.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	10		10		10		20		20			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Penetapan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		3		3		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]		
[illegible] Penyusunan RKA-SKPD				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	[illegible]	2	[illegible]	3	[illegible]	3	[illegible]	3	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	[illegible]	2	[illegible]	3	[illegible]	3	[illegible]	3	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	19	19	[illegible]	19	[illegible]	19	[illegible]	20	[illegible]	20	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	10	[illegible]	10	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16	16	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]		
	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	500	500		500		500		500		500			
4.01.01.1.02.0001 - Penyelitaan Gaji dan Tunjangan ASN				97.715.480.994,00		88.486.520.748,95		89.573.854.307,40		89.572.340.401,27		89.572.340.401,27		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	500	500	97.715.480.994,00	500	88.486.520.748,95	500	89.573.854.307,40	500	89.572.340.401,27	500	89.572.340.401,27		
4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		221.000.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	221.000.000,00	1	220.000.000,00		
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	50.000.000,00	18	70.000.000,00	18	100.000.000,00	18	120.000.000,00	18	120.000.000,00		
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				974.750.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.320.000.000,00		1.474.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	974.750.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.100.000.000,00	2	1.320.000.000,00	2	1.474.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pemonelasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	0		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				77.250.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		35.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	77.250.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	35.000.000,00	2	30.000.000,00		
4.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		860.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	700.000.000,00	2	600.000.000,00		
4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				100.000.000,00		120.000.000,00		175.000.000,00		194.000.000,00		194.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	175.000.000,00	2	194.000.000,00	2	194.000.000,00		
4.01.01.1.03.0006 - Rehabilitasi/Harkat Barang Milik Daerah pada SKPD				307.500.000,00		380.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi/Harkat Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rehabilitasi/Harkat Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	307.500.000,00	2	380.000.000,00	2	425.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.299.940.000,00		2.229.473.184,43		3.341.759.504,56		3.461.275.995,68		3.831.935.985,50		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	1	1.800.000.000,00	2	800.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.078.000.000,00	1	2.300.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	10		10		10		10		10			
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.000.000.000,00		0,00		1.100.000.000,00		1.080.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terwujudnya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	1	1.000.000.000,00	2	0,00	1	1.100.000.000,00	1	1.080.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
4.01.01.1.05.0004 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				800.500.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		596.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	10	800.000.000,00	10	500.000.000,00	10	600.000.000,00	10	596.000.000,00	10	600.000.000,00		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.174.469.654,00		22.101.978.617,44		22.643.656.985,21		23.123.559.374,48		23.496.074.983,15		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Konstruksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	11.753.820.000,00	4	13.045.000.000,00	4	14.240.000.000,00	4	14.350.000.000,00	4	14.240.820.000,00		
	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Aset-Aset Diversi pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				625.000.000,00		680.000.000,00		700.000.000,00		715.000.000,00		710.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	625.000.000,00	4	680.000.000,00	4	700.000.000,00	4	715.000.000,00	4	710.000.000,00		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				810.000.000,00		825.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		810.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	810.000.000,00	4	825.000.000,00	4	850.000.000,00	4	850.000.000,00	4	810.000.000,00		
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				633.620.000,00		645.000.000,00		525.000.000,00		645.000.000,00		633.620.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	633.620.000,00	4	645.000.000,00	4	525.000.000,00	4	645.000.000,00	4	633.620.000,00		
4.01.01.1.06.0055 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000.000,00		6.500.000.000,00		6.750.000.000,00		6.800.000.000,00		6.800.000.000,00		
Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	6.000.000.000,00	12	6.500.000.000,00	12	6.750.000.000,00	12	6.800.000.000,00	12	6.800.000.000,00		
4.01.01.1.06.0059 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.400.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	3.400.000.000,00	12	5.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00		
4.01.01.1.06.0070 - Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD				95.000.000,00		95.000.000,00		110.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	110.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00		
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.805.000.000,00		11.805.000.000,00		23.560.000.000,00		11.829.395.937,00		19.514.666.328,63		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	6.250.000.000,00	10	11.530.000.000,00	20	23.230.000.000,00	45	11.275.000.000,00	45	19.040.666.328,63		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4		5		7		7		7			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6		12		20		28		28			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3		3		1		1		8			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0				8		8		8			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	10		7		10		10		10			
4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		2.200.000.000,00		1.330.000.000,00		850.000.000,00		0.490.666.328,63		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	0	0,00	2	2.200.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	550.000.000,00	6	6.490.869.029,83		
4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				2.500.000.000,00		1.750.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	10	2.500.000.000,00	7	1.750.000.000,00	10	2.500.000.000,00	10	2.500.000.000,00	10	2.500.000.000,00		
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		5.400.000.000,00		2.850.000.000,00		2.850.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	2.750.000.000,00	12	2.750.000.000,00	20	5.400.000.000,00	27	2.850.000.000,00	28	2.850.000.000,00		
4.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		7.500.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00		0,00	8	7.500.000.000,00	0	0,00	8	0,00		
4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000.000,00		2.200.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	2.000.000.000,00	5	2.200.000.000,00	7	2.600.000.000,00	7	2.600.000.000,00	7	2.600.000.000,00		
4.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000.000,00		1.600.000.000,00		2.370.000.000,00		2.370.000.000,00		2.500.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	1.000.000.000,00	10	1.500.000.000,00	50	2.370.000.000,00	45	2.370.000.000,00	45	2.500.000.000,00		
5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.506.273.512,00		22.985.430.477,58		24.085.471.850,97		25.021.466.836,57		26.478.870.896,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.831.750.000,00	12	16.635.000.000,00	12	19.750.000.000,00	12	20.530.000.000,00	12	21.350.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.681.750.000,00		6.200.000.000,00		6.500.000.000,00		6.680.000.000,00		6.680.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.681.750.000,00	12	6.200.000.000,00	12	6.500.000.000,00	12	6.680.000.000,00	12	6.680.000.000,00		
4.01.01.1.08.0003 - Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000.000,00		4.250.000.000,00		4.250.000.000,00		4.500.000.000,00		4.500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.000.000.000,00	12	4.250.000.000,00	12	4.250.000.000,00	12	4.500.000.000,00	12	4.500.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.09.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perlengkapannya (Unit)	67	69		69		69		69		69			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4	0		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		25		25		25			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Modal yang Dipelihara (Unit)	5	650		650		540		540		540			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	67	69		69		69		69		69			
4.01.01.1.09.0001 - Pemeliharaan Meubel														
Terlaksananya Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubel yang Dipelihara (Unit)	5	650		650		540		540		540			
4.01.01.1.09.0026 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20			

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.09.5006 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4	0		0		4		5		5			
4.01.01.1.09.5009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10		10		10		12		10			
4.01.01.1.09.5010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		6		10		28		26			
4.01.01.1.09.5011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10		10		10		10		10			
4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
Terlaksananya, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Sosial Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
4.01.01.1.11.5001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
Terealisasinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.1.11.5002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
Terealisasinya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakai Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
4.01.01.1.11.5003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00		
4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Pemenuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		
Tersedianya Dana Pemenuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Pemenuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00		
4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kemudahanggaran Sekretariat Daerah				12.100.000.000,00		12.100.000.000,00		12.450.000.000,00		13.080.000.000,00		13.080.000.000,00		
Tersedianya Fasilitasi Kemudahanggaran Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati Daerah yang Disediakan (Paket)	4	4	12.100.000.000,00	4	12.100.000.000,00	4	12.450.000.000,00	4	13.080.000.000,00	4	13.080.000.000,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				5.000.000.000,00		5.400.000.000,00		5.850.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4	4	5.000.000.000,00	4	5.400.000.000,00	4	5.850.000.000,00	4	6.000.000.000,00	4	6.000.000.000,00		
4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				4.500.000.000,00		4.500.000.000,00		4.650.000.000,00		4.860.000.000,00		4.860.000.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4	4	4.500.000.000,00	4	4.500.000.000,00	4	4.650.000.000,00	4	4.860.000.000,00	4	4.860.000.000,00		
4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.150.000.000,00		2.220.000.000,00		2.220.000.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.150.000.000,00	1	2.220.000.000,00	1	2.220.000.000,00		
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan dan (Dukungan) Daerah	Persentase Kelancaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100	1.670.000.000,00	100	1.986.459.577,71	100	2.017.850.863,28	100	2.186.283.521,88	100	2.275.953.194,84		
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.215.940.000,00		3.229.473.054,42		3.341.759.554,56		3.461.273.925,88		3.621.535.985,50		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	47	47	150.000.000,00	47	150.000.000,00	47	150.000.000,00	47	150.000.000,00	47	150.000.000,00		
4.01.01.1.05.0004 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		47	150.000.000,00	47	150.000.000,00	47	150.000.000,00	47	150.000.000,00	47	150.000.000,00		
4.01.01.1.09 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.174.460.054,00		22.101.979.617,44		22.643.858.688,21		23.123.509.374,48		23.436.874.882,18		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		10	624.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				624.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		10	624.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00		
4.01.01.1.08.0020 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		5	700.000.000,00	5	441.743.158,80	5	295.362.002,52	5	432.327.072,00	5	604.962.415,39		
4.01.01.1.08.0059 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000,00		441.743.158,80		295.362.002,52		432.327.072,00		604.962.415,39		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		5	700.000.000,00	5	441.743.158,80	5	295.362.002,52	5	432.327.072,00	5	604.962.415,39		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		2	30.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
4.01.01.1.08.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		2	30.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.806.273.332,00		22.985.435.427,84		24.085.473.850,87		26.001.495.836,87		28.475.810.688,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	1.000.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	1.000.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	200.000.000,00	4	714.241.427,70	4	820.792.893,28	4	836.690.772,80	4	839.850.327,56		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		4		4		4		4		4			
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		22		22		22		22		22			
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		22		22		22		22		22			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		40		40		40		40		40			
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		40		40		40		40		40			
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Pemerintah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berbasiskan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	230	330		380		430		530		630			
4.01.01.1.05.0002 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	230	330		380		430		530		630			
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	200.000.000,00	10	202.989.759,81	10	210.949.336,37	10	220.229.797,12	10	231.000.324,33		
4.01.01.1.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.174.989.094,00		22.101.978.917,44		22.943.656.085,21		23.123.593.374,46		23.406.074.881,16		
Tersedianya kapasitas untuk kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	1.482.501.875,00	6	1.512.566.993,72	6	1.374.211.401,37	6	1.643.469.926,79	6	1.723.942.697,10		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				415.357.943,00		420.941.992,27		436.097.936,68		457.370.667,40		479.736.982,23		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	415.357.943,00	6	420.941.992,27	6	436.097.936,68	6	457.370.667,40	6	479.736.982,23		
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000,00		202.989.759,81		210.949.336,37		220.229.797,12		231.000.324,33		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	200.000.000,00	4	202.989.759,81	4	210.949.336,37	4	220.229.797,12	4	231.000.324,33		
4.01.01.1.08.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				98.479.721,00		97.779.759,36		101.791.666,59		106.239.949,62		111.474.234,22		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	98.479.721,00	1	97.779.759,36	1	101.791.666,59	1	106.239.949,62	1	111.474.234,22		
4.01.01.1.08.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				329.483.846,00		333.913.412,70		347.521.886,46		362.610.806,10		380.554.379,60		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	6	329.483.846,00	6	333.913.412,70	6	347.521.886,46	6	362.610.806,10	6	380.554.379,60		
4.01.01.1.08.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				451.180.463,00		457.246.109,72		475.891.086,27		496.616.959,16		521.114.188,42		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	451.180.463,00	10	457.246.109,72	10	475.891.086,27	10	496.616.959,16	10	521.114.188,42		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.606.273.310,00		22.965.429.477,56		24.089.473.660,57		25.031.486.836,57		26.476.615.899,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	25	25	1.262.104.732,00	25	1.279.072.462,48	25	1.331.200.779,23	25	1.389.765.345,38	25	1.457.733.012,15		
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.262.104.732,00		1.279.072.462,48		1.331.200.779,23		1.389.765.345,38		1.457.733.012,15		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dukungan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	28	28	1.262.104.732,00	28	1.279.072.462,45	28	1.331.200.778,23	28	1.386.755.345,36	28	1.457.733.012,36		
4.01.01.1.09 - Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.152.460.324,00		27.264.992.328,62		15.490.550.941,84		35.722.619.594,67		39.920.466.782,20		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	66.277.024,00	5	67.185.559,62	5	69.906.314,84	5	72.951.758,67	5	76.550.994,20		
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				66.277.024,00		67.185.559,62		69.906.314,84		72.951.758,67		76.550.994,20		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	66.277.024,00	5	67.185.559,62	5	69.906.314,84	5	72.951.758,67	5	76.550.994,20		
4.01.01.1.12 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				1.694.488.607,00		1.695.324.829,28		1.791.791.667,48		1.868.759.512,16		2.021.639.928,79		
Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	550	550	1.694.488.607,00	550	1.615.324.829,28	540	1.591.791.667,48	550	1.755.759.512,16	550	1.841.639.928,79		
	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	250	250		250		250		250		250			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	60	60		60		60		60		60			
4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan				551.039.910,00		388.257.515,35		412.466.021,92		430.550.265,31		451.606.665,51		
Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	250	250	551.039.910,00	250	388.257.515,35	250	412.466.021,92	250	430.550.265,31	250	451.606.665,51		
4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				905.587.886,00		370.452.361,01		385.581.335,31		402.544.466,82		422.231.272,40		
Terfasilitasinya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	500	500	905.587.886,00	500	370.452.361,01	500	385.581.335,31	500	402.544.466,82	500	422.231.272,40		
4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				837.020.000,00		949.184.952,97		983.793.339,68		922.674.758,03		967.798.999,82		
Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	60	60	837.020.000,00	60	949.184.952,97	60	983.793.339,68	60	922.674.758,03	60	967.798.999,82		
4.01.01.1.14 - Fasilitasi Kepemerintahan				1.436.212.764,00		1.865.868.713,05		1.936.739.520,05		2.021.643.822,45		2.120.838.730,12		
Terlaksananya Fasilitasi Kepemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	700	1.000	1.436.212.764,00	1.000	1.865.868.713,05	1.000	1.936.739.520,05	1.000	2.021.643.822,45	1.000	2.120.838.730,12		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	250	250		250		250		250		250			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Kelembagaan (Laporan)	700	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
4.01.01.1.14.0001 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				703.497.105,00		794.020.399,40		826.330.971,74		862.747.042,40		904.940.428,94		
Terfasilitasinya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	700	1.000	703.497.105,00	1.000	794.020.399,40	1.000	826.330.971,74	1.000	862.747.042,40	1.000	904.940.428,94		
4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				523.279.651,00		327.928.805,64		340.978.135,33		355.979.059,77		373.358.521,18		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Temu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Temu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	250	250	323.279.651,00	250	327.925.865,84	250	340.979.139,22	250	355.979.054,77	250	373.389.521,15		
4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Kepmilokalet				729.436.008,00		739.242.507,91		769.370.209,06		803.217.720,28		842.469.772,13		
Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Kepmilokalet	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Kepmilokalet (Laporan)	700	1.000	729.436.008,00	1.000	739.242.507,91	1.000	769.370.209,06	1.000	803.217.720,28	1.000	842.469.772,13		
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Hukum	Persentase Ketersediaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100	1.102.730.000,00	100	1.119.361.561,74	100	1.228.855.603,59	100	1.285.335.980,04	100	1.342.955.005,55		
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				820.206.350,84		848.045.214,81		1.047.856.092,55		1.105.818.453,85		1.332.765.944,73		
Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14	15	65.000.000,00	15	75.000.000,00	15	81.350.850,00	15	102.360.850,85	15	128.000.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		21.350.850,00		27.360.850,85		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	21.350.850,00	15	27.360.850,85	15	50.000.000,00		
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00		
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00		
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
4.01.01.1.07.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	13.000.000,00	6	20.000.000,00	6	30.000.000,00	6	35.000.000,00	6	37.000.000,00		
4.01.01.1.02 – Administrasi Kepangan Perangkat Daerah				88.405.810.694,00		89.208.857.749,89		90.440.894.307,78		90.593.670.400,31		90.581.029.848,82		
Terlaksanannya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	266.080.000,00	12	266.080.000,74	12	267.080.000,33	12	268.079.999,04	12	269.639.241,55		
4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				266.080.000,00		266.080.000,74		267.080.000,33		268.079.999,04		269.639.241,55		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	266.080.000,00	12	266.080.000,74	12	267.080.000,33	12	268.079.999,04	12	269.639.241,55		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.174.469.054,00		22.101.975.017,44		22.943.890.885,21		23.123.559.374,48		22.406.074.683,18		
Terlaksanya Kepatuhan untuk ketatuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	400.000.000,00	40	450.000.000,00	40	460.000.000,00	40	480.000.000,00	40	490.000.000,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000,00		450.000.000,00		460.000.000,00		480.000.000,00		490.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	400.000.000,00	40	450.000.000,00	40	460.000.000,00	40	480.000.000,00	40	490.000.000,00		
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.805.000.000,00		11.635.000.000,00		23.560.000.000,00		11.823.355.937,00		19.414.668.028,83		
Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diadakan (Unit)	12	12	250.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	203.355.937,00	12	224.000.000,00		
4.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				250.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		203.355.937,00		224.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diadakan (Unit)	12	12	250.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	203.355.937,00	12	224.000.000,00		
4.01.01.1.08 - Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.606.273.332,00		22.985.435.477,55		24.095.471.840,67		25.051.466.636,67		26.478.870.888,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20	1	152.000.000,00	1	163.313.732,00	1	183.000.000,00	1	200.600.000,00	1	204.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	28	30		30		30		30		30			
4.01.01.1.05.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	28	30	10.000.000,00	30	10.000.000,00	30	13.000.000,00	30	15.000.000,00	30	17.000.000,00		
4.01.01.1.05.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000,00		163.313.732,00		170.000.000,00		185.600.000,00		187.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20	1	150.000.000,00	1	163.313.732,00	1	170.000.000,00	1	185.600.000,00	1	187.000.000,00		
4.01.03.1.02 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.302.440.324,00		27.284.899.598,62		15.499.099.941,94		38.722.810.584,87		39.929.466.782,20		
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	20	23.650.000,00	20	23.967.940,00	20	24.944.759,00	20	26.042.174,00	20	27.315.788,00		
4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.650.000,00		23.967.940,00		24.944.759,00		26.042.174,00		27.315.788,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	20	23.650.000,00	20	23.967.940,00	20	24.944.759,00	20	26.042.174,00	20	27.315.788,00		
4.01.03 - PROGRAM PENATAUAN ORGANISASI				2.181.809.000,00		2.227.288.445,00		2.311.793.777,29		2.413.286.348,87		2.531.532.954,34		
Pemenuhan terlaksananya penataan kelembagaan, analisa jabatan dan pengelolaan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	84,89	84,90	2.181.809.000,00	84,90	2.227.288.445,00	85,00	2.311.793.777,29	85,00	2.413.286.348,87	85,10	2.531.532.954,34	4.01.0.00.0.00.01.00 - 00 - Sekretariat Daerah	
4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				850.000.000,00		920.000.000,00		930.000.000,00		1.000.000.000,00		1.040.000.000,00		
Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	30	30	850.000.000,00	30	900.000.000,00	30	930.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.040.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	36	36		36		36		36		36			
4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				300.000.000,00		320.000.000,00		340.000.000,00		360.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	30	30	300.000.000,00	30	320.000.000,00	30	340.000.000,00	30	360.000.000,00	30	350.000.000,00		
4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	30	30	250.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	320.000.000,00	30	320.000.000,00		
4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan				500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		570.000.000,00		
Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	36	36	500.000.000,00	36	500.000.000,00	36	550.000.000,00	36	550.000.000,00	36	570.000.000,00		
4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1.341.809.000,00		1.321.288.445,00		1.321.793.777,29		1.413.486.348,87		1.491.532.954,34		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	48	48	1.241.800.000,00	48	1.321.265.445,28	48	1.321.793.777,28	48	1.413.498.348,87	48	1.491.532.554,34		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.02.1.02.0001 - Pemfasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				300.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		350.000.000,00		370.000.000,00		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00	1	350.000.000,00	1	370.000.000,00		
4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				250.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	48	48	250.000.000,00	48	260.000.000,00	48	260.000.000,00	48	300.000.000,00	48	300.000.000,00		
4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				250.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	2	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	270.000.000,00		
4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				251.800.000,00		251.268.445,28		251.793.777,28		263.498.348,87		351.532.554,34		
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	2	2	251.800.000,00	2	251.268.445,28	2	251.793.777,28	2	263.498.348,87	2	351.532.554,34		
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				3.251.000.000,00		3.375.781.791,03		3.533.981.197,25		3.697.927.271,09		3.847.310.401,73		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Efektifitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	80	80	3.251.000.000,00	85	3.375.781.791,03	85	3.533.981.197,25	90	3.697.927.271,09	90	3.847.310.401,73	4.01.0.00.0.01.01.0001 - Sekretariat Daerah	
4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				1.421.000.000,00		1.421.000.000,00		1.410.381.197,25		1.297.927.271,09		1.155.942.819,73		
Pengelola Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)		1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,25	1	631.429.457,09	1	449.845.105,73		
4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,25		631.429.457,09		449.845.105,73		
Terlaksanya Administrasi kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)		1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,25	1	631.429.457,09	1	449.845.105,73		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)		1	581.000.000,00	1	581.000.000,00	1	383.381.197,00	1	238.497.814,00	1	236.497.814,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03.1.01.0002 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)													
Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)													
6.01.03.1.01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah														
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)													
6.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah														
Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)													
6.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)													
Pengembangan Otonomi dan Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Pelaksanaan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)													
6.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Pelaksanaan Urusan														
Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Pelaksanaan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)													
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)													
6.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)													
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)													
6.01.03.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)													
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)													

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02.1.02.0004 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)		1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.01.05.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				600.000.000,00		700.000.000,00		900.000.000,00		1.100.000.000,00		1.300.000.000,00		
Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
4.01.05.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terfasilitasinya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)		3	150.000.000,00	3	200.000.000,00	3	300.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00		
4.01.05.1.03.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				150.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terfasilitasinya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)		3	150.000.000,00	3	200.000.000,00	3	300.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00		
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	2	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
4.01.05.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				150.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	2	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
5.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				105.373.698.192,00		108.790.336.718,56		111.142.556.522,64		116.032.140.874,72		121.706.792.291,33		
Persentase Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	92	92	105.373.698.192,00	94	108.790.336.718,56	94	111.142.556.522,64	96	116.032.140.874,72	98	121.706.792.291,33	4.01.0.00.0.00.01.00.00 - Sekretariat Daerah	
4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				79.425.921.398,00		75.140.336.718,56		79.142.556.522,64		79.032.140.874,72		77.706.792.291,33		
Persentase Efektifitas Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	100	100	79.425.921.398,00	100	75.140.336.718,56	100	79.142.556.522,64	100	79.032.140.874,72	100	77.706.792.291,33		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	200	200		200		200		200		200			
4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				79.097.496.560,00		74.740.336.718,56		78.842.556.522,64		78.432.140.874,72		77.006.792.291,33		
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	200	200	79.097.496.560,00	200	74.740.336.718,56	200	78.842.556.522,64	200	78.432.140.874,72	200	77.006.792.291,33		
4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				328.421.816,00		400.000.000,00		300.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		
Terfasilitasinya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	100	100	328.421.816,00	100	400.000.000,00	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00		
4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				25.850.810.244,56		33.250.000.000,00		36.900.000.000,00		35.900.000.000,00		42.000.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	2	2	25.265.210.241,56	2	30.718.000.000,00	2	35.000.000.000,00	2	35.000.000.000,00	2	42.000.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.04.1.02.0001 - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				24.915.759.362,56		30.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		42.000.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	2	2	24.915.759.362,56	2	30.000.000.000,00	2	35.000.000.000,00	2	35.000.000.000,00	2	42.000.000.000,00		
4.01.04.1.02.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				326.451.974,00		500.000.000,00		600.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	2	2	326.731.974,00	2	500.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00		
4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				123.759.275,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	2	2	123.759.275,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
4.01.04.1.03 - Fasilitasi Penggembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				851.668.882,56		900.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		
Jumlah Dokumen Penggembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	2	2	851.668.882,56	2	900.000.000,00	2	1.100.000.000,00	2	1.100.000.000,00	2	1.100.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.04.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi				229.034.159.50		230.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi (Dokumen)	2	2	229.034.159,50	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				329.585.486,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	2	2	329.585.486,00	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
4.01.04.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				129.858.898,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	2	2	129.858.898,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI SDM KEMASLAHATAN UMMAT				2.464.430.720,00		2.943.405.023,00		3.043.447.087,47		3.195.219.729,59		3.334.021.405,49		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Produk Hukum Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang implementatif dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; Terwujudnya Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi dan Non Litigasi; Layanan Hukum; dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Bagi Perangkat Daerah dan Aparatur	Persentase terwujudnya Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang implementatif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigasi, layanan hukum; dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur (%)	100	100	2.804.535.700,00	100	2.941.455.623,00	100	3.080.447.081,47	100	3.196.219.708,20	100	3.354.031.408,40	4.01.3.09.0.00.01.01.00 - Sekretariat Daerah	
4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				1.460.000.000,00		1.469.047.123,00		1.547.000.000,00		1.640.000.000,00		1.797.700.000,00		
Terwujudnya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah dan meningkatkan pemahaman pengelolaan serta pendokumentasian informasi hukum melalui pengelolaan sarana dan prasarana hukum	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Dihasilkan dan Dievaluasi (Dokumen)	372	372	1.460.000.000,00	372	1.469.047.123,00	372	1.547.000.000,00	372	1.640.000.000,00	372	1.797.700.000,00		
	Jumlah Produk Hukum Peraturan yang Dikaji (Dokumen)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Produk Hukum Pergubsus yang Dikaji (Dokumen)	60	60		60		60		60		60			
	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	1	201		1		1		1		1			
4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pergubsus				350.000.000,00		355.000.000,00		357.000.000,00		360.000.000,00		365.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pergubsus	Jumlah Produk Hukum Pergubsus yang Dikaji (Dokumen)	60	60	350.000.000,00	60	355.000.000,00	60	357.000.000,00	60	360.000.000,00	60	365.000.000,00		
4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Peraturan				150.000.000,00		159.047.123,00		170.000.000,00		200.000.000,00		237.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Peraturan	Jumlah Produk Hukum Peraturan yang Dikaji (Dokumen)	300	300	150.000.000,00	300	159.047.123,00	300	170.000.000,00	300	200.000.000,00	300	237.000.000,00		
4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Sarana Hukum Lainnya				240.000.000,00		240.000.000,00		255.000.000,00		280.000.000,00		275.700.000,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	1	631	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	255.000.000,00	1	280.000.000,00	1	275.700.000,00		
4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				740.500.000,00		740.000.000,00		765.000.000,00		800.000.000,00		890.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	372	372	740.500.000,00	372	740.000.000,00	372	765.000.000,00	372	800.000.000,00	372	890.000.000,00		
4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum				1.424.535.700,00		1.455.436.700,00		1.510.447.081,47		1.556.219.708,20		1.556.931.408,40		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya pembinaan bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi, Non Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi penerapkan daerah dan aparatur	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	30	43	1.424.438.700,00	43	1.455.438.700,00	43	1.510.447.081,47	43	1.658.219.728,29	43	1.599.931.408,49		
	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	5	14		14		17		14		14			
4.01.06.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.154.438.700,00		1.185.438.700,00		1.235.438.700,47		1.275.438.700,29		1.283.931.408,49		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	30	43	1.154.438.700,00	43	1.185.438.700,00	43	1.235.438.700,47	43	1.275.438.700,29	43	1.283.931.408,49		
4.01.06.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				270.000.000,00		270.000.000,00		281.008.381,00		282.781.528,00		283.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	9	14	270.000.000,00	14	270.000.000,00	17	281.008.381,00	14	282.781.528,00	14	283.000.000,00		
4.01.00 - PROGRAM PENDUKUNGAN DAN PEMBANGUNAN				2.495.000.000,00		2.495.139.332,00		2.598.950.570,77		2.714.332.249,54		2.847.078.997,37		
Jumlah Dokumen Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Inflasi (%)	3,70	3,85	2.495.000.000,00	3,90	2.495.139.332,00	3,95	2.598.950.570,77	3,50	2.714.332.249,54	3,45	2.847.078.997,37	4.01.6.00.0.00.01.00 - Sekretariat Daerah	
	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	2,30	2,32		2,34		2,41		2,43		2,45			
	Lokasi Keuangan (2%)	87,74	88,45		89,11		89,89		90,62		91,02			
4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				975.000.000,00		975.000.000,00		1.020.000.000,00		1.060.000.000,00		1.102.078.997,37		
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	3	3	975.000.000,00	3	975.000.000,00	3	1.020.000.000,00	3	1.060.000.000,00	3	1.102.078.997,37		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				750.000.000,00		750.000.000,00		770.000.000,00		790.000.000,00		812.078.997,37		
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	3	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	770.000.000,00	3	790.000.000,00	3	812.078.997,37		
4.01.06.1.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				225.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	2	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	250.000.000,00	2	270.000.000,00	2	270.000.000,00		
4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				825.000.000,00		833.139.332,00		874.950.570,77		896.000.000,00		760.000.000,00		
Terwujudnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	1	1	825.000.000,00	1	833.139.332,00	1	874.950.570,77	1	896.000.000,00	1	760.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kemaritiman dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.06.1.02.5001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				225.000.000,00		228.000.000,00		244.950.570,77		250.000.000,00		270.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	1	1	225.000.000,00	1	228.000.000,00	1	244.950.570,77	1	250.000.000,00	1	270.000.000,00		
4.01.06.1.02.5002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				175.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		245.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	215.000.000,00	1	245.000.000,00		
4.01.06.1.02.5003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				225.000.000,00		205.139.322,00		220.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	1	1	225.000.000,00	1	205.139.322,00	1	220.000.000,00	1	230.000.000,00	1	245.000.000,00		
4.01.06.1.03 - Kegiatan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				665.000.000,00		360.000.000,00		385.000.000,00		958.332.249,54		985.000.000,00		
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Belan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	1	1	665.000.000,00	1	360.000.000,00	1	385.000.000,00	1	958.332.249,54	1	985.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Belan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Belan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Belan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				920.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Belan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Belan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	1	1	920.000.000,00	1	330.000.000,00	1	330.000.000,00	1	340.000.000,00	1	350.000.000,00		
4.01.06.1.03.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Belan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				225.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		250.332.249,54		285.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	1	1	225.500.000,00	1	230.630.500,00	1	235.890.000,00	1	259.332.248,54	1	265.020.000,00		
4.01.06.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				325.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		360.000.000,00		370.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	1	1	325.000.000,00	1	330.000.000,00	1	340.000.000,00	1	360.000.000,00	1	370.000.000,00		
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2.025.045.045,00		2.063.375.300,51		2.771.821.743,51		2.893.889.058,50		3.025.588.228,78		
Terwujudnya Peningkatan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Jumlah Total Proyek Nontekstil Yang Dikawal Itu tahun-berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	0,5	0,6	2.025.045.045,00	0,7	2.063.375.300,51	0,8	2.771.821.743,51	0,9	2.893.889.058,50	1	3.025.588.228,78	Sekretariat Daerah	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode konsolidasi (%)	75	77		75		79		80		90			
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	46	47		48		49		50		50			
4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				909.868.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.041.527.178,00		
Penyelesaian Pelayanan Pemilihan yang sepat waktu sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	909.868.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.041.527.178,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				950.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				250.500.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		291.527.178,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	291.527.178,00		
4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				350.868.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	350.868.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				325.376.001,00		339.945.299,51		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerapan penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	635.378.301,00	1	239.999.999,51	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.37.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				354.000.000,00		554.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1	1	354.000.000,00	1	554.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
4.01.37.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				354.378.301,00		385.999.999,51		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	354.378.307,00	1	385.999.999,51	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
4.01.37.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				200.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
4.01.37.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				709.000.000,00		723.378.301,00		721.921.743,51		793.669.056,00		863.869.056,78		
Penerapan Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) di kabeng yang memenuhi level kemandirian	Jumlah Dokumen Hasil Peralatan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	709.000.000,00	1	723.378.301,00	1	721.921.743,51	1	793.669.056,00	1	863.869.056,78		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemntmaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.37.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				200.000.000,00		223.378.301,00		221.921.743,51		221.921.744,00		271.921.744,00		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	100	100	200.000.000,00	100	223.378.301,00	100	221.921.743,51	100	221.921.744,00	100	271.921.744,00		
4.01.37.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		271.947.314,00		321.947.314,78		
Terlaksananya Peralatan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Peralatan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	271.947.314,00	1	321.947.314,78		
4.01.37.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	250.500.000,00	1	250.500.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
4.01.00 - PROGRAM KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				1.364.909.000,00		1.383.258.765,72		1.439.632.238,75		1.502.664.160,61		1.570.472.108,41		
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	95	95	1.364.909.000,00	95	1.383.258.765,72	96	1.439.632.238,75	97	1.502.665.160,61	98	1.570.472.108,41	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				789.909.000,00		794.500.000,00		845.573.000,00		884.333.000,00		934.464.000,00		
Terlaksananya Pelaporan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	12	4	789.909.000,00	4	794.500.000,00	4	845.573.000,00	4	884.333.000,00	4	934.464.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				452.419.000,00		453.000.000,00		487.180.000,00		478.173.000,00		481.464.000,00		
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	12	4	452.419.000,00	4	453.000.000,00	4	487.180.000,00	4	478.173.000,00	4	481.464.000,00		
4.01.08.1.01.0002 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				83.915.000,00		84.000.000,00		88.508.000,00		84.000.000,00		100.000.000,00		
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	4	4	83.915.000,00	4	84.000.000,00	4	88.508.000,00	4	84.000.000,00	4	100.000.000,00		
4.01.08.1.01.0003 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				253.575.000,00		257.000.000,00		269.885.000,00		212.160.000,00		350.000.000,00		
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	4	4	253.575.000,00	4	257.000.000,00	4	269.885.000,00	4	212.160.000,00	4	350.000.000,00		
4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				575.000.000,00		589.258.765,72		594.060.238,75		619.835.160,61		642.008.108,41		
Terwujudnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	4	575.000.000,00	4	589.258.765,72	4	594.060.238,75	4	619.835.160,61	4	642.008.108,41		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Dievaluasi (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
4.01.08.1.02.0001 - Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				750.000.000,00		761.000.000,00		782.000.000,00		797.660.000,00		800.000.000,00		

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	4	4	150.000.000,00	4	151.000.000,00	4	152.000.000,00	4	157.500.000,00	4	165.000.000,00		
4.01.08.1.02.0002 - Pelajaran Pelaksanaan Pembangunan Daerah				150.000.000,00		151.000.000,00		152.000.000,00		157.500.000,00		165.000.000,00		
Tersusunnya Pelajaran Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Lajaran Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lajaran)	4	4	150.000.000,00	4	151.000.000,00	4	152.000.000,00	4	157.500.000,00	4	165.000.000,00		
4.01.08.1.02.0003 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				275.000.000,00		287.258.765,72		290.060.236,79		303.635.160,81		312.008.106,41		
Tersedianya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	4	275.000.000,00	4	287.258.765,72	4	290.060.236,79	4	303.635.160,81	4	312.008.106,41		

Dengan demikian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen menjadi penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi pilar penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029.

4.5 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

Indikator kinerja adalah ukuran terpilih yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Dalam konteks Sekretariat Daerah, indikator kinerja berfungsi untuk mengukur seberapa jauh penyelenggaraan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Indikator ini penting karena memastikan bahwa setiap kegiatan Sekretariat Daerah tidak hanya menghasilkan output administratif, tetapi juga outcome yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan, efektivitas pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.

Perumusan indikator kinerja RENSTRA Sekretariat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Mengacu pada sasaran RPJMD 2025–2029
   Indikator dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan tujuan pembangunan daerah, seperti pengendalian inflasi, peningkatan kualitas birokrasi, dan reformasi hukum.
2. Menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
   Sebagai perangkat yang bertugas mendukung kepala daerah, indikator diarahkan pada efektivitas koordinasi, fasilitasi kebijakan, serta pelayanan administrasi pemerintahan.
3. Mengelompokkan indikator ke dalam dua kategori:
   - Indikator Kinerja Utama (IKU) → mencerminkan kontribusi strategis Setda pada capaian makro daerah.
   - Indikator Kinerja Kunci (IKK) → menggambarkan keberhasilan teknis dan operasional dari pelaksanaan tugas Setda.

4. Menetapkan indikator yang spesifik dan terukur sehingga dapat dipantau perkembangannya selama periode 2025–2029.

4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dirancang untuk mencerminkan kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Tiga indikator utama yang ditetapkan meliputi tingkat inflasi daerah, indeks reformasi hukum, dan indeks reformasi birokrasi, yang masing-masing memiliki target capaian tahunan secara berkesinambungan hingga tahun 2030.

Adapun tabel Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah									
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,00	65,00	66,50	68,00	69,50	71,00	72,50	
3.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,00	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25	

Pertama, indeks reformasi birokrasi menjadi indikator yang menilai keberhasilan perubahan tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan melayani. Dengan baseline tahun 2024 sebesar 65, indeks ini ditargetkan meningkat secara bertahap. Pada tahun 2025 capaian tetap sebesar 65, kemudian naik menjadi 66,5 pada tahun 2026, 68 pada 2027, 69,5 pada 2028, dan mencapai 71 pada tahun 2029. Pada akhir periode, tahun 2030, indeks reformasi birokrasi ditargetkan menyentuh angka 72,5. Peningkatan ini merefleksikan upaya Sekretariat Daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, menata kelembagaan, serta membangun budaya kerja aparatur yang responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Kedua, indeks reformasi hukum menjadi indikator utama yang mencerminkan kualitas penyusunan dan implementasi produk hukum daerah. Dengan baseline sebesar 70 pada tahun 2024, indeks ini

ditargetkan meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Tahun 2025 ditetapkan sebesar 70, kemudian naik menjadi 71,25 pada 2026, 72,50 pada 2027, dan 73,75 pada 2028. Selanjutnya, pada tahun 2029 indeks reformasi hukum ditargetkan mencapai 75, dan meningkat lagi menjadi 76,25 pada tahun 2030. Peningkatan yang gradual ini menunjukkan komitmen Sekretariat Daerah dalam mendorong penyusunan produk hukum yang implementatif, memperkuat kesadaran hukum aparatur, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum.

Kedua Indikator Kinerja Utama tersebut menggambarkan kontribusi strategis Sekretariat Daerah dalam pembangunan daerah. Koordinasi inflasi mencerminkan peran Setda dalam mendukung stabilitas ekonomi; reformasi hukum menunjukkan komitmen dalam memperkuat kepastian hukum; dan reformasi birokrasi menegaskan peran Setda dalam mendorong birokrasi yang profesional dan melayani.

Dengan capaian IKU ini, Sekretariat Daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan langsung dalam mengawal keberhasilan RPJMD 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

4.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen utama untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kebermanfaatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. IKK dirumuskan untuk setiap urusan pemerintahan dan mencerminkan capaian hasil yang diharapkan dari kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.

Keberadaan IKK berfungsi sebagai alat evaluasi dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan strategis, menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap indikator

disusun dengan prinsip SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu), serta dilengkapi target tahunan selama periode perencanaan 2025–2029. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat diarahkan secara lebih fokus, terukur, dan berkesinambungan.

Dalam periode perencanaan tahun 2026-2030, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan indikator kinerja kunci yang mencerminkan fungsi strategis dalam mendukung koordinasi, perumusan kebijakan, serta pengendalian pembangunan daerah. Setiap indikator dirancang dengan target capaian tahunan yang realistis, progresif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Bisa dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2.	Efektivitas Kerja Sama Daerah.	komulatif	Persentase	80	80	80	85	85	90	90	
3.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	komulatif	Persentase	92	92	92	94	94	96	96	
4.	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya yang direalisasikan pada kuartal pertama	komulatif	%	0.5	0.5	0.6	0,7	0,8	0,9	1	
5.	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	komulatif	Persentase	95	95	95	95	96	97	98	
6.	Persentase terwujudnya Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang Implementatif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan., Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigasi layanan hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan stakeh	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tingkat Inflasi	komulatif	%	3,70	3,70	3,65	3,60	3,55	3,50	3,45	
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	komulatif	%	76	76	77	78	79	80	80	
9.	Return on Asset (ROA) RUMD	komulatif	%	2,30	2,30	2,32	2,34	2,41	2,43	2,45	
10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	komulatif	%	46	46	47	48	49	50	50	
11	Inklusi Keuangan	komulatif	(%)	87,74	87,74	88,46	89,17	89,89	90,62	91,02	

1. Efektivitas Kerja Sama Daerah

Indikator ini mendukung Tujuan RPJMD: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sinergis dan kolaboratif.” Peningkatan efektivitas kerja sama dari 80% (2024) menjadi 90% (2030) mencerminkan penguatan kemitraan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak eksternal dalam mendukung pilar Betang Harmoni — mewujudkan kolaborasi pembangunan berbasis semangat gotong royong dan nilai Huma Betang.

2. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

   Indikator ini berkaitan langsung dengan Tujuan RPJMD: “Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat.” Target peningkatan efektivitas dari 92% menjadi 96% mendukung implementasi Program Huma Betang Sejahtera yaitu Betang Makmur dan Betang Sehat, yang diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual) guna menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

3. Persentase Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya

   Efisiensi pengelolaan proyek pembangunan merupakan bagian dari Tujuan RPJMD: “Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.” Kenaikan indikator dari 0,5% menjadi 1,0% menggambarkan keberlanjutan proyek strategis multi-tahun dalam mendukung Betang Maju, yaitu pemerataan infrastruktur dan ekonomi wilayah berbasis produktivitas daerah.

4. Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan

   Indikator ini berkontribusi terhadap Tujuan RPJMD: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.” Dengan peningkatan capaian dari 95% menjadi 98%, Sekretariat Daerah memperkuat fungsi koordinasi dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini mendukung nilai Kalteng Bermartabat, yakni pemerintahan yang profesional dan berorientasi hasil *(result-based management)*.

5. Persentase Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang Implementatif

   Indikator ini terkait dengan Sasaran RPJMD: “Meningkatnya kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan regulasi daerah.” Dengan capaian konsisten 100% hingga tahun 2030, indikator ini memperkuat fondasi hukum daerah dalam menjalankan program Betang Harmoni, yang menjunjung supremasi hukum, keadilan, dan pelayanan publik yang berkeadilan.

6. Tingkat Inflasi Daerah

   Sebagai bagian dari koordinasi kebijakan ekonomi, indikator ini berkontribusi pada Tujuan RPJMD: “Meningkatkan stabilitas ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat." Penurunan inflasi dari 3,70% menjadi 3,45% menunjukkan keberhasilan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga daya beli masyarakat — selaras dengan Betang Makmur, yaitu pembangunan ekonomi rakyat dan penguatan daya tahan masyarakat terhadap tekanan ekonomi.

7. Persentase Pengadaan dengan Metode Kompetitif

   Indikator ini mendukung Tujuan RPJMD: "Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah." Peningkatan penggunaan metode kompetitif dari 76% ke 80% memperkuat tata kelola pengadaan berbasis elektronik dan akuntabilitas publik, sejalan dengan Betang Maju (ekonomi efisien) dan Kalteng Bermartabat (pemerintahan bersih dan transparan).

8. *Return on Asset (ROA)* BUMD

   Indikator ini berkaitan dengan Sasaran RPJMD: "Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap PAD dan perekonomian daerah." Kenaikan ROA dari 2,30% ke 2,45% menunjukkan peningkatan kinerja korporasi daerah yang mendukung pilar Betang Maju, khususnya dalam memperkuat perekonomian berbasis aset daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pusat.

9. Rasio Nilai Belanja Melalui Pengadaan

   Rasio ini menggambarkan efektivitas belanja pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, yang terkait dengan Tujuan RPJMD: "Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan produktif." Kenaikan dari 46% ke 50% memperlihatkan optimalisasi sistem pengadaan terintegrasi untuk mempercepat realisasi belanja prioritas dan mendukung Betang Maju serta Kalteng Bermartabat.

10. Inklusi Keuangan

    Indikator ini selaras dengan Tujuan RPJMD: "Meningkatkan akses ekonomi masyarakat terhadap layanan keuangan formal." Peningkatan inklusi dari 87,74% ke 91,02% mencerminkan komitmen dalam memperluas literasi keuangan dan digitalisasi ekonomi — mendukung Betang Makmur dan Betang Cerdas melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi berbasis digital.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Dengan demikian, RENSTRA ini tidak hanya menjadi podoman internal Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, tetapi juga merupakan instrumon penting untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan daerah dan kinerja birokrasi pemerintahan.

RENSTRA Sekrotariat Daerah menitikberatkan pada upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan koordinasi, percepatan reformasi birokrasi, cptimalisasi pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dan data terpadu. Seluruh arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RENSTRA Ini sejalan dengan misi RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2029, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesicnal, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi keberhasilan pembangunan daerah.

Keberhasilan peiaksanaan RENSTRA ini akan menjadl kontribusi nyata Sokrotariat Daorah dalam mendukung pencapaian visi Misi Gubernur dan Wakll Gubernur Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, implementasi RENSTRA memerlukan kcmitmen bersama seluruh jajaran Sekretariat Daerah, serta dukungan dan slnergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, regicnal, maupun nasicnal.

Semcga dokumen RENSTRA ini dapat menjadi pedcman yang efektif dalam mengarahkan langkah-langkah strategls Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya target-target RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

A.n. Gubernur Kalimantan Tengah,
Plt. Sekretaris Daerah

Leonard. S. Ampung

KALTENG BERKAH KALTENG MAJU
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

DAFTAR LAMPIRAN

POHON KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
DAN
CASCADING
SEKRETARIAT DAERAH

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PENJABARAN RPJMD MISI KE - 1

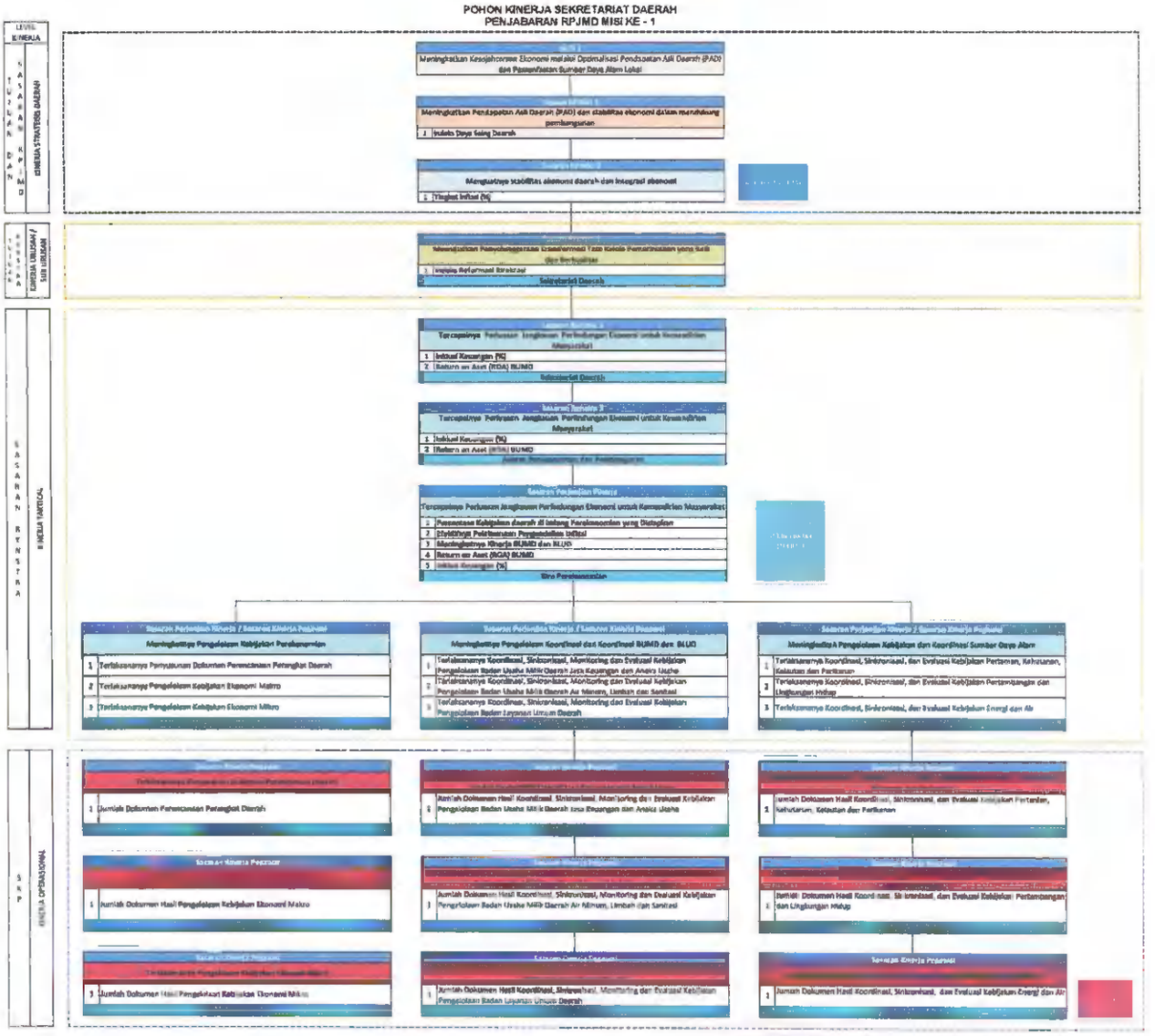

Palangka Raya, September 2025
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

LEONARD S. AMPUNG

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH
PENJABARAN RPJMD MISI KE - 1

Sasaran RPJMD 5

Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Inflasi	%	3,70	3,65	3,60	3,55	3,50	3,45
2	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,30	2,32	2,34	2,41	2,43	2,45
3	Inklusi Keuangan	%	87,74	88,45	89,17	89,89	90,62	91,02

SASARAN KEPALA DAERAH

Sasaran Renstra 3

Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,30	2,32	2,34	2,41	2,43	2,45
2	Inklusi Keuangan	%	87,74	88,45	89,17	89,89	90,62	91,02

SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah

Program Perekonomian dan Pembangunan

	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah dokumen kebijakan perekonomian dan pembangunan	Dokumen	11	11	11	11	11	11
	Anggaran Tahun 2025	Rp1.401.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp1.457.347.088						
	Anggaran Tahun 2027	Rp1.602.643.294						
	Anggaran Tahun 2028	Rp1.762.448.509						
	Anggaran Tahun 2029	Rp1.936.645.443						
	Anggaran Tahun 2030	Rp2.093.041.699						

PROGRAM

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Dokumen pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Dokumen	5	5	5	5	5	5
	Anggaran Tahun 2025	Rp574.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp557.347.088						
	Anggaran Tahun 2027	Rp590.000.000						
	Anggaran Tahun 2028	Rp662.448.509						
	Anggaran Tahun 2029	Rp726.645.443						
	Anggaran Tahun 2030	Rp883.041.699						

1. Tingkat Inflasi

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Ekonomi Makro

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya pengelolaan kebijakan ekonomi makro	Dokumen	3	3	3	3	3	3
	Anggaran Tahun 2025	Rp385.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp407.347.088						
	Anggaran Tahun 2027	Rp420.000.000						
	Anggaran Tahun 2028	Rp462.448.509						
	Anggaran Tahun 2029	Rp506.645.443						
	Anggaran Tahun 2030	Rp663.041.699						

3. Inklusi Keuangan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Ekonomi Mikro

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	2	2	2	2	2	2
	Anggaran Tahun 2025	Rp189.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000						
	Anggaran Tahun 2027	Rp170.000.000						
	Anggaran Tahun 2028	Rp200.000.000						
	Anggaran Tahun 2029	Rp220.000.000						
	Anggaran Tahun 2030	Rp220.000.000						

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Dokumen pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen	3	3	3	3	3	3
	Anggaran Tahun 2025	Rp552.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp450.000.000						
	Anggaran Tahun 2027	Rp502.643.294						
	Anggaran Tahun 2028	Rp550.000.000						
	Anggaran Tahun 2029	Rp600.000.000						
	Anggaran Tahun 2030	Rp600.000.000						

2. Return on Asset (ROA) BUMD

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Anggaran Tahun 2025	Rp190.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000						
	Anggaran Tahun 2027	Rp170.000.000						
	Anggaran Tahun 2028	Rp180.000.000						
	Anggaran Tahun 2029	Rp200.000.000						
	Anggaran Tahun 2030	Rp200.000.000						

2. Return on Asset (ROA) BUMD

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Anggaran Tahun 2025	Rp113.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000						
	Anggaran Tahun 2027	Rp162.643.294						
	Anggaran Tahun 2028	Rp180.000.000						
	Anggaran Tahun 2029	Rp200.000.000						
	Anggaran Tahun 2030	Rp200.000.000						

2. Return on Asset (ROA) BUMD

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Anggaran Tahun 2025	Rp249.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000						
	Anggaran Tahun 2027	Rp170.000.000						
	Anggaran Tahun 2028	Rp190.000.000						
	Anggaran Tahun 2029	Rp200.000.000						
	Anggaran Tahun 2030	Rp200.000.000						

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Dokumen pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam	Dokumen	3	3	3	3	3	3
	Anggaran Tahun 2025	Rp275.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp450.000.000						
	Anggaran Tahun 2027	Rp510.000.000						
	Anggaran Tahun 2028	Rp550.000.000						
	Anggaran Tahun 2029	Rp610.000.000						
	Anggaran Tahun 2030	Rp610.000.000						

KEGIATAN

3. Inklusi Keuangan

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Anggaran Tahun 2025	Rp97.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000						
	Anggaran Tahun 2027	Rp170.000.000						
	Anggaran Tahun 2028	Rp190.000.000						
	Anggaran Tahun 2029	Rp210.000.000						
	Anggaran Tahun 2030	Rp210.000.000						

3. Inklusi Keuangan

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Anggaran Tahun 2025	Rp80.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000						
	Anggaran Tahun 2027	Rp170.000.000						
	Anggaran Tahun 2028	Rp180.000.000						
	Anggaran Tahun 2029	Rp200.000.000						
	Anggaran Tahun 2030	Rp200.000.000						

3. Inklusi Keuangan

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Anggaran Tahun 2025	Rp98.000.000						
	Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000						
	Anggaran Tahun 2027	Rp170.000.000						
	Anggaran Tahun 2028	Rp180.000.000						
	Anggaran Tahun 2029	Rp200.000.000						
	Anggaran Tahun 2030	Rp200.000.000						

SUB KEGIATAN

POHON KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

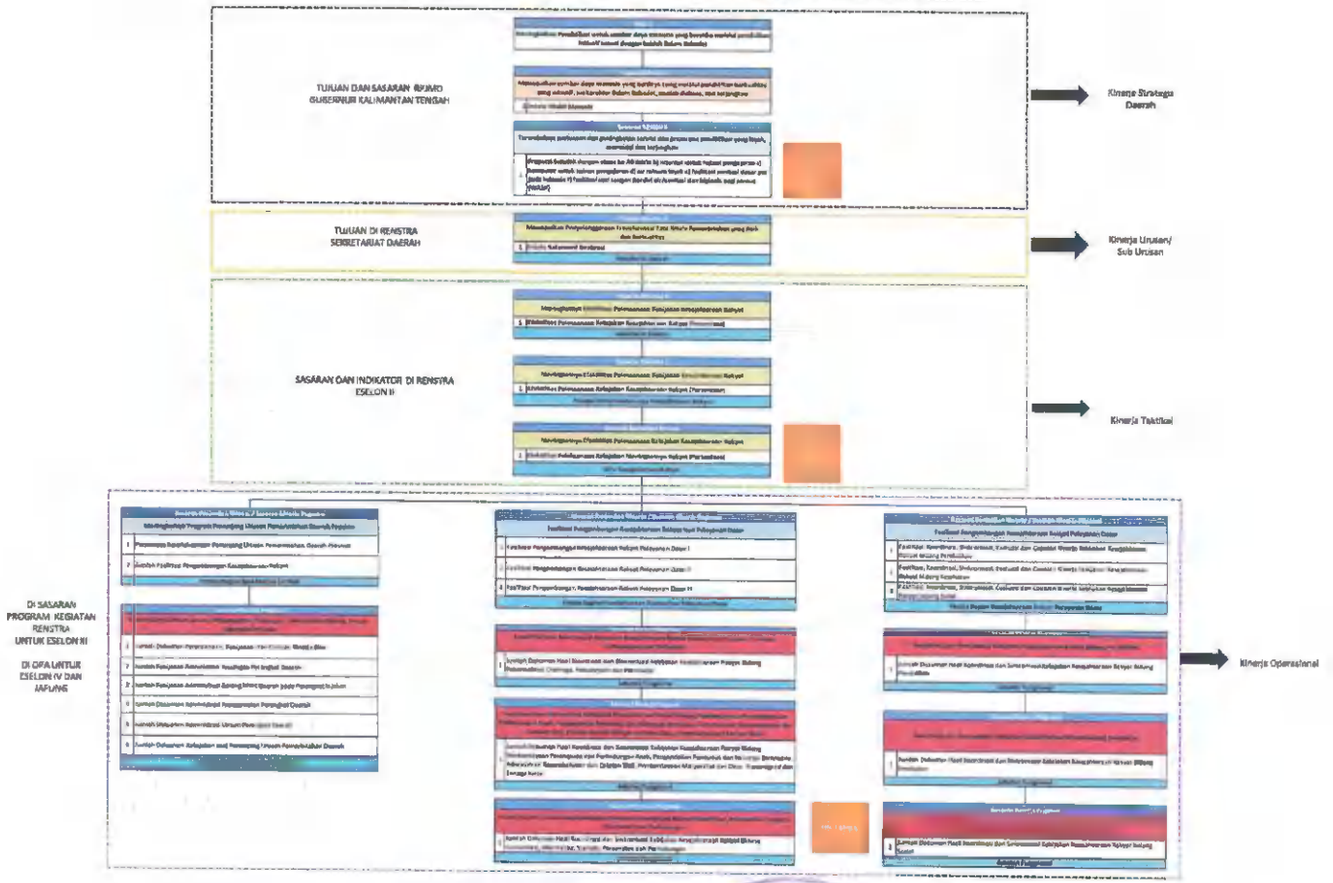

Palangka Raya, September 2025
SEKRETARIS DAERAH,

LEONARD S. AMPUNG

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH
PENJABARAN RPJMD MISI KE - 2

Sasaran RPJMD 8								
Terwujudnya perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, memadai dan terjangkau								
Indikator		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Proporsi Sekolah dengan akses ke: a) listrik b) internet untuk tujuan pengajaran c) komputer untuk tujuan pengajaran d) air minum layak e) fasilitasi sanitasi dasar per jenis kelamin f) fasilitas cuci tangan (terdiri air/sanitasi dan higienis bagi semua (WASH)	%	70,60	75,88	81,16	86,44	91,72	97,00

SASARAN KEPALA DAERAH

Sasaran Renstra 4								
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
Indikator		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	%	95	97	97	98	98	99
Sekretariat Daerah								

SASARAN Biro

Program Kesejahteraan Rakyat								
Indikator Program		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	95	97	97	98	98	99
Anggaran Tahun 2025	Rp209.880.762.422							
Anggaran Tahun 2026	Rp105.373.698.192							
Anggaran Tahun 2027	Rp108.790.336.718,58							
Anggaran Tahun 2028	Rp111.142.558.522,64							
Anggaran Tahun 2029	Rp116.032.140.875							
Anggaran Tahun 2030	Rp121.706.791,33							

PROGRAM

Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar								
Indikator Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Dokumen Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Dokumen	6	6	6	6	6	6
Anggaran Tahun 2025	Rp25.750.000.000							
Anggaran Tahun 2026	Rp105.373.698.192							
Anggaran Tahun 2027	Rp106.790.336.718,56							
Anggaran Tahun 2028	Rp111.142.558.522,64							
Anggaran Tahun 2029	Rp116.032.140.874,73							
Anggaran Tahun 2030	Rp121.706.792.291,33							

KEGIATAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)								
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan								
Indikator Sub Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dok	2	2	2	2	2	2
Anggaran Tahun 2025	Rp25.050.000.000							
Anggaran Tahun 2026	Rp24.815.739.393							
Anggaran Tahun 2027	Rp30.000.000.000							
Anggaran Tahun 2028	Rp30.000.000.000							
Anggaran Tahun 2029	Rp35.000.000.000							
Anggaran Tahun 2030	Rp42.000.000.000							

SUB KEGIATAN

ERJA SEKRETARIA

SARAN RPJMD MIS

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

PENJABARAN RPJMD MISI KE - 5

LEVEL KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD — KINERJA STRATEGIS DAERAH

TUJUAN RENSTRA — KINERJA UNIT/SUB UNIT

SASARAN RENSTRA — KINERJA TAKTIKAL

SKP — KINERJA OPERASIONAL

Sasaran Renstra 2

Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah

1	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi (Kasus)

Sekretariat Daerah

Sasaran Renstra 2

Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah

1	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi (Kasus)

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Renstra 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik

1	Indeks Reformasi Hukum
2	Persentase Terlaksananya Produk Hukum Daerah yang Impelementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta terwujudnya Perlindungan Hukum kepada semua Unsur Pemerintah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Perjanjian Kinerja

Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi dan Non Litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

1	Jumlah Perkara Hukum Litigasi yang ditangani
2	Jumlah Dokumen Penanganan Perkara
3	Jumlah Perkara Hukum Non Litigasi yang ditangani
4	Jumlah Dokumen HAM

Biro Hukum

Sasaran Perjanjian Kinerja

Terwujudnya Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota yang di Fasilitasi dan Evaluasi

1	Jumlah Ranperda di Fasilitasi
2	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati/Walikota di Fasilitasi
3	Jumlah Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Evaluasi

Biro Hukum

Sasaran Perjanjian Kinerja

Terlaksananya penyusunan Produk Hukum Daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan dan Penetapan

1	Jumlah Penyusunan Ranperda Provinsi Kalimantan Tengah
2	Jumlah Penyusunan Ranpergub Kalimantan Tengah
3	Jumlah Penyusunan Rankepgub Kalimantan Tengah

Biro Hukum

Sasaran Perjanjian Kinerja

Terwujudnya penataan dan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum

1	Jumlah Dokumentasi Produk Hukum

Biro Hukum

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatkan Penanganan Sengketa Hukum pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1	Tersedianya pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Tersedianya Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi Perangkat Daerah

Kepala Bagian Bantuan Hukum

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai

Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

1	Terlaksananya Evaluasi, Pengawasan Refresif, Penataan, dan Pengkajian Produk Hukum

Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai

Terwujudnya Produk Hukum Provinsi yang Implementatif dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Mewujudkan Program Pembentukan Perda sesuai dengan kebutuhan Hukum di Daerah dan Meningkatkan Penataan Pengelolaan serta Penyebarluasan Informasi Hukum

1	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Pengelolaan serta Penyebarluasan Informasi Hukum

Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Keuangan, dan Administrasi Barang

1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Hukum, Tertibnya Administrasi dalam Pengelolaan Keuangan, Tersedianya Peralatan Kerja Penunjang Kinerja

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

IA SEKRETA
AN RPJMD I

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PENJABARAN RPJMD MISI KE - 5

LEVEL KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD — KINERJA STRATEGIS DAERAH

TUJUAN RENSTRA — KINERJA UBIKSAN / SUB UBIKSAN

SASARAN RENSTRA — KINERJA TAKTIKAL

Sasaran Perjanjian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik

1	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Nilai SAKIP
3	Indeks pelayanan publik
4	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
5	Nilai kematangan organisasi perangkat daerah provinsi
6	Fasilitasi dokumen penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kot
7	Indeks Budaya Kerja BerAkhlak
8	Indeks implementasi sistem kerja

Biro Organisasi

Sasaran Perjanjian Kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik
2	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana

Biro Umum

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Menyelenggarakan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

1	Tersedianya OPD yang tepat fungsi, tepat sasaran, tupoksi OPD, penataan kelembagaan dan UPTD sesuai kebutuhan daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta terlaksananya Rakor Bidang Organisasi
2	Tersedianya laporan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota, terbinanya pejabat yang telah memahami tata kelembagaan OPD serta terlaksananya fasilitasi proses penyusunan Perda OPD Kab/Kota
3	Tersedianya informasi jabatan dan peta jabatan, data rekapitulasi Forjab struktural dan fungsional serta terwujudnya pemeringkatan, nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Menyelenggarakan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

1	Tercapainya hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang optimal
2	Tercapainya kinerja yang mendapatkan penghargaan kategori BAIK
3	Terwujudnya budaya kerja yang optimal

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Menyelenggarakan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tatalaksana

1	Terlaksananya penilaian pelayanan publik, meningkatnya kualitas, kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam menyusun standar pelayanan publik
2	Terwujudnya tatalaksana pemerintahan, SOP, dan terlaksananya evaluasi tata naskah dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas
3	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

Kepala Bagian Tatalaksana

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Terkelolannya Penatausahaan Sarana dan Prasarana (Aet Setda) secara Akuntabel dan Reliabel

1	Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik dan Akuntabel

Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset

SKP — KINERJA OPERASIONAL

Sasaran Kinerja Pegawai
Tersedianya OPD yang tepat fungsi, tepat sasaran, tupoksi OPD, penataan kelembagaan dan UPTD sesuai kebutuhan daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta terlaksananya Rakor Bidang Organisasi

1	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Tersedianya informasi jabatan dan peta jabatan, data rekapitulasi Forjab struktural dan fungsional serta terwujudnya pemeringkatan, nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Tercapainya hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang optimal

1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Tercapainya kinerja yang mendapatkan penghargaan kategori BAIK

1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Terwujudnya budaya kerja yang optimal

1	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Tersediannya Informasi Data Inventaris Aset dan Pelaporan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah

1	Dokumen/Laporan Penatausahaan Aset dan Laporan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Terlaksananya Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) Lingkup Sekretariat Daerah Tepat Waktu

1	Jumlah SPM yang Terbit Tepat Waktu

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Terfasilitasinya dan Terkelolanya Penggunaan, Pengamanan serta Pemeliharaan Aset (Sarana dan Prasarana Rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, serta Kantor Gubernur/Lingkup Setda)

1	Jumlah Aset yang Terpelihara dengan Baik

Jabatan Fungsional

TA SEKRETA
TAN RPJMD :

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PENJABARAN RPJMD MISI KE - 5

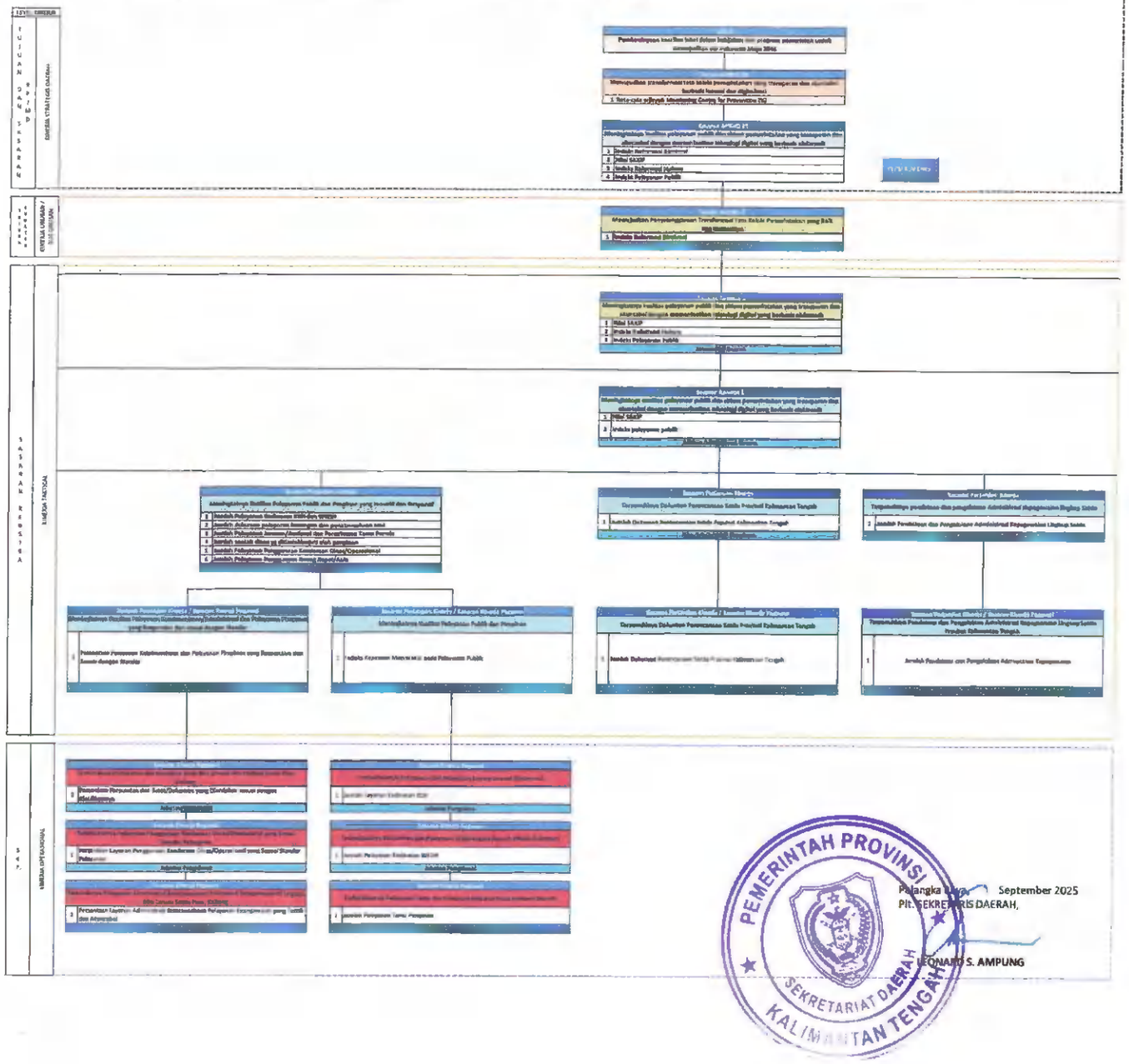

Palangka Raya, September 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

LEONARD S. AMPUNG

IA SEKRETA
AN RPJMD I

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PENJABARAN RPJMD MISI KE - 5

LEVEL KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN — RPJMD — KINERJA STRATEGIS DAERAH

TUJUAN — RENSTRA — KINERJA URUSAN / SUB URUSAN

SASARAN RENSTRA — KINERJA TAKTIKAL

SKP — KINERJA OPERASIONAL

Sasaran Renstra 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik

1	Indeks Pelayanan Publik

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sasaran Perjanjian Kinerja
Terlaksananya kegiatan penatausahaan lingkup Biro yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, dan operasional harian dari biro dan menjaga agar proses kegiatan di biro tetap berjalan dengan baik, teratur, dan efisien

1	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Biro

Biro Administrasi Pimpinan

Sasaran Perjanjian Kinerja
Terpenuhinya pelayanan kegiatan Pimpinan

1	Jumlah Pelayanan Kegiatan Pimpinan (Protokol dan Materi dan Komunikasi Pimpinan)

Biro Administrasi Pimpinan

Sasaran Perjanjian Kinerja
Terwujudnya Tata kelola Pengadaan yang Sesuai Dengan Prinsip Pengadaan

1	Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Tamu Kepala Daerah, dan Tamu Wakil Kepala Daerah, Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, serta Kegiatan Hubungan Keprotokolan

1	Jumlah Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Tamu Wakil Daerah
2	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
3	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Keprokolan

Bagian Protokol

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Terlaksananya Penyiapan Materi, Pimpinan, Fasilitas Komunikasi Pimpinan, Dokumentasi Pimpinan dan Penyediaan Bahan Bacaan di Setda Provinsi Kalimantan Tengah

1	Jumlah Penyusunan Materi Pimpinan
2	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3	Jumlah Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
4	Jumlah Bahan Bacaan di Setda Prov. Kalteng

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Mendorong Terciptanya Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Mendukung Efisiensi dan Efektifitas

1	Pengadaan Tepat Waktu

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Meningkatkan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik untuk Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa

1	Tersedianya Sistem Layanan Secara Elektronik

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sasaran Kinerja Pegawai
Pengadaan Tepat Waktu

1	Meningkatkan Kualitas Rumusan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
2	Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
3	Meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai
Tersedianya Sistem Layanan Secara Elektronik

1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik
2	Meningkatkan Kemampuan Sistem Informasi untuk Mendukung Seluruh Proses Pengadaan Barang dan Jasa
3	Meningkatkan Transparansi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat

Jabatan Fungsional

IA SEKRETA

AN RPJMD I

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

PENJABARAN RPJMD MISI KE - 5

LEVEL KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD — KINERJA STRATEGIS DAERAH

TUJUAN RENSTRA — KINERJA URUSAN / SUB URUSAN

SASARAN RENSTRA — KINERJA TAKTIKAL

Sasaran Perjanjian Kinerja

Tercapainya Target Data Pelaporan Pembangunan

1	Persentase Data Pelaporan Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

Biro Administrasi Pembangunan

Sasaran Perjanjian Kinerja

Meningkatkan Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan

1	Persentase Data Laporan Monitoring dan Evaluasi Anggaran APBD Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota
2	Persentase Data Laporan Monitoring dan Evaluasi Anggaran APBN Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota

Biro Administrasi Pembangunan

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatkan Profesionalitas SDM dan Tata Kelola Organisasi UKPBJ yang Transparan dan Akuntabel

1	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Pembinaan dan Kompetensi Aparatur Pelaksana PBJ

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai

Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah

1	Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
2	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3	Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai

Terpenuhinya Dokumen Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang Bersumber dari Dana APBD serta Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Biro

1	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
2	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Biro

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai

Terpenuhinya Dokumen Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang Bersumber dari Dana APBN

1	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang Bersumber dari Dana APBN

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

SKP — KINERJA OPERASIONAL

Sasaran Kinerja Pegawai

Jumlah Kegiatan dalam Rangka Pembinaan dan Kompetensi Aparatur Pelaksana PBJ

1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM
2	Meningkatkan Level Kematangan Kelembagaan UKPBJ yang Transparan dan Akuntabel
3	Meningkatkan Kapasitas Para Pemangku Kepentingan Pengadaan Barang dan Jasa
4	Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran

Jabatan Fungsional

Sasaran Kinerja Pegawai

Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Biro

1	Dokumen Perencanaan
2	Dokumen RKA
3	Dokumen Perubahan RKA
4	Dokumen DPA
5	Dokumen Perubahan DPA
6	Laporan Capaian Kinerja
7	Laporan Evaluasi Kinerja PD
8	Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro
9	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Biro
10	Pelaksanaan Bimbingan Teknis
11	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
13	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16	Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara
17	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

UNIT KERJA

IA SEKRETA
AN RPJMD I

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PENJABARAN RPJMD MISI KE - 5

LEVEL KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN — KINERJA STRATEGIS DAERAH RPJMD

TUJUAN RENSTRA — KINERJA UNSUR PIMPINAN / SUB UNSUR

SASARAN RENSTRA — KINERJA TAKTIKAL

Sasaran Renstra 5
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam Fungsi Pemerintahan Umum serta Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Pertanahan
1. Jumlah Kerjasama antar Pemerintah yang difasilitasi
2. Jumlah Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi

Sekretariat Daerah

Sasaran Renstra 5
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam Fungsi Pemerintahan Umum serta Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Pertanahan
1. Jumlah Kerjasama antar Pemerintah yang Difasilitasi
2. Jumlah Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Perjanjian Kinerja
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dala Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan serta Administrasi Tata Usaha Biro
1. Jumlah Kegiatan Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Proses Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Nama Rupabumi
3. Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sasaran Perjanjian Kinerja
Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Jumlah Dokumen Penyampaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Dokumen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Fasilitasi Dokumen Administrasi Kepala Daerah dan DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sasaran Perjanjian Kinerja
Meningkatkan Fasilitasi Hubungan Kerja Sama antar Pemerintah, Kerjasama antar Badan Usaha/Swasta, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama serta Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
1. Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah
2. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta
3. Jumlah Dokumen Evaluasi Kerjasama Provinsi dan Kerjasama di Kab/Kota

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dala Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan serta Administrasi Tata Usaha Biro
1. Jumlah Kegiatan Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Proses Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Nama Rupabumi
3. Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Bagian Pemerintahan

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Jumlah Dokumen Penyampaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Dokumen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Fasilitasi Dokumen Administrasi Kepala Daerah dan DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah

Bagian Otonomi Daerah

Sasaran Perjanjian Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai
Meningkatkan Fasilitasi Hubungan Kerja Sama antar Pemerintah, Kerjasama antar Badan Usaha/Swasta, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama serta Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
1. Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah
2. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta
3. Jumlah Dokumen Evaluasi Kerjasama Provinsi dan Kerjasama di Kab/Kota

Bagian Kerja Sama

SEKRETARIAT DAERAH

SKP — KINERJA OPERASIONAL

Sasaran Renstra 2

Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi (Kasus)		12	14	16	18	20	22	24

Sekretariat Daerah

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta terwujudnya perlindungan Hukum Kepada Semua Unsur Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100

Anggaran Tahun 2025	Rp1.797.837.786
Anggaran Tahun 2026	Rp1.297.564.236
Anggaran Tahun 2027	Rp1.426.930.234
Anggaran Tahun 2028	Rp1.569.214.480
Anggaran Tahun 2029	Rp1.724.312.544
Anggaran Tahun 2030	Rp1.863.561.588

Biro Hukum

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi, Non Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur	Tahun	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp1.163.506.340
Anggaran Tahun 2026	Rp697.564.236
Anggaran Tahun 2027	Rp721.930.234
Anggaran Tahun 2028	Rp764.214.480
Anggaran Tahun 2029	Rp794.312.544
Anggaran Tahun 2030	Rp843.561.588

Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tersedianya Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengkata Hukum Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Prov. Kalteng (Dokumen/Perkara)	Perkara / Dokumen	43	43	45	45	47	47

Anggaran Tahun 2025	Rp1.034.697.340,00
Anggaran Tahun 2026	Rp647.564.236
Anggaran Tahun 2027	Rp671.930.234
Anggaran Tahun 2028	Rp684.214.480
Anggaran Tahun 2029	Rp704.312.544
Anggaran Tahun 2030	Rp743.561.588

Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tersedianya Penanganan Sengkata Hukum Non Litigasi dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi Perangkat Daerah dan Aparatur (Kasus/Dokumen)	Kasus/ Dokumen	14	14	17	17	19	19

Anggaran Tahun 2025	Rp128.809.000,00
Anggaran Tahun 2026	Rp50.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp50.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp80.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp90.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp100.000.000

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi, Non Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur	Tahun	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp1.163.506.340
Anggaran Tahun 2026	Rp697.564.236
Anggaran Tahun 2027	Rp721.930.234
Anggaran Tahun 2028	Rp764.214.480
Anggaran Tahun 2029	Rp794.312.544
Anggaran Tahun 2030	Rp843.561.588

Indeks Reformasi Hukum

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, Terwujudnya program pembentukan perda/pergub	Dokumen	30	60	60	60	60	60

Anggaran Tahun 2025	Rp144.664.000
Anggaran Tahun 2026	Rp200.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp250.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp270.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp300.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp350.000.000

Indeks Reformasi Hukum

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	Dokumen	300	300	300	300	300	300

Anggaran Tahun 2025	Rp40.766.000
Anggaran Tahun 2026	Rp100.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp100.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp185.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp195.000.000

Indeks Reformasi Hukum

Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya penataan dan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp141.000.000,00
Anggaran Tahun 2026	Rp50.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp75.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp85.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp95.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp100.000.000

Indeks Reformasi Hukum

Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota yang di Fasilitasi dan Evaluasi	372	372	372	372	372	372	372

Anggaran Tahun 2025	Rp307.701.446
Anggaran Tahun 2026	Rp250.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp280.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp300.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp350.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp375.000.000

Sasaran RPJMD 25

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65,00	66,5	68	69,5	71	72,5
2	Nilai SAKIP	Nilai	71,00	73,5	76	78,5	81	83,5
3	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25
4	Indeks pelayanan publik	Indeks	2,69	2,63	2,75	2,88	3,00	3,13

SASARAN KEPALA DAERAH

Sasaran Renstra 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai SAKIP	Nilai	71,00	73,50	76,00	78,50	81,00	83,50
2	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,69	2,63	2,75	2,88	3,00	3,13
4	Persentase Terlaksananya Produk Hukum Daerah yang Impelementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta terwujudnya Perlindungan Hukum kepada semua Unsur Pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100

SASARAN Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Program Penataan Organisasi

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Terfasilitasinya Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan dan Peningkatan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100%	100%	100%

Anggaran Tahun 2025	Rp1.418.292.540
Anggaran Tahun 2026	Rp1.023.746.658
Anggaran Tahun 2027	Rp1.125.813.288
Anggaran Tahun 2028	Rp1.238.072.101
Anggaran Tahun 2029	Rp1.360.440.705
Anggaran Tahun 2030	Rp1.470.304.818

PROGRAM

Biro Organisasi

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	Tahun	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp514.794.140
Anggaran Tahun 2026	Rp400.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp450.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp510.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp550.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp580.000.000

Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	Tahun	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp903.498.400
Anggaran Tahun 2026	Rp623.746.658
Anggaran Tahun 2027	Rp675.813.288
Anggaran Tahun 2028	Rp728.072.101
Anggaran Tahun 2029	Rp810.440.705
Anggaran Tahun 2030	Rp890.304.818

KEGIATAN

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tersedianya OPD yang tepat fungsi, tepat sasaran, tupoksi OPD, penataan kelembagaan dan UPTD sesuai kebutuhan daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta terlaksananya Rakor Bidang Organisasi	Dok	30	30	30	30	30	30

Anggaran Tahun 2025	Rp194.024.080
Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp170.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp180.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp200.000.000

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tersedianya informasi jabatan dan peta jabatan, data rekapitulasi Forjab struktural dan fungsional serta terwujudnya pemeringkatan, nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Dok	30	30	30	30	30	30

Anggaran Tahun 2025	Rp163.916.960
Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp170.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp190.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp200.000.000

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tersedianya laporan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota, terbinanya pejabat yang telah memahami tata kelembagaan OPD serta terlaksananya fasilitasi proses penyusunan Perda OPD Kab/Kota	Dok	36	36	36	36	36	36

Anggaran Tahun 2025	Rp156.853.100
Anggaran Tahun 2026	Rp100.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp170.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp180.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp180.000.000

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tercapainya hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang optimal	Nilai	65,00	66,50	68,00	69,50	71,00	72,50

Anggaran Tahun 2025	Rp226.029.820
Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp170.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp180.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp200.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp200.000.000

2. Nilai SAKIP

Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tercapainya kinerja yang mendapatkan penghargaan kategori BAIK	Nilai	71,00	73,50	76,00	78,50	81,00	83,50

Anggaran Tahun 2025	Rp158.498.940
Anggaran Tahun 2026	Rp123.746.658
Anggaran Tahun 2027	Rp145.813.288
Anggaran Tahun 2028	Rp158.072.101
Anggaran Tahun 2029	Rp160.440.705
Anggaran Tahun 2030	Rp180.304.818

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya budaya kerja yang optimal	Prov, Kab/Kota	15	15	15	15	15	15

Anggaran Tahun 2025	Rp162.638.720
Anggaran Tahun 2026	Rp100.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp100.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp120.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp150.000.000

SUB KEGIATAN

Indeks Pelayanan Publik

Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya penilaian pelayanan publik, meningkatnya kualitas, kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam menyusun standar	Indeks	2,69	2,63	2,75	2,88	3,00	3,13

Anggaran Tahun 2025	Rp153.165.460
Anggaran Tahun 2026	Rp100.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp110.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp120.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp180.000.000

Indeks Pelayanan Publik

Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya tatalaksana pemerintahan, SOP, dan terlaksananya evaluasi tata naskah dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas	Prov, Kab/Kota	15	15	15	15	15	15

Anggaran Tahun 2025	Rp203.165.460
Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp180.000.000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1							

Anggaran Tahun 2025	Rp142.355.386.131
Anggaran Tahun 2026	Rp99.278.724.520
Anggaran Tahun 2027	Rp109.176.724.920
Anggaran Tahun 2028	Rp120.063.121.183
Anggaran Tahun 2029	Rp131.929.923.199
Anggaran Tahun 2030	Rp142.584.091.318

Biro Umum

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp835.000.000
Anggaran Tahun 2026	Rp560.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp640.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp765.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp835.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp835.000.000

Indeks pelayanan publik

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp15.000.000
Anggaran Tahun 2026	Rp10.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp10.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp15.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp20.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp20.000.000

Indeks pelayanan publik

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp300.000.000
Anggaran Tahun 2026	Rp150.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp200.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp300.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp300.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp300.000.000

Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Tersusunnya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp220.000.000
Anggaran Tahun 2026	Rp80.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp220.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp220.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp220.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp220.000.000

Nilai SAKIP

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4

Anggaran Tahun 2025	Rp30.000.000
Anggaran Tahun 2026	Rp10.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp30.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp30.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp30.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp30.000.000

Nilai SAKIP

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	6	6

Anggaran Tahun 2025	Rp30.000.000
Anggaran Tahun 2026	Rp10.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp30.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp30.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp30.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp30.000.000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Persentase Keterlaksanaan	Persen	100	100	100	100	100	100

Anggaran Tahun 2025	Rp5.631.585.803
Anggaran Tahun 2026	Rp3.927.471.034
Anggaran Tahun 2027	Rp4.319.036.397
Anggaran Tahun 2028	Rp4.749.702.748
Anggaran Tahun 2029	Rp5.219.153.997
Anggaran Tahun 2030	Rp5.640.633.391

Biro Administrasi Pimpinan

Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Tersusunnya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp44.837.500
Anggaran Tahun 2026	Rp31.269.697
Anggaran Tahun 2027	Rp34.387.258
Anggaran Tahun 2028	Rp37.816.133
Anggaran Tahun 2029	Rp41.553.805
Anggaran Tahun 2030	Rp44.909.535

Nilai SAKIP

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Jumlah Dokumen Perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tenga	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp44.837.500
Anggaran Tahun 2026	Rp31.269.697
Anggaran Tahun 2027	Rp34.387.258
Anggaran Tahun 2028	Rp37.816.133
Anggaran Tahun 2029	Rp41.553.805
Anggaran Tahun 2030	Rp44.909.535

Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Kegiatan	700	1000	1000	1000	1000	1000

Anggaran Tahun 2025	Rp1.785.212.764
Anggaran Tahun 2026	Rp1.245.008.363
Anggaran Tahun 2027	Rp1.369.134.587
Anggaran Tahun 2028	Rp1.505.655.826
Anggaran Tahun 2029	Rp1.654.471.877
Anggaran Tahun 2030	Rp1.788.080.850

Indeks pelayanan publik

Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kegiatan	700	1000	1000	1000	1000	1000

Anggaran Tahun 2025	Rp732.497.105
Anggaran Tahun 2026	Rp510.843.884
Anggaran Tahun 2027	Rp561.774.564
Anggaran Tahun 2028	Rp617.791.087
Anggaran Tahun 2029	Rp678.852.339
Anggaran Tahun 2030	Rp733.673.920

Indeks pelayanan publik

Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan),Terdiri dari Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan serta Jumlah Terlaksananya Kegiatan Upacara	Kegiatan	700	1000	1000	1000	1000	1000

Anggaran Tahun 2025	Rp729.436.008
Anggaran Tahun 2026	Rp508.709.073
Anggaran Tahun 2027	Rp559.426.914
Anggaran Tahun 2028	Rp615.209.345
Anggaran Tahun 2029	Rp676.015.423
Anggaran Tahun 2030	Rp730.607.905

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100	100	100

Anggaran Tahun 2025	Rp1.471.962.389,15
Anggaran Tahun 2026	Rp1.861.759.780
Anggaran Tahun 2027	Rp1.886.789.181,80
Anggaran Tahun 2028	Rp1.963.684.950,36
Anggaran Tahun 2029	Rp2.050.074.893,21
Anggaran Tahun 2030	Rp2.150.335.565,03

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro PBJ	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp5.999.700
Anggaran Tahun 2026	Rp6.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp6.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp6.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp6.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp6.000.000

Nilai SAKIP

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp999.950
Anggaran Tahun 2026	Rp1.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp1.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp1.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp1.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp1.000.000

Nilai SAKIP

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp999.950
Anggaran Tahun 2026	Rp1.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp1.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp1.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp1.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp1.000.000

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Paket Pelaksanaan PBJ	Tahun	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp1.692.554.948
Anggaran Tahun 2026	Rp2.628.045.000
Anggaran Tahun 2027	Rp2.663.376.301
Anggaran Tahun 2028	Rp2.771.921.743
Anggaran Tahun 2029	Rp2.893.863.058,90
Anggaran Tahun 2030	Rp3.035.396.236,78

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pelayanan Pemilihan yang Tepat Waktu sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100

Anggaran Tahun 2025	Rp300.292.601
Anggaran Tahun 2026	Rp989.668.699
Anggaran Tahun 2027	Rp1.000.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp1.000.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp1.000.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp1.041.527.178

Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp109.537.250
Anggaran Tahun 2026	Rp350.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp350.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp350.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp350.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp350.000.000

Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Pelaksanaan Barang dan Jasa

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp58.739.351
Anggaran Tahun 2026	Rp250.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp250.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp250.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp250.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp291.527.178

Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	1	1	1	1

Anggaran Tahun 2025	Rp132.016.000
Anggaran Tahun 2026	Rp389.668.699
Anggaran Tahun 2027	Rp400.000.000
Anggaran Tahun 2028	Rp400.000.000
Anggaran Tahun 2029	Rp400.000.000
Anggaran Tahun 2030	Rp400.000.000

Sasaran Renstra 1

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam Fungsi Pemerintahan Umum serta Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Pertanahan

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Kerjasama antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	2	2	3	3	3	3
2	Jumlah Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	2	2	3	3	4	4

Sekretariat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Keterlaksanaan	Persen	100	100	100	100	100	100

Anggaran Tahun 2025	Rp5.631.585.803
Anggaran Tahun 2026	Rp3.927.471.034
Anggaran Tahun 2027	Rp4.319.036.397
Anggaran Tahun 2028	Rp4.749.702.748
Anggaran Tahun 2029	Rp5.219.153.997
Anggaran Tahun 2030	Rp5.640.633.391

Biro Administrasi Pimpinan

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

	Indikator Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	80	80	85	85	90	90

Anggaran Tahun 2025	Rp3.374.127.727
Anggaran Tahun 2026	Rp3.331.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp3.375.781.791,03
Anggaran Tahun 2028	Rp3.513.361.197,25
Anggaran Tahun 2029	Rp3.667.927.271,09
Anggaran Tahun 2030	Rp3.847.310.401,73

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tersusunnya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp44.837.500
Anggaran Tahun 2026	Rp31.269.697
Anggaran Tahun 2027	Rp34.387.258
Anggaran Tahun 2028	Rp37.816.133
Anggaran Tahun 2029	Rp41.553.805
Anggaran Tahun 2030	Rp44.909.535

Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Kegiatan	700	1000	1000	1000	1000	1000

Anggaran Tahun 2025	Rp1.785.212.764
Anggaran Tahun 2026	Rp1.245.008.363
Anggaran Tahun 2027	Rp1.369.134.587
Anggaran Tahun 2028	Rp1.505.655.826
Anggaran Tahun 2029	Rp1.654.471.877
Anggaran Tahun 2030	Rp1.788.080.850

Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

	Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Tugas Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100

Anggaran Tahun 2025	Rp3.374.127.727
Anggaran Tahun 2026	Rp3.331.000.000
Anggaran Tahun 2027	Rp3.375.781.791,03
Anggaran Tahun 2028	Rp3.513.361.197,25
Anggaran Tahun 2029	Rp3.667.927.271,09
Anggaran Tahun 2030	Rp3.847.310.401,73

Nilai SAKIP

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tenga	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp44.837.500
Anggaran Tahun 2026	Rp31.269.697
Anggaran Tahun 2027	Rp34.387.258
Anggaran Tahun 2028	Rp37.816.133
Anggaran Tahun 2029	Rp41.553.805
Anggaran Tahun 2030	Rp44.909.535

Indeks pelayanan publik

Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kegiatan	700	1000	1000	1000	1000	1000

Anggaran Tahun 2025	Rp732.497.105
Anggaran Tahun 2026	Rp510.843.884
Anggaran Tahun 2027	Rp561.774.564
Anggaran Tahun 2028	Rp617.791.087
Anggaran Tahun 2029	Rp678.852.339
Anggaran Tahun 2030	Rp733.673.920

Indeks pelayanan publik

Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan),Terdiri dari Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan serta Jumlah Terlaksananya Kegiatan Upacara	Kegiatan	700	1000	1000	1000	1000	1000

Anggaran Tahun 2025	Rp729.436.008
Anggaran Tahun 2026	Rp508.709.073
Anggaran Tahun 2027	Rp559.426.914
Anggaran Tahun 2028	Rp615.209.345
Anggaran Tahun 2029	Rp676.015.423
Anggaran Tahun 2030	Rp730.607.905

Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp281.808.000
Anggaran Tahun 2026	Rp281.808.000
Anggaran Tahun 2027	Rp281.808.000
Anggaran Tahun 2028	Rp281.808.000
Anggaran Tahun 2029	Rp281.808.000
Anggaran Tahun 2030	Rp281.808.000

Nilai SAKIP

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tenga	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp44.837.500
Anggaran Tahun 2026	Rp31.269.697
Anggaran Tahun 2027	Rp34.387.258
Anggaran Tahun 2028	Rp37.816.133
Anggaran Tahun 2029	Rp41.553.805
Anggaran Tahun 2030	Rp44.909.535

Indeks pelayanan publik

Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan),Terdiri dari Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan serta Jumlah Terlaksananya Kegiatan Upacara	Kegiatan	700	1000	1000	1000	1000	1000

Anggaran Tahun 2025	Rp729.436.008
Anggaran Tahun 2026	Rp508.709.073
Anggaran Tahun 2027	Rp559.426.914
Anggaran Tahun 2028	Rp615.209.345
Anggaran Tahun 2029	Rp676.015.423
Anggaran Tahun 2030	Rp730.607.905

Indeks Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta

	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Anggaran Tahun 2025	Rp142.880.000
Anggaran Tahun 2026	Rp142.880.000
Anggaran Tahun 2027	Rp142.880.000
Anggaran Tahun 2028	Rp142.880.000
Anggaran Tahun 2029	Rp142.880.000
Anggaran Tahun 2030	Rp142.880.000

REVIU RENSTRA SETDA 2025-2029 OLEH INSPEKTORAT

Laporan Hasil Reviu
Rancangan Akhir RENSTRA
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Periode 2025 – 2029

Nomor LHR : 700.1.2.1/196/LHR/2025/INSP
Tanggal : 17 September 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT
Alamat : Jalan Yos Sudarso. No. 6 Palangka Raya 73112 ☎/fax. (0536) 3222359
Email : inspektorat@kalteng.go.id website : www.inspektorat.kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANOAN AKHIR RENCANA STRATEOIS
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENOAH
TAHUN 2025 - 2029

I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas rancangan akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 berupa pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir RENSTRA tersebut.

   Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen RENSTRA Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen RENSTRA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

   Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan terdapat hal-hal yang menjadi catatan sebagai berikut:
   a. Terdapat 15 catatan yang tidak selaras dalam Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029 (Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah Pemangku Urusan), sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Kertas Kerja Reviu (KKR) II;
   b. Terdapat 19 catatan yang tidak selaras dalam Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Program pada rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR IV; dan

c. Terdapat 4 catatan yang tidak selaras dalam Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR V.

d. Terdapat 13 catatan yang tidak selaras dalam Keselarasan Penetapan Target Sub kegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR VII.

II. Dasar Reviu

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
4. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1/1811/IJ tentang Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2020 dengan menggunakan Aplikasi *e-reviu* SIPD; dan
5. Surat Tugas dari Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP Tanggal 26 Agustus 2025 untuk melakukan Reviu atas Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029:

1. Tujuan RENSTRA adalah "Mewujudkan Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas".
2. Sasaran RENSTRA, terdiri dari:
   a. Meningkatnya pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis elektronik;
   b. Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah;
   c. Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian Masyarakat;
   d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat; dan
   e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dalam fungsi pemerintahan umum serta administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029:
   a. Tingkat Inflas.
   b. Indeks Reformasi Hukum.
   c. Indeks Reformasi Birokrasi.

III. Tujuan Reviu

Tujuan reviu rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RENSTRA telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
4. RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah tahun 2025-2029.
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada RPJMD tahun 2025-2029:
   a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
   b. Konsistensi Program Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kaiimantan Tengah.
4. Konsistensi Program Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
   a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
   b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen RPJMD adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029, RENSTRA Perangkat Daerah 2025 – 2029, dan dokumen terkait lainnya.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun melalui media komunikasi.
3. Pengujian terbatas melalui analisa dokumen terkait.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak tim penyusun RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum finalisasi laporan reviu atas rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025 -2029.

VI. Susunan Tim Reviu

Reviu atas RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/48/SPT/IRSAN-II/INSP tanggal 26 Agustus 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

1.	Penanggung Jawab	:	EKO SULISTIONO, S.STP, M. AP, COCAE NIP. 19791107 199810 1 001
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	CATUR ANOOORO AJI, SE NIP. 19771213 201101 1 001
3.	Pengendali Teknis	:	HENSLI KAMIAR, S.E., M.Acc., CFrA NIP. 19711230 199903 1 007
4.	Ketua Tim	:	DEDDY, ST. NIP. 197714 200803 1 001
5.	Anggota Tim	:	a) EDY WIDODO, S.Sos NIP. 19710915 200701 1 015 b) MARFENOKY WANTO, SE, M.Si NIP. 19870201 201402 1 001

VII Oambaran Umum

Sesuai Peraturan Oubernur Kalimantan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Oubernur Kalimantan Tengah No.60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian ponyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;
5. Pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi;
6. Fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
7. Pongelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

VII. Uraian Hasil Reviu

Serdasarkan hasil reviu terhadap :

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir RENSTRA PD Tahun 2025-2029

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **249** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR I dari aplikasi	-

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir RENSTRA PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

   Berdasarkan hasil reviu terdapat **15** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR II dari aplikasi, dengan rincian sehagai berikut:

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	**Tingkat Inflasi** merupakan Indikator yang lebih tepat masuk menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) bukan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), karena berada pada level yang iebih tinggi dari Program yaitu Sasaran.	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging sebagai IKD bukan IKU
2.	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan** Rakyat : Merupakan Indikator yang lebih tepat masuk menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD/OPD bukan	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging sebagai IKU bukan IKD

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
	menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), karena masih pada level Program	
3.	**Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif** : Merupakan Indikator yang lehih tepat masuk menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD/OPD bukan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), karena masih pada level Program	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging sebagai IKU bukan IKD
4.	**Persentase terwujudnya Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Implementatif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigas, layanan hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur** : Merupakan Indikatcr yang lebih tepat masuk menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD/OPD bukan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), karena masih pada level Program	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging sebagai IKU bukan IKD
5.	**Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan** : Merupakan Indikator yang lebih tepat masuk menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD/OPD bukan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), karena masih pada level Program	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging sebagai IKU bukan IKD
6.	**Inklusi Keuangan** : Merupakan Indikator yang lebih tepat masuk menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD/OPD bukan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), karena masih pada level Program	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging sebagai IKU bukan IKD
7.	**Efektivitas Kerja Sama Daerah** : menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD/OPD bukan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), karena masih pada level Program	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging sebagai IKU bukan IKD
8.	**Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan** : Merupakan Indikator yang lebih tepat masuk menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD/OPD bukan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), karena masih pada level Program	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging sebagai IKU bukan IKD
9.	**Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama** : Merupakan Indikator yang	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging sebagai IKU bukan IKD

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
	lebih tepat masuk menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD/OPD bukan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), karena masih pada level Program	
10.	**Nilai** SAKIP : Merupakan Indikator yang lebih tepat berada pada level yang lebih tinggi dari Program yaitu Sasaran	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging pada level SASARAN bukan PROGRAM
11.	**Indeks Pelayanan Publik** : Merupakan Indikator yang lebih tepat berada pada level yang lebih tinggi dari Program yaitu Sasaran	Agar Indikator ini dapat disesuaikan atau di-tagging pada level SASARAN bukan PROORAM
12.	**Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan** : Indikator ini tidak termuat dalam rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah	Indikator ini agar dihapus dari aplikasi
13.	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah** : Indikator ini tidak termuat dalam rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah	Indikator ini agar dihapus dari aplikasi
14.	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** : Indikator ini tidak termuat dalam rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah	Indikator ini agar dihapus dari aplikasi
15.	**Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan** : Indikator ini tidak termuat dalam rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah	Indikater ini agar dihapus dari aplikasi

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Sub Kegiatan pada rancangan akhir RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR III manual	-

4. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada rancangan akhir RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR IV dari aplikasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Berdasarkan RPJMD 4.01.02 Program Penataan Organisasi (Non Prioritas) Dan	Karena ada duplikasi agar indikator ini dihapus

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
	Rancangan Akhir RENSTRA PD 4.01.02 Program Penataan Organisasi pada 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Organisasi, Terdapat duplikasi di aplikasi program ini cukup memakai inputan yang dari Sekretariat Daerah	
2.	4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat(Non Prioritas) dan Rancangan Akhir RENSTRA PD 4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat pada 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat, Terdapat duplikasi di aplikasi program ini cukup memakai inputan yang dari Sekretariat Daerah	Karena ada duplikasi agar indikator ini dihapus
3.	4.01.06 Program Perekonomian Dan Pembangunan (Non Prioritas) dan Rancangan Akhir RENSTRA PD 4.01.06 Program Perekonomian Dan Pembangunan pada 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Perekonomian, Terdapat duplikasi di aplikasi program ini cukup memakai inputan yang dari Sekretariat Daerah	Karena ada duplikasi agar indikator ini dihapus
4.	4.01.07 Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa (Non Prioritas) dan 4.01.07 Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa pada 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Pengadaan Barang dan Jasa : Terdapat duplikasi di aplikasi program ini cukup memakai inputan yang dari Sekretariat Daerah	Karena ada duplikasi agar indikator ini dihapus
5.	4.01.08 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (Non Prioritas) dan 4.01.08 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan pada 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Administrasi Pembangunan : Terdapat duplikasi di aplikasi program ini cukup memakai inputan yang dari Sekretariat Daerah	Karena ada duplikasi agar indikator ini dihapus

5. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR V dari aplikasi, dengan catatan sebagai berikut:

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Perangkat Daerah Terkait 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan, IKU yang tersedia pada RENSTRA 2025 – 2029 Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan : Indikator	Indikator ini agar di hapus

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
	direkomendasikan untuk dihapus sebagaimana pada angka 2 KKR II	
2.	Perangkat Daerah Terkait 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan, IKU yang tersedia pada RENSTRA 2025 – 2029 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah : Indikator direkomendasikan untuk dihapus sebagaimana pada angka 2 KKR II	Indikator ini agar di hapus
3.	Perangkat Daerah Terkait 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan, IKU yang tersedia pada RENSTRA 2025 – 2029 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian : Indikator direkomendasikan untuk dihapus sebagaimana pada angka 2 KKR II	Indikator ini agar di hapus
4.	Perangkat Daerah Terkait 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan, IKU yang tersedia pada RENSTRA 2025 – 2029 Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan: Indikator direkomendasikan untuk dihapus sebagaimana pada angka 2 KKR II	Indikator ini agar di hapus

5. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR VI dari aplikasi.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 0 catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR VI	

7. Keselarasan Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR VII dari aplikasi, dengan catatan sebagai berikut:

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah : Penentuan Target 2026-2029 lebih kecil dibandingkan dengan Target/Realisasi DSSD tahun 2022.	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
2.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi : Penentuan Target 2026-	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
	2029 lebih besar dibandingkan dengan Target/Realisasi DSSD tahun 2023.	
3.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota : Penentuan Target 2025-2029 lebih besar dibandingkan dengan Target/Realisasi DSSD tahun 2023.	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
4.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Penataan Analisis Jabatan : Penentuan Target 2025-2029 lebih besar dibandingkan dengan Target/Realisasi DSSD tahun 2023.	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
5.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah : Penentuan Target 2025-2029 lebih kecil dibandingkan dengan Target/Realisasi	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
6.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta : Penentuan Target 2025-2029 lebih kecil dibandingkan dengan Target/Realisasi DSSD tahun 2023.	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
7.	Pelaksanaan Otonomi Daerah, Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Penentuan Target 2025-2029 ada yang masih kosong	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
6.	Pelaksanaan Otonomi Daerah, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan : Penentuan Target 2025-2029 lebih kecil dibandingkan dongan Target/Realisasi DSSD tahun 2023.	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
9.	Pelaksanaan Otonomi Daerah, Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD : Penentuan Target 2025-2029 lebih kecil dibandingkan dengan Target/Realisasi DSSD tahun 2023.	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
10.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Fasilitasi Penataan Wilayah : Penentuan Target 2025-2029 lebih kecil dibandingkan dengan Target/Roalisasi DSSD tahun 2023.	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
11.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum : Penentuan Target 2025-2029 lebih kecil dibandingkan dengan Target/Realisasi DSSD tahun 2023	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan
12.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan : Penentuan Target 2025-2029 lebih kecil dibandingkan dengan Target/Roalisasi DSSD tahun 2023	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
13.	Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan, Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya : Penentuan Target Tahun 2026-2029 berbeda cukup jauh dengan target tahun 2026.	Agar target ditelaah ulang sehingga dapat menyesuaikan

VIII. Apresiasi

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu rancangan akhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Palangka Raya, September 2025

Plt. INSPEKTUR DAERAH,

EKO SULISTIONO, S.STP, M.AP, CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

LAMPIRAN

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Disusun Oleh/Tanggal	MARFENGKI WANTG, S.E, M.Si dan EDY WIDODO, S.Sos.
	Direviu Oleh/Tanggal	DEDDY, S.T
	Direviu Oleh/Tanggal	HENSLI KAMIAR S.E, M.Acc., C.FrA

Uraian Catatan Hasil Reviu **)

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Kalimantan Tengab Nomor (selaras SPT) 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 31 Agustus 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancagan Akhir RENSTRA PD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA **UMUM**
Tujuan Sekretariat Daerah :

Mewujudkan Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas

Sasaran Sekretariat Daerah :

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan umum, serta Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Pertanahan

Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabol dongan memanfaatkan teknclogi digital yang berbasis elektronik

Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat

Tercapainya targot data pelaporan pembangunan dan capaian realisasi anggaran yang bersumber dari dana pusat dan daerah

Terlaksananya penyusunan Produk Hukum Daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan dan Penetapan

Terpenuhinya Perencanaan Setda, Kepegawaian dan Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian Serta Pelayanan Kegiatan Pimpinan

Tersedianya pomberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi dan Non Litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan yang Sesuai dengan Prinsip Pengadaan

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat dacrah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **249** catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR I (dari Aplikasi)

B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 0 catatan yang selaras dan **15** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tortuang dalam lampiran KKR II (dari Aplikasi)

C. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Sub Kegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR III (manual)

D. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan dengan dalam rancangan rancangan akhir Renstra **4**.01.0.00.0.00.01.0000-Sekretariat Daerah program prioritas daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

1. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
   Bordasarkan hasil reviu dinyatakan 0 catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

2. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 5 catatan yang selaras dan **19** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR IV.

E. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024

Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **1** catatan yang selaras dan **4** catatan yang tidak selaras sobagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR V

F. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **10** catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR VI.

G. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Berdasarkan hasil roviu dinyatakan 0 catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran KKR VII.

Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
(Ketua tim Penyusunan Ronstra)

Ir. SUNARTI, M.M.
NIP. 19690907 199403 2 005

Tanggal 8 September 2025
Supervisor/Pengendali Teknis

HENSLI KAMIAR, S.E., M.Acc, CFrA
NIP 19711230 199903 1 007

REVIU BAPPERIDA ATAS RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2025-2029

KERTAS KERJA VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS/BADAN : SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL	CHECK LIST		REKOMENDASI
			SELARAS	TIDAK SELARAS	
1	MATRIK TINDAK LANJUT CHR APIP	memastikan CHR APIP tentang Reviu Renstra ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan membuat Matrik tindak lanjut berdasarkan CHR.	✓		TL CHR sudah tersedia, namun masih ada TL yang belum sesuai yaitu : 1) Indikator "Tingkat Inflasi" berada pada level yang lebih tinggi dan bersifat lintas sektor, indikator ini sudah menjadi IKU di RPJMD, sehingga tidak perlu menjadi IKU di renstra karena akan terlalu berat dalam pencapaiannya.
2	POHON KINERJA	memastikan keterkaitan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu.	✓		1) Pohon Kinerja agar dimasukkan dalam print out renstra. 2) Terdapat 1 Tujuan renstra dan sudah sesuai, untuk Indikator Tujuan Renstra bisa menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi seperti yang sudah disarankan dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Hal. 81). 3) Indikator "Tingkat Inflasi" (sasaran Renstra 3), berada pada level yang lebih tinggi dan bersifat lintas sektor, indikator ini sudah menjadi IKU di RPJMD, sehingga tidak perlu menjadi IKU di renstra karena akan terlalu berat dalam pencapaiannya. 4) Sasaran Renstra (6) tidak boleh sama dengan sasaran RPJMD (21), hal ini dapat mengintreprefasikan bahwa sasaran renstra yang terlalu tinggi lingkupnya. 5) Indeks RB sesuai Inmendagri 2/2025 menjadi indikator tujuan renstra, sehingga tidak perlu diturunkan lagi menjadi indikator sasaran renstra. 6) Berdasarkan Inmendagri 2/2025, sasaran renstra 4 beserta indikatornya merupakan level program, sasaran renstra sebaiknya lebih tinggi dari outcome program. 7) Terdapat baberapa Indikator dalam SIPD yang di tagging ke dalam urusan Setda yang bisa menjadi rekomendasi untuk menjadi indikator sasaran renstra, antara lain : Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) >= B, Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori Baik, Perseutase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) >= B.
3	*CASCADING* KINERJA	memastikan keterkaitan penjenjangan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu. Penjenjangan Kinerja yang dimaksud memperhatikan komponen struktur perencanaan, struktur organisasi dan struktur anggaran.	✓		1) Cascading agar dimasukkan dalam print out renstra. 2) Jika pohon kinerja diperbaiki, cascading agar disesuaikan.
4	PROGRAM RENSTRA TERHADAP RPJMD	memastikan keselarasan dari Program dan Kinerja Program pada RPJMD terhadap Program pada RENSTRA PD.	✓		-
5	PROGRAM PRIORITAS	memastikan Program Prioritas **KARTU HUMA BETANG SEJAHTERA** sudah masuk pada RENSTRA PD.	✓		-
6	HAL-HAL LAIN	memastikan kesesuaian Sistematika, Target dan Prioritas Provinsi dan Nasional (Kementerian/Lembaga)	✓		Tabel 2.5. penyajian kinerja pelayanan PD agar memperhatikan target indikator tujuan dan sasaran per biro berdasar renstra 2021-2026 yang lalu dengan capaian indikator kinerja tersebut yang tersajikan dalam LKIP biro. Sehingga capaian kinerja tersebut tidak terkesan seperti output sub kegiatan dan bisa dianalisa kinerja mana yang masih menjadi masalah untuk dibahas dalam subbab 2.6
					Tabel 2.8. jumlah permasalahan PD dalam tabel ini masing kurang 2 poin dibanding yang disebut dalam subbab 2.6
					Bab 3 : sasaran PD bisa disesuaikan kembali jika terdapat perubahan pada pohon kinerja dan cascading
					Tabel 3.1 agar disesuaikan dengan pohon kinerja dan cascading
					Bab 4 (Hal 185-187) : agar ada penjelasan program sampai sub kegiatan tersebut menjadi prioritas untuk mendukung KHBS, Program Huma Betang, atau Tujuan dan Sasaran RPJMD.
					Tabel 4.4. : IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran renstra. Agar diperbaiki berdasar pohon kinerja dan cascading
					Tabel 4.5. : Tidak perlu memunculkan Indikator Kinerja Daerah karena tidak ada diminta dalam Inmendagri 2/2025. Cukup IKU dan IKK saja. IKK bisa mengambil Indikator outcome program

Verifikator :
Nama : Endratomo Pambudi
NIP : 198912182010101002
Jabatan : Perencana Ahli Muda
TTD :

Mengetahui Kepala Bidang :
Nama : Chandra Fuji Asmara, ST., M.Eng
NIP : 197706032003121007
Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
TTD :